

VERITY

Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional

ASEAN, Indonesia dan Rusia Timur Jauh: Peluang dan Diversifikasi
(ASEAN, Indonesia and Russia Far East: Opportunities and Diversification)
Adri Arlan

The Social Construction of US Naval Capabilities in Hollywood Films
Daniel Anugrah Widjaja

Analisa Konflik Wilayah Sahara Barat dan Upaya Resolusi Konflik
(West Sahara Conflict Analysis and Resolution Effort)
Sri Khairunnisa Ariyati

A Review on the Non-Demarcation Border Cooperation Between Indonesia and Malaysia
Michelle Viandy Huang

Analisis Ekspor dan Impor Limbah Padat antara Cina dan Amerika Serikat: Operation Green Fence (2013) dan Operation National Sword (2019)
(Analysis of Solid Waste Export and Import between China and the United States: Operation Green Fence (2013) and Operation National Sword (2019)
Meilisa Setyani

VERITY

Verity diterbitkan oleh Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pelita Harapan 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan Januari dan Juli. Jurnal ini diterbitkan sebagai sarana pertukaran dan penyebaran gagasan-gagasan ilmiah dalam bidang Hubungan Internasional dan bidang-bidang lain yang terkait dengannya.

Pelindung	: Aleksius Jemadu
Penanggung Jawab	: Susy Tekunan
Mitra Bestari	: C.P.F. Luhulima Hariadi Wirawan Ian Robert Cosh Makmur Keliat A.Y. Agung Nugroho
Pemimpin Redaksi	: Susy Tekunan
Redaksi	: Adri Arlan Amelia Liwe Edwin Tambunan Elyzabeth Bonethe Nasution Floranesia Lantang Gusti Patading Hetty Antje Geru Ignatius Ismanto Johanes Herlijanto Reggianie Christy Natalia Richard Daulay Roy Pratikno Yosef Djakababa
Kreatif/Disain	: Susy Tekunan Firman Daud Christina Florensy Mandagi Jhon Maxwell Yosua
Administrasi & Keuangan	: Elfi Fransisca K. Endah P.
Sirkulasi & Distribusi	: Rouli Afrilya Gultom

Alamat Redaksi:

Jurnal Ilmiah Verity
Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pelita Harapan
UPH Tower, Lippo Village
Karawaci, Tangerang 15811
Telp. (021) 5460901; Faks. (021) 5460910; E-mail: verity@uph.edu

DAFTAR ISI

Tahun 11, Nomor 22, Juli – Desember 2019

P-ISSN: 2086-5554 | E-ISSN: 2614-0470

Pengantar Redaksi

ASEAN, Indonesia and Russia Far East: Opportunities and Diversification

Adri Arlan5-16

The Social Construction of US Naval Capabilities in Hollywood Films

Daniel Anugrah Widjaja17-29

Analisa Konflik Wilayah Sahara Barat dan Upaya Resolusi Konflik

Sri Khairunnisa Ariyati.....30-40

A Review on the Non-Demarcation Border Cooperation between Indonesia and Malaysia

Michelle Viandy Huang41-50

Alisis Ekspor dan Impor Limbah Padat antara Cina dan Amerika Serikat: Operation Green Fence (2013) dan Operation National Sword (2019)

Meilisa Setyani51-69

Biodata

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Verity edisi kedua tahun 2019 mengangkat beragam isu hubungan antar negara yang diwarnai dengan relasi bilateral maupun pertunjukan kekuatan/ *show of power* negara-negara tertentu. Edisi ini memberikan analisa konflik dalam ranah kekuatan militer, kerjasama negara di bagian perbatasan sampai masalah yang dipicu oleh ekonomi dan isu lingkungan. Relasi Indonesia dengan negara lain masih mendominasi edisi kali ini namun juga diselingi dengan beberapa isu negara-negara besar dunia seperti Amerika Serikat, Cina dan Rusia. Ulasan dalam edisi kali ini diharapkan dapat memberikan beberapa pandangan baru mengenai relasi antar beberapa negara baik yang sering muncul dalam pembahasan kasus hubungan internasional maupun yang kurang mendapat perhatian seperti konflik di Sahara Barat.

Tulisan pertama membahas kesempatan kerjasama antara negara-negara dalam ASEAN dengan Rusia. Hubungan Rusia dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Pasifik selama ini kurang terbangun akibat kesan maraknya perebutan kekuasaan antara Amerika Serikat dan Cina di kawasan Asia Tenggara. Pemerintahan Putin akan kembali meningkatkan kerjasama dengan ASEAN. 70 tahun hubungan diplomatik Rusia dengan Indonesia salah satunya ditandai dengan meningkatnya investasi Rusia yang oleh Adri Arlan sebagai penulis dapat menjadi momentum untuk hubungan yang semakin erat. Tulisan kedua karya pemikiran Daniel Anugrah Widjaja menganalisa pendekatan Amerika Serikat dalam memproyeksikan kekuatan militer terutama angkatan laut negara adidaya ini dalam diplomasi layar lebar. Melalui pendekatan pandangan konstruktivisme, penulis berpendapat bahwa pemerintah Amerika Serikat berperan dalam memberikan gambaran positif terhadap angkatan laut AS melalui jangkauan global Hollywood sebagai salah satu upaya diplomasi budaya yang berhasil. Dari ulasan mengenai dua kekuatan utama masa perang dingin ini, tulisan selanjutnya beranjak ke wilayah Afrika dan memaparkan analisa konflik di wilayah Sahara Barat antara Maroko dan Front Polisario sebagai pengusung gerakan separatisme. Tulisan oleh Sri Khairunnisa Ariyati mengangkat konflik yang mulai berkembang sejak tahun 1956 sampai sekarang. Menurut penulis, konflik yang melibatkan PBB, Aljazair dan Mauritania ini belum terselesaikan akibat kegagalan dalam melakukan identifikasi dan menganalisa masalah.

Michelle Viandy Huang menyampaikan paparan mengenai kerjasama perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang dikemas dalam dua kesepakatan yaitu General Border Committee dengan fokus keamanan dan Border Trade Agreement dengan fokus perdagangan. Menurut penulis adanya tumpang tindih cakupan kerjasama membuat hubungan kedua negara di wilayah perbatasan ini kurang efektif. Kedua tulisan terakhir membahas isu di kawasan Asia yang berkaitan dengan pengaruh Cina. Tulisan terakhir dalam edisi ini adalah karya Meilisa Setyani membahas perkembangan penjualan limbah padat dari Amerika Serikat ke Cina yang terhambat akibat meningkatnya upaya perbaikan lingkungan di Cina. Meilisa membahas perkembangan ini dalam dua gerakan yang dilakukan Cina yaitu kebijakan Operation Green Fence (OGF) dan Operation National Sword (ONS). Hasil analisa penulis mengungkap bahwa faktor pemicu utama yang menghambat alur pembelian limbah padat dari Amerika Serikat adalah masalah lingkungan.

➤ **Redaksi**

ASEAN, INDONESIA DAN RUSIA TIMUR JAUH: PELUANG DAN DIVERSIFIKASI

ASEAN, INDONESIA AND RUSSIA FAR EAST: OPPORTUNITIES AND DIVERSIFICATION

Adri Arlan
Universitas Pelita Harapan, Karawaci
e-mail: adri.arlan@uph.edu

ABSTRACT

Indonesia-Russia relations started since the end of World War II. Early relations were poor but became close during the Sukarno period. The post-Soviet era ushered a new height of Russia's political, diplomatic, and economic presence in Southeast Asia. After the dissolution of the United Soviet Socialist Republic (USSR), Russia has focused on a grand re-engineering project, an important component of institutional stability. Part of the re-structuring included ambitious actions to re-brand a powerful image of her position in Southeast Asia, and in Asia and the Pacific, in general. Scholars have argued that there is a lack of knowledge in terms of Russia's relations with countries of Southeast Asia (ASEAN). This can be explained by Russia's unfamiliarity over the region's diversity and by her insecurity with the dominance of the United States and China, among others. Nevertheless, the Putin Government has shifted its lens towards the Southeast Asian region by establishing stronger ties in areas of security and defense, energy development, and trade and people-to-people exchanges. This paper employs an 'ethic' perspective analysis of the actions taken by Russia in these areas and suggests possible future actions to enhance collaboration and cooperation with Southeast Asian countries such as Indonesia.

Keywords: Economic development; Collaboration; ASEAN; Russian Far East.

ABSTRAK

Hubungan Indonesia-Rusia telah dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia ke II. Kerja sama yang terjadi antara kedua negara terjalin cukup erat di era Presiden Sukarno. Pasca runtuhnya Uni Soviet terjadi perubahan dinamika dalam hubungan politik, diplomatik dan ekonomi Rusia di Asia Tenggara. Saat ini Rusia fokus dalam menata ulang *grand strategy* penguatan kestabilan institusi baik dalam maupun luar negeri. Dalam hal penataan ulang kebijakan strategi luar negeri, Rusia berupaya untuk menciptakan *image* baru di Asia Tenggara dan Pasifik. Secara umum, para ahli berargumen bahwa masih minimnya wawasan dalam konteks hubungan Rusia dan Asosiasi Negara di Asia Tenggara (ASEAN). Hal ini dijelaskan dengan minimnya peran Rusia dalam hal kerja sama dan insekuritas akibat dominasi Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok yang sudah mengakar kuat di kawasan. Namun demikian, administrasi Putin mencoba meningkatkan perhatiannya ke ASEAN dengan meningkatkan ikatan kerja sama dalam sektor pertahanan dan keamanan, energi, perdagangan dan *people to people contact*. Tulisan ini mengulas pendekatan 'etis' berupa pola kebijakan kerja sama yang diimplementasikan oleh Moskow serta rekomendasi diversifikasi kerja sama Rusia dengan negara di Asia Tenggara seperti Indonesia.

Kata kunci: Perkembangan ekonomi; Kolaborasi; ASEAN; Rusia Timur Jauh

Pendahuluan

Kompleksitas tata-tatanan ekonomi global membuat Rusia memikirkan kembali posisi geopolitik dan pendekatan ekonomi. Runtuhnya Uni Soviet pada 1991,

melahirkan Rusia yang menempatkan banyak perhatian dalam penguatan institusi seperti *Eurasian Economic Union* (EAEU) guna mempertahankan supremasi dan kontrol bagi

bekas negara satelit. Pasca Uni Soviet juga ditandai dengan ketidakpastian dan kegagalan Rusia dalam mencoba untuk bertransisi menjadi negara yang demokratis dengan sistem ekonomi liberal. Faktor-faktor ini membuat para pembuat kebijakan di Moskow untuk berpikir ulang tentang *grand strategy* guna meningkatkan posisi tawar Rusia di dunia.

Citra global Rusia kembali terpuruk akibat aneksasi Kremlin terhadap Krimea di 2014. Hal ini mengakibatkan perpanjangan sanksi ekonomi yang diberikan oleh Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS). Selain berdampak mengurangi keuntungan dari hubungan dagang, sanksi ekonomi juga membuat kenaikan harga komoditas secara mendadak. Krisis ekonomi dalam pasar global di *Eurozone* telah menyebabkan efek domino bagi ekonomi Rusia. Perdana Menteri Dmitry Medvedev mengatakan bahwa sanksi telah membuat kerusakan berarti bagi perekonomian Rusia (Roth, 2015).

Rusia tentunya ingin mengembalikan kejayaan pengaruhnya di masa lalu. Pada era modern saat ini, cara untuk menjadi diakui di kompetisi global adalah penguatan diplomasi ekonomi. Presiden Vladimir Putin mengulangi pernyataan itu ketika mengunjungi Shanghai bahwa Rusia menggunakan strategi '*Turn to East*' (Petrovsky, 2014) dan Bhavna Dace (2016). Tercatat bahwa poin deklarasi tersebut menjadi prioritas pada awal pemerintahan Putin. Skema poros ke timur (Rusia: *povorot na Vostok*) atau *Pivot to Asia* (Rusia: *povorot ke Azii*) sudah dicanangkan sejak tahun 2001. Strategi tersebut diklasifikasi menjadi tiga tujuan utama pemerintah Rusia.

Pertama, mempercepat pengembangan kawasan Timur Jauh Rusia agar lebih terintegrasi dengan Kawasan Asia-Pasifik. Kedua, meningkatkan pengaruh Rusia di Kawasan Asia Pasifik berdasarkan kemitraan eratnya dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan diversifikasi komoditas ekonomi. Ketiga, memperluas hubungan ekonomi, komersial dan strategis dengan ASEAN melalui Vietnam dan Laos dan penjangkauan

kerja sama multilateral melalui *Eurasian Economic Community* (EAEU) dan *Shanghai Cooperation Organization* (SCO).

Pendekatan hubungan diplomatik yang diadopsi oleh administrasi Putin berfokus pada Kawasan Timur Jauh (Sino-sentris). Prioritas pertama pada sektor energi khususnya pada pasokan minyak dan gas, perdagangan, transfer teknologi, dan perjanjian kerja sama ekonomi. Strategi Rusia '*Turn to the East*' terbukti lebih tahan lama dan substansif daripada kebijakan masa lalu. Fenomena ini disebabkan karena pusat gravitasi ekonomi global mulai bergerak dari Eropa-Atlantik ke Asia-Pasifik. Dinamika keamanan kawasan pun menjadi lebih kompleks (Dave, 2016). Rotasi tersebut adalah bagian tak terpisahkan dari status hegemon Rusia (Koldunova & Rangsimalon, 2016 di The ASAN Forum, Juli 2016). Di sisi lain juga terjadi eskalasi arsitektur keamanan oleh AS dan RRT di kawasan Asia-Pasifik.

Identitas Neo-Eurasianisme

Moskow menyadari bahwa strategi global dalam Sino-sentris tetap harus menyertakan Eurasia. Para ahli geopolitik Rusia seperti Mikhail Titarenko dan Vladimir Petroskii menggambarkan identitas Neo-Eurasia oleh Rusia. Mereka berpendapat bahwa di Rusia, '*Turn to East*' memiliki makna ideologis mendalam yang tertanam dalam cara hidup dan budaya Rusia.

Gambar 1. Peta Rusia Timur Jauh
Manifestasi budaya dari identitas Rusia yang kuat mempengaruhi cara pemerintah

Putin dalam merancang jenis kebijakan di Kawasan Eurasia. Budaya Eurasia merupakan definisi ulang dari hubungan yang berakar kuat dalam sistem politik luar negeri Rusia dalam periode Uni Soviet.

Putin menegaskan bahwa Eurasianisme mengacu pada tradisi pemikiran politik Rusia yang mengakar dan memiliki landasan historis dan filosofi. Perlakuan setara dalam budaya Eurasia, termasuk tidak memilih budaya Rusia karena kemajemukan etnis.

Hakikat Eurasianisme menjelaskan tentang sifat-sifat baik dalam kemanusiaan seperti rukun, kerja sama, tolong menolong



dan pendekatan damai daripada persaingan (*The ASAN Forum, Mei 2016*). Titarenko dan Petroski mencatat bahwa Rusia mencoba bersikap obyektif dalam paradigma Eurosentrisme dengan menggunakan Eurasianisme untuk menjembatani EAEU dan *Belt Road Initiative* (BRI).

Putin menganggap kawasan Timur Jauh Rusia sebagai pintu gerbang utama ke Asia Tenggara. Kawasan ini membutuhkan strategi pembangunan yang konkret dan berkesinambungan. Wilayah yang meliputi Siberia, Vladivostok, Khabarovsk dan Yakutia masih minim populasi dan dianggap sebagai kawasan terbelakang, jika dibandingkan dengan Moskow atau Saint Petersburg yang dekat dengan Eropa. Rusia ingin memanfaatkan potensi wilayah Timur Jauh yang berbatasan langsung RRT, Mongolia, Jepang dan Korea untuk memperluas pengaruhnya di Asia-Pasifik. Adanya hubungan antara EAEU dan BRI diharapkan akan membuka potensi daerah dalam menciptakan peluang untuk investasi yang diiringi dengan pertumbuhan dan peningkatan pergerakan modal, barang, jasa dan tenaga kerja. Namun, Rusia juga dihadapkan pada berbagai masalah. Salah satunya kendala birokrasi seperti anggaran. Para elit Rusia umumnya lebih suka berhubungan dengan Eropa daripada Asia. Investor dari Rusia juga lebih ingin

memperkuat bisnis mereka di Eropa Barat daripada investasi di kawasan Timur Jauh.

Putin kemudian mendirikan Kementerian Pengembangan Timur Jauh Rusia *Minvostokrazvitiya* (MDFE) di 2012. Kementerian yang ditugaskan sebagai bagian dari implementasi program pemerintah pusat dan program pemerintah federal. MDFE diproyeksikan menjadi program jangka panjang oleh Kremlin (Situs resmi MDFE, 2020). Alexander Galushka diangkat sebagai Menteri MDFE pertama pada 2013. Kepemimpinan Galushka menandai perubahan strategi dalam pembangunan di kawasan Timur Jauh Rusia. Pada 2018, Galushka digantikan oleh Alexander Kozlov. Misinya tetap sama.

Pergeseran dari pembangunan lokal yang berorientasi pada infrastruktur dan transportasi saat ini beralih menjadi program padat karya yang berfokus pada penguatan industri perdagangan dan investasi ke negara-negara di Asia Pasifik. Dalam sektor modernisasi militer dan pertahanan, Putin berkomitmen dengan investasi besar-besaran di wilayah Timur Jauh. Perdana Menteri (PM) Medvedev meluncurkan program investasi sebanyak 500 miliar rubel (sekitar US\$ 16 miliar) pada 2013. Dia mengarahkan pemerintah dalam komitmen pendanaan dari 100 miliar rubel (sekitar US\$ 3,22 miliar) per tahun hingga 2018 (Dave, 2016). MDFE juga ditugaskan dalam pembentukan dan regulasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK akan memudahkan pergerakan barang dan komoditas bebas pajak di seluruh wilayah. Strategi ini akan menarik lebih banyak investasi dari Cina, Jepang, dan Korea Selatan.

Reformasi kebijakan pembangunan adalah alat bagi Rusia untuk menembus dominasi Cina, Jepang, dan Korea Selatan di kawasan Indo-Pasifik. Moskow menggunakan pendekatan yang lebih pragmatis dan realistis untuk manfaat ekonomi yang lebih besar. Hal ini dilakukan guna mendapatkan kembali citra hegemon di wilayah tersebut seperti era Soviet. Untuk mewujudkan hal ini, Rusia menganggap kawasan Asia Tenggara dan ASEAN sebagai

penyangga aktivitas ekonomi yang berpusat pada kawasan Asia Pasifik. Perekonomian negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Vietnam yang sedang meningkat dipandang cukup menjanjikan bagi Moskow. Mereka berpeluang besar melibatkan diri di wilayah tersebut. Ditambah integrasi ekonomi antar negara ASEAN. Intinya, Moskow akan fokus pada tiga aspek area kerja sama dalam meningkatkan trek hubungan Rusia dan ASEAN. Area-area ini meliputi kerja sama pertahanan dan keamanan, pengembangan sektor energi dan pertambangan dan *people to people contact*.

Integrasi ASEAN

ASEAN berdiri 8 Agustus 1967. Deklarasi Bangkok yang disepakati oleh lima pendiri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Tujuan utamanya memastikan kestabilan politik dan keamanan kawasan yang berpusat dalam kerja sama ekonomi. ASEAN menambah keanggotaannya mulai dari Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Laos dan Myanmar (1997) dan Kamboja (1999). Timor Leste telah mengupayakan keinginan untuk bergabung dengan ASEAN di 2011. Sampai sekarang, proposal yang diberikan masih dipertimbangkan.

ASEAN adalah organisasi kawasan yang anggota dan partner dialognya bebas berdiskusi dalam memberikan solusi bagi masalah internal, eksternal dan tantangan ke depan. Dari sebatas forum, menjadi ajang diskusi politik dan isu keamanan menuju integrasi ekonomi, sosial, dan budaya. Integrasi melalui pendekatan dialog dalam kerja sama regional melalui konsensus dan fleksibilitas yang disebut sebagai *the ASEAN Way*.

ASEAN mengedepankan dialog dalam arsitektur regional melalui mekanisme *ASEAN Regional Forum* (ARF), Asia-Eropa Meeting (ASEM), ASEAN Plus 3 (RRT, ROK dan Jepang), East Asia Summit (ASEAN plus Australia, RRT, India, Jepang, ROK dan Selandia Baru). Pada *ASEAN Summit* ke 12, para pemimpin negara

memutuskan untuk mentransformasikan ASEAN ke dalam suatu kawasan yang solid dan kompetitif dengan pembangunan ekonomi yang setara, penurunan angka kemiskinan ekonomi melalui integrasi ekonomi regional dalam Komunitas ASEAN di 2015, yang bertumpu pada tiga pilar yaitu: Politik & Keamanan (APSC), Ekonomi (AEC) dan Sosial Budaya. (ASCC).

Dinamika Hubungan Rusia-ASEAN

Hubungan Rusia-ASEAN memiliki sejarah panjang. Setelah Perang Dunia II, Rusia menyediakan banyak bantuan luar negeri bagi negara-negara di Asia Tenggara dalam bentuk bantuan dana. Kegiatan yang dilakukan guna mengembalikan perekonomian negara pasca perang. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov mencatat bahwa Rusia memiliki sejarah hubungan yang dekat dengan negara Indochina dan Indonesia. Persahabatan dengan Thailand yang tidak pernah putus. Hubungan baik dengan Malaysia, Singapura, Filipina dan Brunei. Menlu Lavrov dalam '*Mezhdunarodnaya zhizn*' menitikberatkan hubungan Russo-ASEAN.

Lavrov memperkenalkan ASEAN sebagai pusat dari wilayah Asia Pasifik, yang akan kembali menjadi pusat dari dunia ekonomi dalam arsitektur kawasan global yang polisentris (*The ASEAN Forum Country Report, July 2016*).

Hubungan bilateral yang komprehensif telah diperkuat ketika Rusia turut berpartisipasi di *ASEAN Regional Forum* (ARF) di 1994. ARF adalah forum diskusi dalam bidang politik dan keamanan dan pencarian solusi melalui mekanisme dialog. Rusia menjadi mitra dialog ASEAN secara resmi di 1996. Hal ini ditandai dengan persetujuan Rusia terhadap pakta non agresi ASEAN, traktat persahabatan dan kerja sama (TAC) di 2004. Rusia bersama AS juga bergabung dalam *East Asia Summit* (EAS) di 2011.

Artikel berjudul, "*Can Russia be a Leader in East Asian Economic Integration?*" (2016), oleh Ekaterina Koldunova, Profesor di *Moscow State*

Institute of International Relations (MGIMO) menulis bahwa kepemimpinan Rusia menyadari satu cara termudah menaikkan *political leverage* adalah berpartisipasi di kerja sama regional. Rusia banyak bergabung dalam organisasi kerja sama kawasan. Melalui jejaring ini kehadiran dan partisipasi Rusia menjadi lebih nyata dalam proses integrasi di kawasan Asia Pasifik. Seperti yang terjadi di 2012, ketika Rusia menjadi tuan rumah di Forum Kerja Sama Asia Pasifik (APEC). Forum ini adalah kendaraan bagi Rusia untuk menjembatani kesenjangan antara pengaruh politik dan ekonomi mereka di kawasan. Di sisi lain Rusia membuktikan kemampuannya sebagai *game changer* untuk kerja sama ekonomi regional. Caranya melalui pendekatan untuk pengembangan kerja sama kawasan (Koldunova, 2016).

Beberapa kerja sama penting antara Rusia – ASEAN meliputi Deklarasi Bersama dalam Kerja Sama untuk Perdamaian dan Keamanan dan Kesejahteraan dan Pembangunan di Asia Pasifik, Deklarasi Bersama dalam Kerja Sama Berkelanjutan dan Komprehensif 2005-2015, *Comprehensive Partnership Agreement* (CEPA) dan Kerja Sama dalam Ekonomi dan Pembangunan (Kozyrev, 2016).

Saat ini, Rusia memimpin EAEU. EAEU telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Vietnam di Mei 2015. Hal ini menunjukkan keinginannya berintegrasi dengan perekonomian ASEAN. Pemerintah Rusia juga menjadi tuan rumah dalam peringatan ulang tahun ke 20 *ASEAN Dialogue Partner* pada 19-20 Mei 2016 di Sochi. Rusia menginginkan bentuk mekanisme integrasi jaringan antara EAEU, ARF dan SCO (Kozyrev, 2016). Perkembangan EAEU membuat Rusia berambisi meningkatkan kerja sama antara kawasan Asia Timur dan Tenggara. Anggota EAEU antara lain Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan dan Rusia. EAEU bertujuan untuk meningkatkan efisiensi transaksi perdagangan yang akan memaksimalkan pendapatan melalui

pergerakan bebas dari barang, jasa, dan tenaga kerja.

Faktor ini mengindikasikan bahwa Rusia telah menaikkan prioritas terhadap kawasan ASEAN sebagai mitra yang tak tergantikan untuk sektor ekonomi, politik, dan social budaya. Berakar dari Eurasianisme yang menginginkan integrasi berkesinambungan, inklusif dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Rusia juga memperhatikan dinamika dalam sektor pertahanan. Saat ini, risiko konflik di Laut Cina Selatan (LCS) tetap tinggi. ASEAN mengakui bahwa negara-negara yang beririsan dalam konflik LCS akan terus memanas ketika terprovokasi. Tidak tertutup kemungkinan akan bereskalasi menjadi perang. Partisipasi Rusia di ASEAN sebagai salah satu platform dialog untuk menjaga kestabilan dan perdamaian. Ian Storey, Peneliti Senior di *Institute of Southeast Asian Studies* (Yusof Ishak Institute) menggarisbawahi bahwa Kremlin tidak akan mengintervensi Cina dan Vietnam, mitra terdekat Rusia di wilayah. Imbasnya Rusia akan sulit untuk menentukan posisinya dalam konflik tersebut (Lavrov, 2010). Namun posisi Rusia tegas menyatakan bahwa negara-negara yang terkait harus menghormati hukum internasional yang berlaku. Kesepakatan damai bersama atas masalah dititikberatkan pada ketaatan hukum dibawah *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*.

Rusia dalam berbagai macam forum menekankan bahwa negara harus mematuhi *Code of Conduct* antara ASEAN-RRT tentang Aturan Bersama di LCS (CoC). Presiden AS, Barrack Obama telah mendeklarasikan strategi Asia-Pasifik sebagai pivot di 2010. AS sebagai kekuatan ekonomi dan politik global, mengambil kebijakan yang tepat dalam mempertahankan status quo di kawasan. Asia Pasifik adalah tempat bagi perkembangan ekonomi yang menarik minat berbagai pihak yang berkepentingan. Rusia harus lebih waspada dalam kesepakatan yang diberikan oleh AS guna mempertahankan kekuatannya yang selama ini berakar di Asia Pasifik. Salah satu

cara untuk masuk ke ASEAN adalah melalui RRT dengan kebijakan *Belt Road Initiative* (BRI) yang sudah terkoneksi dengan Asia Tenggara. Hal selanjutnya yang tidak kalah penting adalah analisis terhadap tiga aspek kerja sama dimana Rusia bisa berpartisipasi aktif dalam ASEAN.

3. Area Kerja Sama Prioritas Rusia - ASEAN

Pasang surutnya hubungan antara Rusia dengan UE dan AS terus terjadi. Rusia menganggap peran unik ASEAN sebagai *pivot* dalam integrasi kawasan adalah kunci dalam stabilitas keamanan di Asia Pasifik. Rusia memiliki hubungan baik dengan beberapa negara anggota ASEAN seperti Indonesia, Vietnam, Laos dan Thailand. Bagian ini akan menganalisis beberapa perluasan kerja sama di mana Rusia bisa berinteraksi lebih dalam di Asia Tenggara. Hubungan yang terjalin antara Rusia dengan Indonesia masih dianggap sporadis dan tidak konsisten. Rusia tidak pernah berpartisipasi dalam beberapa pembicaraan politik penting diplomatik di *East ASEAN Summit* (Lavrov, 2010). Forum Diskusi Valdai Bersama dengan Habibie Center di Jakarta di akhir 2015 mencatat bahwa ada peningkatan intensitas hubungan yang cukup positif saat ini.

Hal ini bisa dipahami sebagai dua acara, pertama, pola hubungan Rusia dikategorikan sebagai salah satu gagasan untuk mempertahankan citranya sebagai kekuatan geopolitik dan ekonomi sebagai bagian dari bangsa Eropa sekaligus Asia. Rusia yang secara geografis terletak dalam dua benua membuatnya sangat mudah untuk mengarahkan kepentingan-kepentingan internal di Asia Tengah dan Asia Timur.

Kedua, Rusia saat ini banyak menghadapi masalah dalam negeri. Perkembangan paket kebijakan yang tidak terlalu cocok dengan sistem ekonomi liberal, tingginya korupsi dan sentralisasi membuat Rusia harus mengganti kebijakan untuk mengalihkan perhatian penduduk Rusia dari kekacauan domestik (Smith, 2016). Meskipun terdapat banyak rintangan, Rusia

tetaplah 'game changer' di kawasan. Strateginya adalah peningkatan prioritas dalam konektivitas kawasan.

3.1 Kolaborasi Pertahanan dan Keamanan

Kremlin memusatkan perhatiannya dalam rencana ambisius yakni modernisasi kekuatan militer selama lebih dari dua dekade. Revitalisasi aset militer telah dilakukan untuk menggantikan perangkat militer dan pertahanan kuno peninggalan era Soviet. Koldunova & Rangsimalon (*The ASEAN Forum, July 2016*) menyebutkan bahwa kepentingan Rusia sebagai salah satu eksportir senjata terbesar. Rusia adalah salah satu kekuatan militer dunia yang memiliki pandangan politik yang sama dengan negara-negara ASEAN. Perannya di Dewan Keamanan PBB sebagai pendukung bagi kedaulatan demokrasi dengan kebijakan politik luar negeri yang mandiri dan menolak adanya intervensi dalam kebijakan domestik negara lain. Pandangan ini memang tidak terlalu konsisten dengan implementasi di dunia nyata. Pelanggaran dibuktikan dengan invasi Rusia ke Georgia di 2008, intervensi dalam perang sipil di Suriah pada 2013, dan aneksasi Krimea di 2014.

Operasi militer yang dilakukan oleh Rusia dianggap sebagai aksi positif untuk memastikan perdamaian dan kestabilan dalam area yang menjadi sasaran konflik. Rusia berperan sebagai 'penjamin perdamaian' untuk mempertahankan wilayah yang dianggap membutuhkan pengelolaan institusi militer dan pertahanan yang lebih modern. Namun banyak pihak yang menyadari bahwa strategi dan rencana pendanaan Rusia dalam sector ini masih cukup pincang. Krisis finansial global yang terjadi saat ini berkontribusi dengan timpangnya kekuatan militer yang dimiliki.

Putin mengumumkan rencana 10 tahun modernisasi militer Rusia di 2010, Storey (2015). Anggaran pertahanan militer Rusia kini bertambah dua kali lipat, dari \$58,7 miliar menjadi \$84,5 miliar untuk menjadi terbesar ketiga setelah AS dan RRT pada periode 2010 dan 2014. Rusia juga menjadi salah satu eksportir utama senjata di dunia. Sejauh ini mitra utama ekspor senjata Rusia

adalah India (39%) dan RRT (11%). Indonesia sendiri memesan armada pesawat tempur Sukhoi tipe SU-35 untuk memperkuat pertahanan dirgantara di 2019. Rusia juga menawarkan teknologi nuklir bagi Indonesia, Myanmar dan Kamboja. Selain itu Malaysia juga tertarik untuk bekerja sama dalam pengadaan sistem peluru kendali jarak jauh dan pesawat jet. Selain memperluas kehadiran militernya di ASEAN melalui perdagangan senjata, pemerintah Rusia juga berperan meningkatkan kapasitas dan pelatihan SDM melalui pertukaran tenaga ahli (SMEEs) dan pelatihan penanggulangan terorisme, keamanan maritim, Badan Search and Rescue Nasional (BASARNAS) dan kerja sama kemanusiaan.

Rusia melihat kesempatan sebagai anggota dari *ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM) Plus* sebagai penegas statusnya sebagai penjamin perdamaian, ADMM Plus dibentuk oleh anggota ASEAN termasuk Australia, RRT, Jepang, India, RoK, Selandia Baru, Rusia dan AS pada 2010. Tujuan ADMM Plus adalah memperkuat kerja sama pertahanan dan keamanan untuk perdamaian, kestabilan dan pembangunan kawasan

Difersivikasi Energi

Energi adalah salah satu elemen penting dalam menjamin keberlangsungan kawasan. Para ahli migas meyakini bahwa negara anggota ASEAN diperkirakan akan mengalami kekurangan pasokan energi di masa depan. Menipisnya cadangan ini ditunjukkan dengan semakin cepatnya perkembangan industri manufaktur di kawasan. Adanya pasokan yang besar dari minyak bumi, gas dan energi alternatif terbarukan (nuklir, biofuel atau biogas) kelak akan menjadi kebutuhan. Rusia memiliki keunggulan komparatif di sector energi dan gas. Andrew Wood (2013), salah satu peneliti *the Russia and Eurasia Programme di Chatham House* mengatakan bahwa Rusia sangat dibutuhkan dalam sektor migas serta energi terbarukan.

Kebijakan Strategi Energi Rusia 2030 mengklaim bahwa instalasi pembangkit

tenaga nuklir akan menjadi konsumsi utama dan merelokasi kebutuhan gas bumi dalam ekspor global. Rusia mewarisi gaya manajemen Soviet dalam kebijakan energi minyak bumi dan gas sehingga membuat mereka sulit untuk masuk ke dalam pasar baru. Negara-negara Asia Tenggara memiliki beberapa sumber energi yang sebagian besar diimpor dari negara Arab. Perkembangan baru dalam eksplorasi gas telah dilakukan di Indonesia, Malaysia dan Filipina. Di sisi lain, negara maritime di Asia Tenggara selalu melihat energi alternatif lain, yang menawarkan harga lebih murah untuk minyak bumi dan gas bagi konsumsi dalam negeri.

Administrasi Putin menciptakan infrastruktur baru (sistem perkeretaapian, bandara, pelabuhan dan KEK) di Rusia Timur jauh sebagai kunci untuk masuk ke pasar Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kebijakan ini mencakup diversifikasi pasar dengan memperluas investasi di kawasan Siberia serta menambah pasokan gas alam dengan RRT dan Jepang. Rusia sudah lama dikenal dengan inovasi teknologi dan penelitian, yang mampu meningkatkan kerja sama energi di Asia Tenggara. Di Indonesia, Rusia berniat untuk ikut dalam eksplorasi minyak di Tuban dengan menggandeng perusahaan Rosneft. Pada tahun 2025 diproyeksikan kilang ini akan memproduksi BBM dan sebanyak 30-50% dipasok dari Rusia. Kawasan ASEAN dipandang sebagai mitra eksportir penting untuk perkembangan energi minyak bumi dan gas.

People to People Contact

Rusia juga mulai bergerak dalam strategi bisnis yang dulu sangat erat dengan kawasan Eropa menjadi condong ke Timur Jauh. Kremlin berusaha untuk mendiversifikasikan pasar domestik melalui penyediaan barang dan jasa ke RRT, Jepang dan ASEAN. Meskipun masih kecil, Rusia telah memiliki hubungan dagang yang baik dengan Asia Tenggara. Pasar ASEAN saat ini masih terbuka dan menarik bagi para investor tetapi Rusia hanya berkontribusi 1% dalam total perdagangan ASEAN (Sumsy dan

Kanaev, 2014). Salah satu penyebab utama terletak pada masih minimnya diaspora sumber daya manusia dan representasi bisnis Rusia di kawasan. Tidak seperti AS, Jepang atau Korea Selatan, kurangnya kapasitas bisnis untuk masuk ke dalam pasar regional hanya bisa dilakukan melalui korporasi multinasional hingga transnasional. Keanggotaan Rusia sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) bisa meningkatkan daya tawar meskipun terikat dalam peraturan WTO.

Kopi dan produk minyak sawit asli Indonesia saat ini menjadi salah satu primadona di bumi Rusia. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Moskow pada 2018 mencatat, hubungan antara ASEAN dengan Rusia dalam titik puncak. Ini terlihat dari total nilai perdagangan yang mencapai USD19 miliar atau setara Rp267 triliun pada 2018.

Di sektor pariwisata, sebagian besar generasi muda Rusia sekarang mempertimbangkan kawasan Asia Tenggara sebagai tujuan wisata. Yang tak kalah menarik yakni sektor pendidikan, generasi muda dari Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam semakin berminat mencari peluang beasiswa di Rusia. Sebagai catatan, pada era Presiden Sukarno, jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di tingkat perguruan tinggi di Rusia mencapai 4000-5000 orang. Dalam hal studi tentang bahasa dan budaya Rusia, Putin telah membuka Russkiy Mir Foundation (Yayasan Dunia Rusia) untuk mempromosikan cara hidup orang Rusia. Di level ASEAN, ASEAN Center (Pusat ASEAN) didirikan pada Universitas MGIMO. Misinya untuk menyebarkan informasi tentang kemitraan dialog ASEAN-Rusia dan memfasilitasi pengembangan hubungan ekonomi, pertukaran budaya, ilmiah dan pendidikan serta kontak antara generasi muda Rusia dengan generasi muda negara-negara anggota ASEAN. Pusat ini juga melaksanakan dan mendukung penelitian akademisi tentang masalah-masalah ASEAN dan perkembangan masing-masing.

Perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan saat ini lebih dari 600 mahasiswa Indonesia menuntut ilmu di negeri beruang merah hingga 2020. Data dari Perhimpunan Pelajar Indonesia di Rusia (PERMIRA), sebagian besar mahasiswa asal Indonesia melanjutkan studi di bidang master pada bidang teknik, ilmu alam, kedokteran dan sosial humaniora. Negara-negara ASEAN lain seperti Malaysia, Myanmar dan Thailand sendiri mengirimkan ribuan mahasiswa tiap tahun ke berbagai kota di Rusia. Fokus studi yang mereka tempuh antara lain kedokteran dan teknik.

Semua negara anggota ASEAN dengan Australia, Cina, Jepang, Selandia Baru, dan Korea Selatan saat ini sedang mengembangkan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). RCEP menjalin kerja sama di bidang perdagangan barang dan jasa, kerja sama ekonomi dan hal teknis lainnya. Perjanjian ini dilakukan untuk penetrasi pasar yang jauh lebih besar. Rusia harus memikirkan kembali untuk kemitraan yang lebih besar di bidang ekonomi. RCEP dianggap sebagai alternatif dari *Trans Pacific Partnership* (TPP) yang menjadi ancaman potensial bagi Rusia. Negara-negara ASEAN lebih tertarik pada manfaat yang dapat mereka peroleh dengan TPP daripada dengan EAEU. Pada bagian terakhir, makalah ini menyoroti rekomendasi dalam memenuhi tujuan dan akhirnya menyajikan prospek untuk hubungan Rusia dan Asia Tenggara.

Rekomendasi

Untuk mencapai target dalam proyeksi masa depan hubungan Rusia di Asia Tenggara dan khususnya Indonesia. Penulis merekomendasikan tiga kemungkinan tentang bagaimana meningkatkan hubungan ekonomi bilateral dan kerja sama internasionalnya di ASEAN.

Pertama, Rusia perlu mereformasi kebijakan dalam negeri dalam bentuk efisiensi birokrasi. Good governance & penegakan hukum harus diimplementasikan sebelum terlibat dalam hubungan komprehensif dengan negara-negara Asia Tenggara. Setelah runtuhnya Uni Soviet,

masyarakat Rusia dihadapkan dengan kekosongan kekuasaan institusional yang dahulu dikendalikan di tingkat pusat (sentralisasi) menjadi desentralisasi. Transisi inilah yang disebut paska-Soviet. Sistem demokratis yang dinahkodai Mikhael Gorbachev dan Boris Yeltsin di periode awal terbukti gagal diimplementasikan di Rusia. Momen ini sering digambarkan sebagai kegagalan demokrasi premature. Di mata dunia Barat, Rusia dianggap masih jauh dalam hal kebebasan media dan pemerintahan demokratis. Putin juga dicap gagal dalam beberapa hal terutama dalam menangkap aspirasi dan menanggapi keluhan warga negara dalam menyediakan pelayanan dasar seperti pendidikan, pekerjaan dan jaminan sosial. Ekonomi Rusia yang melemah karena sanksi embargo yang dijatuhkan Uni Eropa akan mengakibatkan resesi ekonomi jika tidak diatur dengan benar. Ada urgensi untuk membangun kembali citra Rusia yang tercemar di mata dunia, khususnya opini Barat. Untuk itu ada beberapa hal yang bisa direkomendasikan untuk memikirkan kembali kebijakan dalam dan luar negeri Rusia yang merakyat.

Kedua, Rusia perlu menawarkan produk dan layanan yang beragam ke negara-negara Asia Tenggara. Jika ingin menarik investor ke tren ekonomi positif, Rusia harus mengalokasikan lebih banyak sumber daya dalam membangun infrastruktur di kawasan Rusia Timur Jauh. Perlu dibangun lebih banyak infrastruktur, transportasi dan hubungan komunikasi, dan menetapkan langkah-langkah pengaturan untuk memberantas korupsi, sehingga mengurangi biaya transaksi dan pungutan lainnya. Pengaturan ulang, efisiensi dan birokrasi good governance harus diprioritaskan saat ini melalui rute EAEU dan ASEAN. Dalam hal mengupayakan bentuk perjanjian perdagangan, Rusia telah bergabung dengan WTO sebagai anggota resmi di 2012. Rusia dapat menggunakan keanggotaannya untuk memproyeksikan bahwa mereka mematuhi aturan dan prosedur dalam skema perdagangan yang adil. Untuk menyeimbangkan, Rusia perlu juga

meningkatkan Dewan Bisnis Rusia-ASEAN saat ini yang akan mendorong kerja sama ekonomi, mempromosikan kegiatan investasi, menciptakan kesadaran sosial-budaya, dan bertukar alih teknologi inovasi.

Ketiga, Rusia perlu mematuhi hukum internasional dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Mereka harus memelihara dan menjaga perdamaian serta stabilitas melalui posisi politiknya saat ini. Forum seperti ARF, EAS, EAEU dan SCO bisa menjadi jalan bagi Rusia untuk membahas dan merekomendasikan penyelesaian sengketa kawasan secara damai. Dalam sengketa SCS, jika ingin mendapatkan persetujuan dari negara-negara Asia Tenggara dan mereka harus bersikap tegas sebagai penggaransi perdamaian. Dialog konstan dalam bentuk konstruktif melalui skema bilateral dan multilateral harus dilakukan tentang masalah ini.

Di sisi lain, Rusia juga perlu mempertahankan hubungan positif dengan RRT. Menyinggung relasi Putin dengan Presiden Xi Jinping, sangat jelas bahwa Rusia menggunakan pendekatan yang pragmatis dalam keterlibatannya dengan ASEAN baik dalam masalah politik, ekonomi, hingga sosial budaya. Adapun beberapa kendala bagi Rusia untuk memenuhi targetnya di masa depan termasuk kestabilan politik domestik, pertumbuhan ekonomi, proses ekspansi ke Timur Jauh dan pemeliharaan citra globalnya. Hal ini masih diperjuangkan di tengah meningkatnya ketegangan di ASEAN dalam perselisihan SCS yang semuanya ini dianggap sebagai tantangan bagi Pemerintah Putin. Jika Rusia ingin memproyeksikan citra sebagai hegemon global yang kuat dan efektif, Rusia harus mempertimbangkan tiga bidang kerja sama yaitu kolaborasi keamanan dan pertahanan; diversifikasi pengembangan energi; dan pola perdagangan *business to business* (B2B) dalam *people to people contact*.

Kesimpulan

Jika berhasil dalam menyatukan potongan-potongan puzzle ini, tidak mustahil

akan memperbesar peluang Rusia dalam menarik perhatian khalayak pada kerja sama ekonomi dan investasi bisnis di ASEAN. Pemerintah Rusia harus berinvestasi dalam banyak ketiga sektor tersebut agar kembali menginjakkan kakinya di kawasan Asia Tenggara.

Dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-Rusia yang genap berumur 70 tahun pada 2020, ada banyak hal yang bisa dikolaborasikan. Baik Jakarta dan Moskow memiliki banyak posisi yang sama dalam menyikapi isu-isu internasional dan regional, termasuk tantangan global. Potensi dan peluang kerja sama di sektor ekonomi, perdagangan, investasi, energi, pariwisata, iptek, pendidikan, sosial budaya, keamanan dan teknik militer adalah kunci.

Di sisi investasi, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi Rusia di ASEAN. Contohnya, investasi pembangunan kilang minyak senilai USD 16 miliar di

Tuban. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi Rusia ke Indonesia pada periode Januari-September 2019 naik 10 kali lipat sebesar USD 17,29 juta dari USD 1,7 juta pada periode yang sama pada 2018. Angka yang besar namun belum maksimal dari potensi sebenarnya.

Momentum 70 tahun bisa menjadi salah satu pendorong utama dalam memperluas agenda pembangunan ekonomi dan politik di wilayah tersebut. Pemerintah Rusia sejauh ini memang belum mempertimbangkan ASEAN dan khususnya Indonesia sebagai salah satu pemimpin utama di kawasan Asia Tenggara dalam mengembangkan strategi geopolitik dan geoekonominya. Rusia harus mengimplementasikan perencanaan ulang kebijakan yang ambisius di ASEAN jika ingin mengamankan posisinya di arena global.

References

- Chuffrin, G., Hong, M., & Beng, K.B. (2006). *ASEAN-Russia relations*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. <https://doi.org/10.1355/9789812306425>
- Dave, B. (2016, May 17). WP297: *Russia's Asia pivot: Engaging the Russian Far East, China and Southeast Asia*. Retrieved from <https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/wp297/>
- Degterev, D. A., Li, Y., Trusova, A. A., & Chernyaev, M. S. (2018). Priorities of Russian and Chinese development cooperation to Asia and Africa: A comparative analysis. *Vestnik RUDN. International Relations*, 18(4), 888—905. <https://doi.org/10.22363/2313-0660-2018-18-4-888-905>
- Koldunova, E. (2016). Can Russia be a leader in East Asian economic integration?, *East Asia Forum Economics, Politics and Public Policy in East Asia and the Pacific*. Retrieved from <http://www.eastasiaforum.org/2016/08/17/can-russia-be-a-leader-in-east-asian-economic-integration/>
- Kozyrev, V. (2016). Russia-Southeast Asia relations: In China's shadow? *The ASAN Forum Open Forum*. Retrieved from <http://www.theasanforum.org/russia-southeast-asia-relations-in-chinas-shadow-2>
- Larionova, M. V., & Safonkina, E. A. (2018). The first five decades of cooperation for development. Actors, achievements and challenges. *International Organizations Research Journal*, 13(4), 96—121. DOI: 10.17323/1996-7845-2018-04-05
- Lavrov, S. (2010). Russia and ASEAN can achieve a great deal together. *International Affairs*. Retrieved from <https://interaffairs.ru/i/pdfasean/2.pdf>
- Lebang, T. (2010). *Sahabat lama era baru: 60 tahun pasang surut hubungan Indonesia-Rusia*. Jakarta, Indonesia: Kompas Gramedia.
- Mankoff, J. (2009). *Russian foreign policy: Return of great power politics*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Maslikhina V.Y. (2016). Special economic zones in Russia: Results evaluation and development prospects. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(1), 275—279
- Ministry for the Development of the Russian Far East (MDFE). (2020). *Government of the Russian Federation*. Retrieved from <http://government.ru/en/department/239/events/>
- Petrovsky, V. (2014). *Vladimir Putin in Shanghai: Russia is turning East*. Valdai Discussion Club, 23 May. Retrieved from http://valdaiclub.com/opinion/highlights/vladimir_putin_in_shanghai_russia_is_turning_east
- Press TV. (20 May 2016). *Russian trade with ASEAN expanding*. Retrieved from <http://www.presstv.ir/Detail/2016/05/20/466592/Russian-trade-with-ASEAN-expanding>
- Puzanova, O. (2016, August 12). Country report: Russia (July 2016). *TheAsanForum*. Retrieved February 27, 2020, from <http://www.theasanforum.org/country-report-russia-july-2016/>
- Puzanova, O. (2016, May 30). Country report: Russia (May 2016). *TheAsanForum*. Retrieved February 27, 2020, from <http://www.theasanforum.org/country-report-russia-may-2016/>
- Roth, A. (2015). Russian Premier says annexation of Crimea was worth sanctions fallout. *The New York Times*. Retrieved from <https://www.nytimes.com/2015/04/22/world/europe/crimea-russia-sanctions-medvedev.html>
- Russia and Burma discuss 'Favourable Conditions' for nuclear technology. (2015). *Democratic Voice of Burma*, 14 April 2015.

- Russia Indonesia Partnership to Build Future of Indonesian Nuclear Sector. (2015, October 7). *Jakarta Globe*, in Ian Storey, What Russia's 'Turn to the East' Means for Southeast Asia, *Yusof Ishak Institute*, 67
- Russian News Agency. (2016). *Russian Pacific fleet ships to join ADMM-Plus-2016 International naval exercise*. Retrieved from <http://tass.ru/en/defense/873724>
- Smith, S. (2016, January 6). *Russia's biggest challenges for 2016 are domestic*. Retrieved from http://www.realclearworld.com/articles/2016/01/06/russias_biggest_challenges_for_2016_are_domestic_111645.html
- Storey, I. (2015). What Russia's 'Turn to the East' means for Southeast Asia. *SIPRI Military Expenditure Database*. Yusof Ishak Institute, 67(3). Retrieved from http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database
- Sumsky, V., & Evgeny K. (2014). Russia's progress in Southeast Asia: Modest but steady. *Russian Analytical Digest* No. 145.
- Supriyadi W. M. (2020). *Merayakan 70 tahun hubungan Indonesia-Rusia*, Retrieved from <https://news.detik.com/kolom/d-4884052/merayakan-70-tahun-hubungan-diplomatik-indonesia-rusia>
- Wood, A. (2013). *How the Soviet inheritance holds back Russia's development*. Chatham House. Retrieved from www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Russia%20and%20Eurasia/0713pp_wood.pdf
- Zubacheva, K. (2015). Being a member of the WTO may not be that easy for Russia. *Russia Direct*. Retrieved from <http://www.russia-direct.org/analysis/being-member-wto-may-not-be-easy-russia>

THE SOCIAL CONSTRUCTION OF US NAVAL CAPABILITY IN HOLLYWOOD FILMS

Daniel Anugerah Widjaja
Universitas Pelita Harapan, Tangerang
e-mail: daniel.anugerah05@gmail.com

ABSTRAK

Tersebar di seluruh dunia dan memiliki mobilitas yang sangat tinggi, Angkatan Laut AS adalah salah satu instrumen militer utama yang digunakan untuk mencerminkan kekuatan Amerika Serikat. Karya film Hollywood merupakan salah satu titik unggul kekuasaan lunak (*softpower*) budaya Amerika Serikat. Angkatan Laut AS banyak tampil dalam karya film Hollywood dari awal produksi perfilman tersebut. Namun, tidak banyak literatur akademik yang menelaah karya film tersebut sebagai sarana konstruksi sosial mengenai citra yang menyangkut Angkatan Laut AS. Penelitian ini menggunakan ilmu sosial interpretatif dan konstruktivisme untuk mengeksplorasi tema-tema yang ada dalam film-film ber-*genre* angkatan laut. Karya tulis ini juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa karya-karya tersebut mendukung pencitraan Angkatan Laut AS sebagai kesatuan yang sangat kompeten dan gesit dalam menjalankan tugas dengan nilai moral. Pada akhirnya, penelitian ini berusaha menunjukkan efek konstitutif bagi penonton dari film-film tersebut, dan bagaimana hal ini dapat menunjang pencitraan antar-subyektif antara Angkatan Laut dan penonton.

Kata Kunci: Konstruktivisme, Kekuatan, Angkatan Laut AS

ABSTRACT

The US Navy has become of the primary arms of US power projection, deployed worldwide and possessing high mobility. On the other hand, Hollywood cinema has been one of the hallmarks of US cultural soft power. During the time that Hollywood cinema has existed, the US Navy has appeared multiple times within the film art form. However, almost no literature exists that seek to examine these films are vessels for the social construction of ideas around the US Navy. This research uses interpretive social science and constructivism to explore the themes contained within naval films. It argues that these films help construct an image of a mobile and highly competent navy serving a righteous cause. It also argues the constitutive effects the film has on its audience.

Keywords: Constructivism, Soft Power, US Navy

Background

When talking about the reach and influence of the United States as that of a great power, one cannot understate the important role that its military plays. Of the five branches of the US Armed Forces, the Navy plays a role like no other in providing the incredible capacity to attack and defend in multiple theatres throughout the world. The Pacific Battles of World War 2 proved the Navy's ability to project the US' strength some 7000 miles from its homeland; an advantage post-war US pressed as competition with the USSR began. " (Bradford, 2016, p. 260-261). As of 2019, it boasts a force of 289 warships

deployed worldwide and field ten carrier groups in the world's three major oceans (U.S. Department of Navy, 2019).

Against this backdrop of the US Navy's role in US Foreign Policy, Hollywood has created many stories. These stories range from horror to romance to action and intrigue. These stories whether meaning to or by coincidence propagate different ideas that shape public opinion of America and the US Navy. The images from the movies construct the ideas of the powerful capabilities of the United States. The importance of these themes lies within the concepts of identity and ideas that predicate the actions of states and societies. Alexander Wendt stresses these precepts in his Social

Theory of International relations: laying the foundation for constructivism's examination of idea-creation through social interaction (Wendt, 1999).

To analyse the themes and ideas found in portrayal of US Naval capabilities and propose the construction that occurs therein this research asks: (i) How are the US Navy's capabilities portrayed in Hollywood Cinema? (ii) In what ways, does Hollywood Cinema construct the US identity as a superpower and ideas of powerful naval capabilities?

Literature Review

The 20th Century demonstrated that the use of Seapower and Great Power status goes hand-in-hand. Colin S. Gray offers that into the 20th Century, US Seapower lends it the ability to be mobile, while its addition of sea-based air power also allows great navies to penetrate targets in-land (Gray, 1994). Once in this position of primacy, Stephen M Walt pointed out how the US strived to provide security for its allies and the liberal world order (Walt 2002). This commitment to protect its allies and interests globally translates to the choices made in its defense acquisition; Robert C. Rubel points to the F35 and LCS programs as shift to include policing as well as war-fighting scenarios (Rubel, 2016).

As this paper engages with ideas of Pop-Culture it must also examine the trends that exists in media, Michelle C. Pautz and Megan K. Warnement handily points out the positive depiction of the US Armed forces in American Cinema vis-à-vis other federal organizations unfavourable (Pautz, 2013).

Yet, examinations into the how the idea of military power constructed and what exactly gives military equipment its weight is a relatively unexplored field of international relations research. Of the few examinations, Robert R. Ross inspects how advancing naval capability is as much tied to nationalist narratives as it is to national security (Ross, 2018). Joelien Pretorius on the other hand, analyses how the language of national security is used to create and

reinforce the identity of its users (Pretorius, 2008).

Constructivism

Understanding the impact that cultural artefacts such as movies have upon the world of international relations lends much to the IR school of constructivism. The schools of thought in Constructivism pursues not only knowledge in IR but also how that knowledge came to be. In the words of Emanuel Adler, "constructivism is a social theory about the role of knowledge and knowledgeable agents in the constitution of social reality" (Adler, 2015, p. 114).

This theory of international relations assumes knowledge is socially created and communicated constantly. It establishes that beneath the material objects that populate the world is ideas that dictate how actors view those objects—as opposed to realists who take material objects at their face value. The way in which humans view and think of object matters as much as the objects themselves, "constructivists hold that normative or ideational structures are just as important as material structures" (Reus-Smit, 2016, p. 196). It is these ideas that sublimates into the motivations and behaviour of state and non-state actors, as the way they view the world affects their actions. Moreover, constructivism iterates the importance of studying the ways in which these ideas are created and then communicated:

How agents perceive the world is important in explaining their actions, and they always have an element of choice in defining their identities and interests. However, in addition to idealism, a key feature of constructivism is holism or structuralism, the view that social structures have effects that cannot be reduced to agents and their interactions. Among these effects is the shaping of identities and interests, which are conditioned by discursive formations--by the distribution of ideas in the system--as well as by material forces, and as such are not formed in a vacuum. (Wendt, 199, p. 137)

By studying the process by which ideas are formed and communicated, it allows for a better understanding of identities: ideas that actors hold regarding themselves. These identities can in turn act as a guide for normative behaviour: what is acceptable or unacceptable for an actor to do. Deeper still, when these ideas work in tandem with actor ideas about other actors, these patterns of behaviour over time reinforce the ideas that they are born from. These cycles of idea creation and reinforcement is what Alexander Wendt calls cultures and can come to define entire eras of International Relations (Wendt, 1999).

Soft and Smart Power

Having established the importance of constructivist ideas of identity, ideas, and culture; Nye's idea of Soft power, and Smart Power are important to laying the groundwork for this research. Nye highlights the distinction between Hard and Soft power as the effect or push and pull: "soft power is the ability to affect others through the co-optive means of framing the agenda, persuading, and eliciting positive attraction in order to obtain preferred outcomes" (Nye, 2011, p. 20). The same resources that a state uses to coerce (Hard Power) can also be used to co-opt (soft power). The distinction often lies not with the resources used, but recipients' perception.

There should first be a distinction between Culture as stated by Constructivist Alexander Wendt which refers to normative behaviour of international actors. Culture as stated by Joseph Nye in his 2004 book refers to works of creations of art, music, or Popular Culture produced by a certain nation or population (Nye, 2004). He cites examples of books, music, and movies that can carry political messages across the border, and even into countries who consider themselves opposed to the United States.

Finally, Nye reiterates that a 'smart' state would be one that employs the right balance of Hard and Soft power. His train of thought is that the constant use of coercive power will not always work, and that Hard power has its limits. Nye posits that this is the

type of balance that the United States needs to strike as a world power (Nye, 2011).

New Public Diplomacy

New Public Diplomacy as iterated by Jan Melissen, expands its assumptions to include non-state actors in the efforts of diplomacy, "it does not see public diplomacy, or indeed diplomacy in general, as a uniquely stately activity, even though it stresses the practice of states" (Melissen, 2005, p. 12). It expands to include and study NGOs organisations, but also proponents of arts, music, movies, and other aspects of pop-culture in its ability to delivery of information (Schneider, 2005)

New Public diplomacy also views the distinction between information intended for domestic audience and that intended for the foreign public to be less relevant in a freer communication age (Melissen, 2005). A state's ability to compartmentalize or keep consistent is less and less relevant in the age of an internet that connects the publics of different states so easily.

Great Powers

While statistical data has played a large part in determining and justifying the great power status in the study of international relations, this research relies on a constructivist approach to the concept of great powers and its hegemonic practices. Going back to the constructivist concept of international relations as the creation and interaction of ideas, great powers can be boiled down to the interaction of one state and another based on a common idea of 'power'. Constructivism deals more with states' "behaviour and identity of material inequality in two international systems, one in which material dominance is recognized by subordinate states as constituting certain rights and responsibilities on the part of dominant states, and one in which it is not" (Wendt, 1999, p. 176). This paper approaches the process of idea construction and dissemination through the interpretive methods using based upon theory of Constructivism.) The focus of the analysis is the communication and social interaction

around these films. The focus of the study is not the causal impact of the films, but constitutive nature of the films. Data is collected through secondary sources of books, journals, government statements, and the movies themselves. Data from the US Navy and the US Department of Defense serves both to paint the current condition of the US Navy as well as to shed light to the role they played in the creation of the naval films. The contents of these films were analysed to highlight any recurring themes that appears throughout the different films as well as corresponding to the state of the US Navy.

This research first explained the movies, describing the films' characters, setting, and plot to give a clear image of the narrative conveyed therein. Each description was followed by a brief exploration of the narratives conveyed by the film. Then the research will list all of the main recurring themes found across all of the films. Finally, the research explains the connection between the US Navy and the themes of the film and how the communication of ideas take place. The theory and discussions brought by books and other international relations literature serves to justify the connection between the themes and the US Navy.

The NAVY Mission

As of 2018 Chief of Naval Operations Adm. John Richardson states the Navy's mission as the following:

"The United States Navy will be ready to conduct prompt and sustained combat incident to operations at sea. Our Navy will protect America from attack, promote American prosperity, and preserve America's strategic influence. U.S. naval operations—from the seafloor to space, from the blue water to the littorals, and in the information domain—will deter aggression and enable resolution of crises on terms acceptable to the United States and our allies and partners. If deterrence fails, the Navy will conduct decisive combat operations to defeat any enemy." (Richardson, 2016, p. 1)

It executes this mission with a fleet numbering 289 ships with 91 being deployed

at any single moment. This fleet is made of the Aircraft Carriers, Amphibious Assault Ships, Cruisers, Destroyers, Littoral Combat Ships, and Submarines (US Navy, 2019). Serving in the Navy are 49,897 Personnel and 40,900 Marines in a broad range of roles including command, combat, intelligence, logistics, and so on. History is rife with the actions of the US Navy from its crucial role in World War 2, Korean War, Vietnam War, and the War on Terror.

In the current day, the Navy views its task to defend American interest and their area of operations encompasses the globe (Richardson, 2016). The way the US assesses opportunities and threats around the globe, implies both its wide reach and its willingness to operate around the world.

Films Portraying the US Navy

Each film selected for this paper involves the US Navy as a crucial part of the plot. All the films involve Navy personnel as characters, and their actions help advance the plot. In all the films, the Navy plays an important role in solving a crisis. Each of these films were also made with the assistance of the US Navy in some form or another.

The other metric used to filter out movies used in this research, was the worldwide earning of the films. The five films were selected based on being top earning films in their era. For the purposes of this research films that depicted the US Navy previous of the second world war were also disqualified. As discussed in previous section, the US Navy did not come into prominence until the end of the second world war which saw both higher US ship production and the waning of the British Royal Navy.

It should be noted that even the measurement of the films income still cannot fully explain the reach and effect these films have on the general public. As this paper will argue later, the focus of this research is in the themes found in the films and the image the constructed. The goal of this research is to explore how the constitutive impact of the

film not necessarily to measure its causal impact on the world.

Lifted from a Tom Clancy Novel of the same name, this *The Hunt for Red October* follows the character of Jack Ryan, a CIA analyst and former-Marine Corps officer who facilitates the defection of Capt. Marko Ramius, the captain of Soviet Ballistic Missile Submarine. The movie follows a cat-and-mouse chase between the US and Soviet Subs as both fleets race to catch the defecting submarine, and ends with the successful defection of Ramius and his officers.

The film *Crimson Tide* follows Lt. Cmdr. Ron Hunter and the crew of the USS Alabama, a Ohio-Class Ballistic Missile Submarine during a nuclear standoff. When malfunction leaves the Alabama unable to receive orders, the crew must decide between launching their nuclear missiles or withholding fire.

Unlike the rest of the movies in this paper, *Captain Phillips* is an account of the real-life 2009 Maersk Alabama hijacking. The film follows the hijacking and Phillips' subsequent hostage situation, and his eventual rescue by Navy SEALs aboard the USS Bainbridge.

In *Battleship*, the primary plot centers around the Lt. Alex Hopper and the crew of the USS John Paul Jones during an alien invasion of the island of Hawaii. Hopper and his is cut off from the main fleet and must repel the invasion against the more advanced aliens. After multiple battles, they successfully defeat the aliens in a standoff using the world war 2 era battleship the USS Missouri.

Top Gun follows the journey of Pete "Maverick" Mitchell, who is a candidate at the Naval Fighter Weapons School also known as TOPGUN. Throughout the course of his training Maverick learns not only to be a good pilot but to work as a team. Films ends with Maverick successfully saving his wingman from a squadron of Soviet jets.

Films Themes

Mobility

In the realm of IR, one of the indicators of great power ability is the ability to deploy its military with great speed and scope. Beyond the realm of IR scholarship however, Mobility can be perceived by the general public as not just being able to deploy anywhere quickly, but due the lack of knowledge they have regarding the strategy and processes leading up to deployment, they may believe that the US is simply 'everywhere'. Films can display the mobility of the US Navy in both explicit and implicit ways. Whether the films describe the Navy's mobility in implicit or explicit ways, they subtly present the idea of viewing the worlds as one single area of operations. These subtly share the same view point the US' National Defense Strategy and Design for Maritime Superiority has; one in which the Navy's mission allows it to operate anywhere on the international stage. (Department of Defense, 2018) (Richardson, 2016)

Mobility can be explicitly conveyed simply by the display of the Navy forces in various locations around the globe. Some films show the Navy as being already deployed in critical locations. *Captain Phillips* show the USS Bainbridge as already being on anti-piracy patrols in the region, needing only to travel 150 nautical miles to assist the hostage situation. *The Hunt for Red October* on the other hand shows the USS Dallas doing patrols near the Russian Naval base in Polyarny, thanks to this Jack Ryan is able receive the crucial information needed to track down the submarine. Once Ryan has the intelligence and formulated a plan, he is able to get across the Atlantic with the help of the Navy's fleet of carriers, planes, and helicopters. In the climax of *Topgun*, Maverick and his squadron of pilots must deploy from their base in Miramar California to a crisis in Indian Ocean; they are shown as being able to arrive on the scene as handle the situation within 24 hours. Mirroring this, the Navy SEALs in *Captain Phillips* are also shown as being capable of travelling from the Naval Air Station in Virginia to Somali waters in 24 hours. Without this extensive and global network of

ships, the protagonists of these films would not be able to get to their respective points of conflict.

The second aspect contained within these films that convey a sense of mobility, is delivered through a more subtle technique. In addition to having its ships and personnel deployed world-wide, Cinema can make this sentiment even more potent through use of time. Filmmakers often use editing techniques to cut around events and time that would weaken the narrative of the film. At the same time, the audience have gotten used to this form of lean story-telling that cuts around the 'mundane' every day. In the films mentioned in this research, different methods are used but the effect is the same: time is not a linear portray of events as they happen minute by minute. Instead, they follow the rise and fall of narrative tension.

This treatment of time allows the US Navy to be depicted as forces that are able to get to where they are needed just in time. Often this is explicitly conveyed via dialogue that mentions a need for haste or timestamp displaying the passage of time. Equally as effective however, are the implicit ways that the editors cut the film to circumvent the passage of time. This technique can be subtle to the point where the audience do not realise the cutting of time, all they know is that the characters, i.e. the Navy, arrives on the scene just as they are needed.

Captain Phillips uses both editing techniques and the narrative of the story, so as to depict the USS Bainbridge arriving just as the pirates begin to distrust Phillips and threaten his life. Similarly, the arrival of the Navy SEALs happens just as tension between Phillips and the Pirates arrive again. The SEALs are able to enter the negotiation and deescalate the threat to Phillips life. In Battleship, Hopper is able to revive the USS Missouri and get under way within the span of several minutes, arriving just in time to destroy the alien's communication array and save the planet. It shows the process of decommissioning the WWII-era battleship in short montage that lasts only several

minutes, allowing them to arrive on scene just in time. Following the climax of the film, Navy fighter aircraft are able to arrive and finish off the aliens just as the USS Missouri is about to be destroyed. The Hunt for Red October does away with this montage technique, instead interspersing scenes of Jack Ryan traveling across the Atlantic with the scenes of other characters. It creates the illusion that Ryan and the Navy is a swift force, by cutting out the process by which he travels and only showing him arriving on the scene just in time. It should be noted that the Crimson Tide is an exception to this point, it portrays the USS Alabama traveling over a period of two-weeks from its station in Bangor, Washington to its area of operations off the Kamchatka peninsula.

Competence

It seems superfluous to say that a military force needs to be competent at its job. However, instilling in the audience that the US Navy excels at the tasks it faces serves an important task of public diplomacy. No public wants a military force to be deployed around the world if it does not know how to do its job. Moreover, the display of the competence of the US Navy can leave a good impression on the audience, especially those who are far removed from the actual implementation of force.

Competence can manifest in different forms in cinema. One aspect of that is technical competence, this can be defined as the Navy's expert use of various powerful and high-tech equipment. The other is relational competence: this is the amount of discipline and professionalism with which Navy personnel treat each other and officers in the chain of command.

Professionalism and discipline often take centre stage in the depiction of Navy Personnel. In The Hunt for Red October, Crimson Tide, and Captain Phillips, Navy Personnel are depicted in clean and neat garb, speak in clear and succinct terms, as well as having a respect for the chain of command. Orders carried out within a ship

are quickly understood and then followed to. *Crimson Tide* problematizes some aspects of this, by placing the officers of the *Alabama* in a morally ambiguous situation. Yet, it also highlights that the actions Cmdr. Hunter as being in accordance with Navy Regulation. His actions are to thank for avoiding nuclear war at the climax of the film, showing that the system of regulations and chain of command the Navy has in place is capable of triumphing over the flaws of rogue individuals. Films like *Topgun* and *Battleship*, approach the idea of professionalism and discipline in a different manner. Both present a main protagonist that exhibits high skill yet is reckless and undisciplined. The films then present the Navy and situations encountered therein as the crucible by which the characters are made into responsible and disciplined individuals. Hopper in *Battleship* learn to respect the opinions of his peers and lead by being selfless and courageous in the face of danger. In *Topgun*, Maverick learns to prioritise the needs of his wingmen above his own goals through his experience in training and by the guidance of CDR. Metcalf, the head instructor of *Topgun*. These movies communicate that the Navy is a professional and disciplined organization, is also capable of instilling those virtues in others.

Secondly, competence is communicated by the Navy's deft use and clear understanding of their equipment. The most obvious examples of this is that all these movies have a 'happy' ending: in which the Navy is able to accomplish the goals it has set out to do. Less obviously, these films also show the Navy use a wide variety of vehicles and weapons systems effectively. The most impressive example is the depiction of the SEALs assault using 3 simultaneous sniper shots to save the life of Captain Phillips. Meanwhile, *Battleship* shows off the wide range of ships the US Navy brings to the RIMPAC exercises, as well as the technical capability of the veterans in being able to revive and fight with the *USS Missouri*. In the *Hunt for Red October*, the Sonar Operator of *USS Dallas* is able to discern the

class of the *Red October*. He also able to deduce the direction of the *Red October* using the few clues he has obtained--without this, Ryan may not have been able to find and facilitate the defection of the *Red October*. The entire premise of *Topgun* built upon the Navy's own Strike Fighter Tactics Instructor program, which selects pilots from the frontline to train. The film establishes that *Topgun* selects the best navy pilots and trains them further. The main protagonist Maverick, demonstrates this early on as being one of the few pilots of have a close encounter with a Soviet MiG. Moreover, at the climax of the film, Maverick proves himself by tipping the balance of the dogfight and repelling a squadron of five MiGs.

Righteousness

The final important element of the image that is being created regarding the Navy is the righteousness of the force. It cannot be understated how important it is for the audience to understand that the Navy forces is a force for good. That it seeks to defend civilian and it fights 'evil', whether it comes in the form of a malignant rival power, or a rogue element. The Navy must not only be a dominant force in the oceans, but a force that benevolently defends the right of all nations to use the oceans.

Setting the impression of righteousness for the audience is not a simple matter of who is the 'good guy' and who is the 'bad guy'. Movies must convince the audience of the 'morality' of the characters. They must display not only the propensity for using military force, but also restraint in using that force until diplomacy and negotiation has failed and such force is indeed justified. This righteousness can also be portrayed in the way Navy personnel treats civilians and surrendered enemy combatants. Such depictions usually show that the Navy have respect for due process and human rights. These movies tend to distance itself from the cases of torture, civilian casualties, and other human rights violations. Relating to previous

section on professionalism of the Navy; they also portray the equal treatment of personnel, regardless of age, gender, or race.

This is apparent most in Captain Phillips, where the US Navy's forces serve multiple roles in the rescue of Captain Phillips. The film highlights the role of the Captain of the USS Bainbridge, the first ship to catch up with the Captain Phillips and begin to negotiate for Phillips' release. The Navy displays both concern for the safety of Captain Phillips, as well as restraint in the face of a crisis. Captain Phillips shows the more diplomatic side of Navy Personnel, with violence being displayed mostly by the pirates in the film. The Navy does not use military force until the very end of the movie, where the life of Captain Phillips is in imminent danger.

In The Hunt for Red October, Navy Officers are often thoughtful, deliberating men who take the advice of their subordinates in order to make the best decisions possible. In this film, whose plot revolves around intelligence and counter-intelligence, the character of Captain Mancuso carefully considers the intelligence provided to him by his crew. He empowers his crew instead of domineering over them. He also carefully negotiates with the Capt. Ramius as he intends to defect from the Soviet Union--choosing to think the best of this adversary instead of the worst. In a conversation with Ramius, the XO of the Red October talks about the freedoms he would be afforded by living in the US, citing it as one of the reasons for defecting.

In Crimson Tide, the film does a very sombre take on the use of nuclear weapons, great power rivalry, and Mutually Assured Destruction. The fate of the world depend on the crew of the USS Alabama, as they must choose whether or not to launch a nuclear strike on Russia. The character of Cmdr. Hunter, shows not only a deft hand at command but also the ability to reason and--once again--show restraint from the use of force. His actions not only save the lives of his ship mates, but also prevent the US from mistakenly causing nuclear holocaust. His

character, through both dialogue and action, show a deep respect and caution for the power that comes from the use of nuclear weapons.

The social construction occurring within these film takes advantage of the general public's removal from the actual combat situations or even daily lives of US Navy personnel. These subtle nuances in the depiction of the US Navy contribute in shaping a positive image of them in the audience's eyes. These movies do not explicitly trumpet "the Navy is flawless, never question the navy!" Instead these films portray characters who are scrupulous in their treatment of their comrades, the enemy, and civilians. Their use of force often comes after exhausting diplomatic options and is done in accordance to the laws of war.

Implications

In this section, I will argue as to why the depiction of a strong Navy is important in bolstering the capability of the US to project a great-power military. These themes in these movies are indeed relevant to the behaviour of states, because these depictions are methods communication.

It does not matter if these movies are a work of fiction, because I argue that fiction is far more accessible to the public. Public understanding, both foreign and domestic, are far removed from the experience of actual combat or from the analysis of war games. Movies create a peculiar effect, for when societies and individuals try to deny the reality of the state, there is push back that substantiates the reality of the state. However, in this case, the government does not act against it, and in some cases, it is within the interest of the US not to deny the ideas found within these movies. If watching these movies elicits a patriotic response, for example the belief that the US can win a great power war with the Soviet Union, then it is not interest of the US to make themselves appear weak, nor is it possible for the US to engage in combat with the Soviet Union for the sake of proving this point.

By not denying the communication of these ideas, and in some cases even participating wholesale in the production process (Department of Defense, 2015), the US is admitting to the importance of the ideas contained within these films. The realists may argue here that Hollywood simply creating entertainment which is inconsequential to the US Navy. However, the participation of the DoD in Hollywood, runs against that the claim movies are inconsequential. Even military institutions such as the US Navy recognize the important role of being involved in the creation process of these films. For shoots of *The Hunt for Red October*, the Navy allowed the use of some of their submarine, hoping the display would be enough to boost the appeal of submarines to people enlisting (Haglund, 2013). Due to the connectedness of the modern world, this message is able to travel across the different publics of various countries—casting a wide net for the process of image construction to take place (Melissen, 2005).

All the more so, the fact that these movies are able to construct the reality of a US Navy that is stronger and more righteous than the Soviet Union, defies realists in the way that seemingly immaterial themes communicate better than the material forces of the Navy itself. The effect movies have are not causal in the sense that they can topple a rival great power, or that they magically make the US Navy better organization. They are constitutive, that is to say they add to the collective knowledge that defines the US Navy and defines the relationship the audience has with the US Navy. Wendt point to this as a process that occurs within a social structure when “individuals’ shared knowledge reproduces an Idea of the state as a corporate “person” or “group Self”” (Wendt, 1999, p. 218). Cinema in away allows for the Navy propagate the ideas about its capability and its character to the general public.

The role these films have are very similar to the military parades and Military exercises that Navies around the world carry

out. These demonstrations of material power can in fact run against common realist thought in the way these parades and exercises are carefully curated displays of power. Designed as a show of power, rather than an accurate demonstration of power; as accurate demonstration in this sense of involve actually engaging the enemy in combat or some manner of wargaming--both of the public is often not shown. Even in times of peace, these films can still serve as demonstrations of force. These films are also shows of power, albeit with the nuances that come with producing pop culture. All of these films seek to portray the capabilities of the US Navy at the time of its release. They go out of their way to pay military consultants and record with real-life military equipment.

Alongside power projection, the constitutive nature of the Naval Films help in solidifying the Navy’s image for the general public. It contextualizes the Navy’s role in US foreign policy, by placing them situations that the audience can easily see and understand.

These are effective tools especially when directed at the general public who are unfamiliar with the US Navy. Outside of the basic dictionary definitions of the word navy: “ the part of a country’s armed forces that fights at sea, and the ships that it uses;” (Oxford Learners Dictionary) any further ideas of the audience is fair game. In every film analysed here, the Navy plays the roles set by that definition. The narrative places Navy personnel in conflict situations where they use military force. After that, the films take it a step further by creating a context for the conflict; against other states, non-state actors, or fictional creatures. These stories establish that the US Navy is indeed capable of carrying this task successfully.

These films work on different levels for different audiences. By depicting the tools and methods of the US Navy, the films can either reinforce or create the ideas of the audience. Wendt provides us with a useful tool for helping break down the process of ‘social learning;’ by looking at the ‘idea-

baggage' the audience carries with them (Wendt, 1999). Firstly, to the uninformed public--those without prior information regarding the navy--these films encourage a certain way of thought. Despite being fiction, those seeing the depiction of the US Navy for the first time have no antithesis to bring to the discourse. Secondly to those who have prior ideas regarding the navy. Those who are already convinced of US Naval supremacy would see these movies as hypothetical shows of force not unlike the military parades and exercises previously discussed. For those who disagree, these films can serve as counterarguments. While Wendt emphasizes how difficult it is to challenge the a priori ideas of an actor, he also remarks that an actor with similar belief will more readily accept facts presented to them.

Wendt highlights this process, "It is a core tenet of interactionism that people act toward objects, including other actors, on the basis of the meaning of those objects have for them, and these meanings stem from how situations are understood" (Wendt, 1999). This process happens when two actors (A and B) interact with each other. To simplify Wendt,

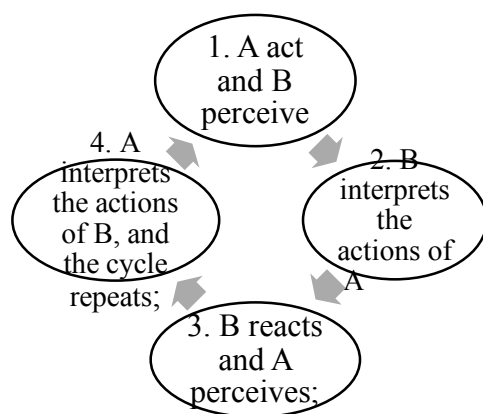


Figure 4.2.1 Wendt's process of Intersubjectivity.

Assuming that both A and B already possess ideas of each other prior to this, then at every step of this process their interaction is either changing or reinforcing those ideas. Ideas that arise of how each actor should act

is what Wendt calls culture (Wendt 1999). The development of this culture is what occurs between the cinema and these films. Themes of Mobility, Competence, and Righteousness are acted out for the audience to witness, creating ideas of how the US Navy performs in the world. In this sense, A and B roles are interchangeable because in this process there rarely is a beginning point, rather it is a culture that self-feeds and self-propagates. The films maybe produced by the Navy to feed the general public a certain image. It also equally possible that it's the thoughts and images within the general public that feed into who the Navy perceive themselves to be.

Power and frequency also play a hand in how these ideas continue to propagate. Power here does not refer to the traditional IR sense, but relates to the relationship between actors A and B: it can refer to how actors influence the way they are perceived; it could also mean the process of incentivizing one particular way of seeing their interactions. In the context of these Naval Films, their power comes from their authoritativeness. These films shed light on combat situations, and the interactions of Navy personnel, decision making of officers--occurrences that the general public are removed from. Even more so in the case of foreign public viewers (Wendt, 1999).

Frequency factors into sustaining the culture of interaction between the audience and the naval films. Once a culture is established and the following interactions follow that expectation, this creates a self-fulfilling prophecy and these ideas are sustained (Wendt, 1999). These interactions will persist until the audience encounters a situation that do not fulfill their expectations. Yet again, the distance between the audience and the actions of the US Navy come into play. The US Navy often keeps the minute details of their operations as confidential, not to also mention that the US has not engaged in a Total War between great powers since the second world war. The frequency with which these films are accessible to the audience sustains the themes presented

within them, meanwhile the obscurity of antithetical ideas makes those existing themes even stronger.

Conclusion

This research set out to study the relationship between the US Navy as it exists and juxtapose it against the depiction of the Navy in the eyes of a film audience. It set out to see the portrayal of US Navy capability in these naval movies.

By displaying various themes, the films are able to paint an image of the US Navy. These films paint a Navy with a high degree of mobility: possessing at once the capacity to reach various locations, in addition to already having ships and personnel stationed in strategic locations across the globe. The Navy employs and maintains personnel that are able to carry out their tasks well: servicemen and women who are responsible and competent, officers who are strategic and discerning, as well as a special

operations branch that are extremely effective in crisis situations. Above all, these films paint service members who act righteously: able to act with diplomacy, discernment, and a great respect for the use of deadly force.

These themes are displayed in a setting that helps contextualizes the actions of the US navy for the members of the public that are removed from the operations of the Navy, whether by distance, nationality, or security clearance. It sustains the idea of a strong US Navy to the general public.

This research recommends further exploration into the role of films in discourse regarding the military, and even other forms of government. The same method can be used to analyze, ideas being communicated by other governments' and what they are saying regarding their own countries; countries with growing films industries like India and the People's Republic of China come to mind.

References

- Adler, E. (2013). Constructivism. In W. Carlsnaes, T. Risse, & B. Simmons (Eds.), *Handbook of International Relations*. London, UK: Sage.
- Bradford, J. (2016). *America seapower, and the world*. Oxford, UK: John Wiley & Sons, Inc.
- Bruckheimer, J. (Producer), & Scott, T. (Director). (1995). *Crimson Tide* [Motion Picture]. Hollywood, CA: Hollywood Pictures.
- CNN. (2019). Osama bin Laden fast facts. Retrieved from <https://edition.cnn.com/2013/08/30/world/osama-bin-laden-fast-facts/index.html>
- Colburn, B. (2015). *Instruction No. 5410.16: DoD assistance to non-government, entertainment-oriented media productions*. Washington, DC: Department of Defense.
- Cormier, R. (2015). *17 action-packed facts about Crimson Tide*. Retrieved from <https://www.mentalfloss.com/article/63829/17-action-packed-facts-about-crimson-tide>
- Feickert, A. (2019). *U.S. Special Operations Forces (SOF): Background and issues for Congress*. Washington, DC: Congressional Research Service.
- Ferguson, L. (Producer), & McTiernan J. (Director). (1990). *Hunt for Red October* [Motion Picture]. Los Angeles, CA: Mace Neufeld Productions.
- Goldner, B. (Producer), & Berg, P. (Director). (2012). *Battleship* [Motion Picture]. Burbank, CA: Hasbro Studios.
- Gray, C. S. (1994). Sea power: The great enabler. *Naval War College Review*, 47(1), 18-27. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/44642485>
- Haglund, D. (2013). How the Hunt for Red October movie revealed classified information about U.S. submarines. *Slate*. Retrieved from <https://slate.com/culture/2013/10/the-hunt-for-red-october-movie-revealed-classified-information-about-u-s-submarines-because-tom-clancy-knew-his-stuff.html>
- Hollings, A. (2018). *Can Top Gun 2 repeat the original's success as a recruitment tool?* Retrieved from <https://sofrep.com/fightersweep/can-top-gun-2-repeat-the-originals-success-as-a-recruitment-tool/>
- Lang, B. (2012). How 'Battleship' enlisted the Navy. *The Wrap*. Retrieved from <https://www.thewrap.com/how-battleship-enlisted-navy-40496/>
- Main, D. (2015). Undersea cables transport 99 percent of international data. *Newsweek*. Retrieved from <https://www.newsweek.com/undersea-cables-transport-99-percent-international-communications-319072>
- Mattis, J. (2018). *Summary of the National Defense Strategy of the United States of America*. Washington, DC: Department of Defense.
- Melissen, J. (2015). The new public diplomacy between theory and practice. In J. Melissen (Ed.), *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations*. New York, NY: Palgrave.
- Navy Times. (2016). Sub portrayed in 'Hunt for Red October' ends last deployment. Retrieved from <https://www.navytimes.com/news/your-navy/2016/11/23/sub-portrayed-in-hunt-for-red-october-ends-last-deployment/>
- Neuman, L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches*. Essex, UK: Pearson.
- Nye, J. (2011). *The future of power*. Philadelphia, PA: PublicAffairs Books.
- Nye, J. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. New York, NY: PublicAffairs
- Oxford Learners Dictionary. (2019). *Navy*. Retrieved from https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/navy

- Pacific. [Video file]. (N.d.). Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=bLRme_5ZHTQ
- Paul, C. (2016). On strategic communications today: Enhancing US efforts to inform, influence, and persuade." *Parameters*, 46(3), 87-97. Retrieved from https://www.rand.org/pubs/external_publications/EP66761.html
- Pautz, M. C., & Warnement, M. K. (2013). Government on the Silver Screen: Contemporary American cinema's depiction of bureaucrats, police officers, and soldiers. *PS: Political Science and Politics*, 46(3), 569-79. <https://doi.org/10.1017/S1049096513000516>
- Pretorius, J. (2008). The security imaginary: Explaining military isomorphism. *Security Dialogue*, 39(1), 99-120. <https://doi.org/10.1177/0967010607086825>
- Reus-Smit, C. (2005). Constructivism In S. Burchill & A. Linklater (Eds.), *Theories of International Relations*. New York, NY: Palgrave.
- Richardson, J. (2016). *A design for maintaining maritime superiority 1.0*. Washington, DC: Department of the Navy.
- Richardson, J. (2018). *A design for maintaining maritime superiority 2.0*. Washington, DC: Department of the Navy.
- Ross, R. R. (2018). Nationalism, geopolitics, and naval expansionism from the nineteenth century to the rise of China. *Naval War College Review*, 71(4), article 4. Retrieved from <https://digital-commons.usnwc.edu/nwc-review/vol71/iss4/4>
- Rubel, R. C. (2016). The relationship between global naval engagement and naval war-fighting posture. *Naval War College Review*, 69 (4), article 5. Retrieved from <https://digital-commons.usnwc.edu/nwc-review/vol69/iss4/5>
- Rudin, S. (Producer), & Greengrass, P. (Director). (2013). *Captain Phillips* [Motion Picture]. Culver City, CA: Columbia Pictures.
- Schneider, C. (2005). Culture communicates: US diplomacy that works. In J. Melissen (Ed.), *The new public diplomacy: Soft power in international relations*. New York, NY: Palgrave. https://doi.org/10.1057/9780230554931_8
- Simpson, D. (Producer), & Scott, T. (Director). (1986). *Top Gun* [Motion Picture]. Santa Monica, CA: Don Simpson/Jerry Bruckheimer Films.
- Sirota, D. (2011). 25 years later, how 'Top Gun' made America love war. *Washington Post*. Retrieved from https://www.washingtonpost.com/opinions/25-years-later-remembering-how-top-gun-changed-americas-feelings-about-war/2011/08/15/gIQAU6qJgJ_story.html
- The Locations Guide. (2013). Tom Hanks films piracy drama Captain Phillips in Malta and Virginia. Retrieved from <https://www.thelocationguide.com/2013/10/ng-film-tom-hanks-films-piracy-drama-captain-phillips-in-malta-and-virginia/#>
- The Military Balance 2018. (2018). *IISS*. London, UK: The International Institute for Strategic Studies. Retrieved from <https://www.iiiss.org/publications/the-military-balance/the-military-balance-2018>
- Thomas, B. (1990). Submarine thriller surfaces with Connery in command. *Lawrence Journal*.
- U.S. Navy. (2019). *Department of the Navy FY 2020 President's budget*. Washington, DC: U.S. Navy.
- U.S. Navy. (2019). *Our ships*. Retrieved from https://www.navy.mil/navydata/our_ships.asp
- Walt, S. M. (2002). American primacy: Its prospects and pitfalls. *Naval War College Review*, 55(2), Article 2. Retrieved from <https://digital-commons.usnwc.edu/nwc-review/vol55/iss2/2>
- Wong, K. (2012). Navy stars in action film 'Battleship'. *Washington Times*. Retrieved from <https://www.washingtontimes.com/news/2012/may/18/navy-stars-in-action-film-battleship>

ANALISA KONFLIK WILAYAH SAHARA BARAT DAN UPAYA RESOLUSI KONFLIK

WEST SAHARA CONFLICT ANALYSIS AND RESOLUTION EFFORT

Sri Khairunnisa Ariyati
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
e-mail: sri.khairunnisa.2016@fisipol.umy.ac.id

ABSTRACT

The conflict in the Western Sahara is a conflict disputed by Morocco and the Polisario Front. This conflict is caused by differences in views on ownership of the territory and the authority that has the right to manage the region. This paper aims to examine the causes, actors, interests of actors, and of the conflict. The method used in this paper is descriptive through library studies. The findings of this study indicate that the failure of the correct analysis in the conflict hampered the conflict resolution process, and how the lack of cooperation and compromise from the conflicting parties impacted the process.

Keywords : conflict, conflict resolution, Morocco, Polisario Front, Western Sahara.

ABSTRAK

Konflik wilayah Sahara Barat merupakan konflik yang disengketakan oleh Maroko dan Front Polisario. Konflik ini disebabkan oleh perbedaan pandangan atas kepemilikan wilayah dan otoritas yang berhak mengelola wilayah tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji penyebab, aktor, kepentingan aktor, dan resolusi yang mungkin hadir dalam penyelesaian konflik. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif melalui studi kepustakaan. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa kegagalan analisis yang tepat dalam konflik membuat proses penyelesaian konflik menjadi terhambat. Selain itu, kerjasama dan kompromi dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik juga turut mempengaruhi proses resolusi konflik.

Kata kunci : konflik, resolusi konflik, Front Polisario, Maroko, Sahara Barat.

Pendahuluan

Pertikaian suatu pihak dengan pihak lain atau suatu negara dengan negaranya sendiri maupun dengan negara lain seringkali berupa konflik wilayah. Bentuk-bentuk dari konflik wilayah sendiri beragam seperti sengketa batas wilayah, tindakan penempatan atau pemanfaatan sumber daya wilayah lain secara ilegal, dan tindakan separatisme. Konflik wilayah merupakan salah satu konflik yang paling sering terjadi bahkan sejak berabad-abad lalu seperti perebutan wilayah jajahan antara bangsa-bangsa Eropa, tindakan penguasaan wilayah ilegal yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, sengketa batas laut di Laut China Selatan, dan konflik wilayah antara Maroko

dengan Front Polisario (Sahara Barat).

Salah satu konflik wilayah yang belum terselesaikan hingga kini adalah konflik wilayah antara Maroko dan Front Polisario (Sahara Barat). Titik-titik kemunculan konflik wilayah ini mulai terlihat saat Maroko merdeka dari penjajahan Prancis yakni sekitar tahun 1956 yang kemudian terus berkembang hingga 1975 ketika Sahara Barat lepas dari Spanyol. Konflik ini terjadi akibat adanya klaim sejarah terkait Kerajaan Maroko yang luas wilayahnya sebelum mengalami penjajahan dan perpecahan meliputi wilayah negara Maroko saat ini hingga wilayah Sahara Barat. Wilayah Sahara Barat diakui sebagai

bagian dari wilayah Maroko yang kemudian menurut Front Polisario (Sahara Barat) merupakan tindakan penjajahan baru karena mereka telah menjadi negara yang berdaulat selepas penjajahan dari Spanyol.

Pihak yang terlibat dalam konflik wilayah ini adalah pemerintahan Maroko dan Front Polisario (Republik Demokratik Arab Sahrawi) yang memiliki klaim atas wilayah Sahara Barat pasca penjajahan Spanyol. Konflik antara Maroko dan Front Polisario (Sahara Barat) menyebabkan banyaknya penduduk Sahara Barat yang mengungsi ke negara Aljazair. Negara-negara di Afrika pun turut terbelah, sebagian mendukung penguasaan Maroko atas Sahara Barat, sebagian lagi mendukung kemerdekaan Sahara Barat dari Maroko (Arifin, 2016).

Upaya-upaya penyelesaian konflik oleh negara-negara terkait dan pihak internasional seperti Persatuan Bangsa-bangsa hingga saat ini masih belum menemukan hasil yang baik bahkan beberapa diantaranya mengalami kegagalan. Tidak terselesaikannya konflik ini hingga sekarang membuat penulis tertarik untuk menggali masalah ini jauh lebih dalam. Oleh karena itu, Penulis mengajukan rumusan masalah berupa bagaimana perkembangan konflik Sahara Barat dan upaya resolusi konflik yang dihadirkan?

Tinjauan pustaka

Konflik Wilayah

Konflik berasal dari bahasan latin *configere* atau *conflictus* yang berarti perkelahian atau pertentangan (Sudira, 2017). Konflik merupakan kondisi dimana dua orang atau lebih melakukan tindakan yang saling memprovokasi satu sama lain dengan cara saling menyakiti dan saling menyerang. Menurut Pruitt dan Rubin (1993), konflik adalah kondisi dimana adanya perbedaan kepentingan yang diyakini oleh para pihak yang terlibat tidak dapat dicapai secara bersamaan.

Konflik terbagi menjadi beberapa jenis salah satunya adalah konflik wilayah. Konflik wilayah sendiri merupakan

pertentangan terkait kepemilikan suatu wilayah baik wilayah secara utuh maupun batas suatu wilayah antara satu sama lain. Konflik wilayah merupakan konflik yang akan dihadapi dengan serius oleh pihak-pihak yang terlibat karena berkaitan dengan kepemilikan dan kesatuan. Bagi negara, wilayah merupakan lambang dari integritas negaranya, dan mengandung nilai yang sangat penting yakni kedaulatan dan kehormatan bangsa (Utariah, 2006).

Menurut Surwandoro et al. (2011), konflik wilayah dapat disebabkan oleh faktor alamiah dan arifisial. Faktor alamiah konflik wilayah berasal dari kondisi perbatasan yang bebas hambatan sehingga memudahkan penduduk melakukan migrasi antar negara. Sementara itu, faktor artifisial konflik wilayah berasal dari berubahnya kondisi perbatasan akibat adanya suatu kebijakan baru. Faktor arifisial seringkali dipengaruhi oleh peristiwa masa lalu dimana para penjajah yang membuat garis perbatasan suatu wilayah dengan menabrak garis-garis perbatasan alamiah seperti gunung, sungai, dan etnis. Akibat dari faktor artifisial ini adalah timbulnya gerakan separatisme dan irredentisme.

Resolusi Konflik

Resolusi konflik merupakan upaya-upaya penyelesaian permasalahan antara pihak-pihak yang bermasalah yang ditempuh dengan berbagai cara. Resolusi konflik juga dapat diartikan sebagai upaya memberikan penyelesaian konflik yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik dengan menggunakan mekanisme tertentu (Putra, 2009). Hal-hal yang dapat ditempuh dalam upaya resolusi konflik adalah menggunakan metode mediasi, negosiasi, fasilitasi, maupun arbitrase.

Dalam resolusi konflik, menurut Peter Wallensteenn yang dikutip oleh Sandi (2014), ada tiga unsur penting yang harus diperhatikan yakni pertama, hasil akhir dari penyelesaian konflik yang berupa kesepakatan-kesepakatan tertentu

harus ditulis dalam dokumen resmi dan ditanda tangani oleh seluruh pihak yang telibat agar dapat menjadi pegangan. Kedua, agar konflik dapat diselesaikan dengan tuntas, setiap pihak yang terlibat harus menerima atau mengakui eksistensi satu sama lain. Ketiga, harus adanya kesepakatan untuk menghentikan segala tindakan kekerasan serta proses penyelesaian konflik untuk membangun rasa percaya atas satu sama lain.

Sementara itu, menurut Miall et al. dalam Jurnal Resolusi Konflik Dalam Perubahan Dunia (Sudira, 2017), resolusi konflik memiliki prinsip-prinsip tertentu yang menjadi ide dasar dan pegangan dalam penerapannya. Pertama, *impartiality*, resolusi konflik dianggap tuntas jika semua pihak yang terlibat dalam konflik telah memperoleh kepentingan yang mereka inginkan dan mendapatkan perlindungan. Kedua, *mutuality*, ketika resolusi konflik menggunakan metode intervensi, maka setiap pihak yang terlibat harus memandang tindakan tersebut sebagai suatu hal positif dan menyambutnya dengan terbuka.

Ketiga, *sustainability*, pihak-pihak yang akan masuk ke dalam konflik (intervensi) harus berkomitmen untuk bertahan hingga konflik terselesaikan. Keempat, *complementary*, pihak-pihak yang melakukan intervensi dalam konflik harus bersepakat bahwa intervensi satu sama lain saling melengkapi. Kelima, *reflexivity*, tujuan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik haruslah untuk tujuan yang baik.

Keenam, *consistency*, adanya jaminan bahwa setiap kondisi maupun suasana akan direspon dengan sama. Ketujuh, *accountability*, pihak-pihak yang melakukan intervensi harus siap tidak hanya menjadi sponsor namun juga harus siap dengan segala imbas atau resiko yang mungkin disebabkan oleh konflik. Terakhir, *universality*, setiap pihak yang melakukan intervensi akan diterima dengan baik oleh seluruh kalangan dan budaya.

Metode

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif untuk menjelaskan tindakan-tindakan dari pihak-pihak yang berkonflik dan Persatuan Bangsa-bangsa dalam mengupayakan resolusi konflik antara Maroko dan Sahara Barat. Penulis dalam mengumpulkan segala informasi dan bahan penunjang penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan melalui buku, jurnal, dokumen resmi negara, dan artikel berita.

Sejarah Konflik

Sebelum bangsa Eropa masuk ke Afrika dan melakukan penjajahan, Maroko dan Sahara Barat bernaung dalam satu pemerintahan yang sama yakni dalam Kerajaan Maroko. Kerajaan ini pernah melakukan perjanjian terkait pembangunan *trading station* di sisi selatan Kerajaan Maroko dengan Inggris dan Spanyol yang secara tidak langsung memuat pernyataan bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari Kerajaan Maroko. Prancis dan Inggris juga pernah melakukan perjanjian yang mengakui wilayah selatan Kerajaan Maroko merupakan bagian resmi dari kerajaan dan memberikan wewenang kepada Prancis untuk mengurus wilayah tersebut (Kasraoui, 2017). Namun, ketika Prancis dan Spanyol terlibat konflik yang membuat kedua belah pihak harus membagi kawasan jajahan, Kerajaan Maroko adalah salah satu yang terkena imbasnya. Kerajaan Maroko terbelah, Prancis menguasai wilayah Maroko bagian utara dan Spanyol menguasai wilayah Maroko bagian selatan yang kemudian menjadi Sahara Barat.

Maroko bagian utara akhirnya mampu merdeka pada tahun 1956 dan mendeklarasikan negara berdaulat bernama Maroko. Setelah merdeka, Maroko mulai memperjuangkan integritas wilayahnya dengan memaksa Spanyol untuk mengembalikan wilayah yang mereka kuasai kepada Maroko. Sementara itu,

penduduk Sahara Barat mulai membentuk gerakan kemerdekaan bernama Front Polisario untuk melawan penjajahan Spanyol dan mendirikan negara berdaulat.

Perjuangan Maroko untuk menyatukan kembali wilayahnya dimulai dengan memaksa Spanyol menandatangani perjanjian *Angra de Cintra* yang membolehkan Maroko untuk mengambil kembali beberapa daerah di wilayah selatan Kerajaan Maroko (Kasraoui, 2017). Tidak hanya itu, Maroko juga meminta Persatuan Bangsa-bangsa untuk memuat isu Sahara Barat dalam pembicaraan terkait dekolonisasi. Maroko mendorong Persatuan Bangsa-bangsa untuk memaksa Spanyol keluar dari wilayah Sahara Barat. Ditengah proses dekolonisasi, tentara Maroko melakukan aksi konfrontasi dengan Front Polisario. Maroko juga melakukan aksi protes bernama 'Green March' ke wilayah Sahara Barat untuk menekan Spanyol (SC Report, 2019). Akhirnya, Spanyol membuat perjanjian Madrid dan menyerahkan wilayah Sahara Barat kepada Maroko dan Mauritania.

Sesaat setelah kepergian Spanyol dari Sahara Barat, Maroko melakukan aneksasi terhadap wilayah tersebut. Namun, disaat yang bersamaan Front Polisario juga mendeklarasikan pembentukan negara baru bernama Republik Demokratik Arab Sahrawi. Konflik wilayah pun pecah diantara Maroko, Front Polisario, dan Mauritania. Pada 1979, Mauritania menyatakan untuk keluar dari konflik dan melakukan perjanjian penyerahan wilayah kepada Front Polisario (SC Report, 2019). Namun, wilayah yang diserahkan oleh Mauritania juga dianeksasi oleh Maroko. Pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam konflik ini Aljazair yang memberikan sokongan senjata dan pengungsian bagi Front Polisario. Meskipun begitu, konflik wilayah ini tetaplah antara Maroko dan Front Polisario. Setelah proses panjang oleh Persatuan Bangsa-bangsa, organisasi ini akhirnya mengeluarkan misi perdamaian khusus bernama UN Mission for the

Referendum in Western Sahara (MINURSO), dari misi ini kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan gencatan senjata pada tahun 1991 dan MINURSO menjanjikan untuk memfasilitasi referendum bagi penduduk Sahara Barat (SC Report, 2019). Selagi konflik mereda diantara Maroko dan Front Polisario, Persatuan Bangsa-bangsa terus mengupayakan penyelesaian masalah melalui metode dialog dan negosiasi seperti Baker's Plan I dan II, Roundtable Meeting on Western Sahara.

Aktor dan Peran dalam Konflik

Dalam konflik wilayah antara Maroko dan Sahara Barat setidaknya ada lima aktor yang terlibat aktif selama konflik dan selama pembicaraan damai yakni Maroko, Front Polisario yang mewakili Sahara Barat, Aljazair, Mauritania, dan Persatuan Bangsa-bangsa. Kelima aktor ini memiliki pola hubungan, posisi, kepentingan, dan kebutuhan yang berbeda-beda.

Kelima aktor ini memiliki pola hubungan yang saling mendukung, menentang, dan netral. Maroko dan Front Polisario memiliki hubungan yang saling bertentangan satu sama lain. Hingga kepentingan mereka terpenuhi kedua pihak ini tidak akan berada dalam kondisi saling mendukung. Aljazair sendiri memberikan dukungan terhadap gerakan Front Polisario dengan menyokong senjata dan meminta Maroko untuk membiarkan warga Sahrawi menentukan nasib sendiri. Di sisi lain, Mauritania merupakan pihak yang mendukung keputusan Maroko untuk menjadikan Sahara Barat sebagai provinsi selatan Maroko. Sementara itu, Persatuan Bangsa-bangsa merupakan pihak-pihak netral dalam konflik ini yang mengupayakan terciptanya kedamaian.

Maroko sebagai aktor pertama merupakan pihak yang pertama kali melakukan tindakan pemicu konflik. Maroko menentang keras keinginan Front Polisario untuk mengadakan referendum.

Selain itu, Maroko juga mengecam tindakan Aljazair yang memberikan bantuan senjata dan membiayai gerakan yang dianggap oleh Maroko separatistis tersebut.

Keinginan Maroko untuk menyatukan kembali wilayah yang terpisah akibat penjajahan bangsa Eropa membuat Maroko berupaya dengan keras untuk mengembalikan wilayah Sahara Barat ke dalam kedaulatannya. Isu penyatuan Sahara Barat dijadikan sebagai salah satu isu prioritas bagi Maroko. Hal ini dibuktikan dengan adanya badan khusus dalam pemerintahan yang mengurus isu ini. Badan khusus ini bernama Dewan Penasihat Kerajaan untuk Urusan Sahara (CORCAS).

Maroko memberikan tawaran penyelesaian konflik kepada Front Polisario yaitu menjadikan wilayah Sahara Barat sebagai wilayah Maroko yang memiliki otonomi khusus (SC Report, 2019). Maroko tidak menginginkan adanya referendum bagi warga Sahrawi dikarenakan permasalahan wilayah ini merupakan isu yang berkaitan dengan integritas dan stabilitas negara. Maroko meyakini wilayah Sahara Barat termasuk dalam kedaulatan Maroko dikarenakan bukti sejarah yang kuat termasuk perjanjian-perjanjian yang pernah disepakati oleh Maroko dan bangsa Eropa.

Aktor kedua adalah Front Polisario. Gerakan ini mendeklarasikan bahwa setelah Sahara Barat ditinggalkan oleh Spanyol, wilayah tersebut menjadi sebuah negara baru dengan nama Republik Demokratik Arab Sahrawi. Gerakan ini menguasai wilayah Sahara Barat sekitar 25% dan aktif melakukan perlawanan atas Maroko (Arifin, 2016). Gerakan ini memiliki pandangan yang bersebrangan dengan Maroko terkait bentuk penyelesaian konflik. Front Polisario meyakini bahwa satu-satunya solusi yang tepat untuk penyelesaian konflik adalah dengan memberikan referendum bagi warga Sahrawi dan membiarkan mereka menentukan nasibnya sendiri secara leluasa. Permintaan Front Polisario ini didukung oleh Aljazair yang menilai bahwa tindakan

aneksasi dan kolonialisasi yang dilakukan oleh Maroko harus dihentikan dan hak-hak warga Sahrawi harus segera diberikan termasuk terkait penentuan nasib sendiri.

Aktor ketiga yang terlibat dalam konflik ini adalah Aljazair. Keterlibatan Aljazair saat ini dalam konflik ini adalah sebagai negara tetangga yang menampung pengungsi dari konflik Maroko dan Sahara Barat. Aljazair juga turut membantu memasok senjata untuk Front Polisario, mendukung keinginan referendum dari gerakan tersebut, dan mengizinkan Republik Demokratik Arab Sahrawi untuk mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di wilayah mereka. Aljazair menilai bahwa tindakan Maroko yang melakukan aneksasi terhadap Sahara Barat harus dihentikan. Keberpihakan Aljazair terhadap Front Polisario ini selain dikarenakan isu kemanusiaan adalah karena keinginan Aljazair untuk menjadi negara yang berpengaruh di wilayah Afrika Utara. Di samping itu, melimpahnya sumber daya yang terdapat di wilayah Sahara Barat dan kemudahan akses terhadap Samudera Atlantik memberikan ketertarikan tersendiri bagi Aljazair (Labac, 2016). Oleh karena itulah, Aljazair membangun hubungan baik dengan Front Polisario.

Aktor keempat dalam konflik ini adalah Mauritania. Negara ini juga turut terlibat karena bertetangga dengan Sahara Barat dan juga pernah mengakui wilayah Sahara Barat sebagai bagian dari wilayahnya. Pengakuan Mauritania terhadap wilayah tersebut tidak berlangsung lama, pada tahun 1979 Mauritania menyatakan diri untuk keluar dari konflik dan menyerahkan wilayah tersebut kepada Front Polisario. Namun, dikarenakan perubahan pemimpin, Mauritania kini mendukung Maroko untuk penyelesaian konflik (The North Africa Post, 2019). Mauritania tidak menginginkan adanya negara yang membatasi hubungannya dengan Maroko. Keberpihakan Mauritanian terhadap Maroko lebih didasari oleh motif ekonomi. Saat ini, Mauritania dan Maroko

memiliki banyak perjanjian ekonomi khususnya dalam bidang minyak.

Aktor terakhir yang terlibat dalam konflik adalah Persatuan Bangsa-bangsa. Organisasi ini terdiri dari hampir seluruh negara di dunia dan memiliki badan-badan khusus yang mengatur masalah kemanusiaan dan keamanan internasional. Badan Persatuan Bangsa-bangsa yang mengurus masalah konflik Maroko dan Sahara Barat adalah Dewan Keamanan. Persatuan Bangsa-bangsa telah banyak memberikan kontribusi melalui pengiriman tentara perdamaian dan mengupayakan penyelesaian konflik melalui dialog dan pertemuan. Organisasi ini juga meluncurkan misi khusus bernama *UN Mission for the Referendum in Western Sahara* (MINURSO) yang berfungsi mengupayakan penyelesaian damai konflik wilayah Maroko dan Sahara Barat (SC Report, 2019).

Dari penelusuran jejak sejarah, pola hubungan, dan kepentingan yang dibawa oleh masing-masing aktor konflik maka dapat diketahui bahwa konflik wilayah ini disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan terhadap wilayah Sahara Barat. Perbedaan dasar sejarah yang dijadikan dasar klaim oleh kedua belah pihak menyebabkan konflik ini berlangsung berlarut-larut. Sisi sejarah yang mempengaruhi konflik ini juga berasal dari tindakan penjajah yang membagi sebuah wilayah tanpa melihat posisi suatu suku bangsa dan mengambikan batas-batas alamiah dalam suatu wilayah.

Maroko yang menggunakan dasar perjanjian antara Kerajaan Maroko dengan bangsa Eropa membuat Maroko bersikeras bahwa wilayah Sahara Barat setelah terlepas dari penjajahan kembali menjadi bagian dari Maroko. Sementara Front Polisario menggunakan dasar bahwa kepergian Spanyol dari wilayah Sahara Barat merupakan hasil dari perjuangan kemerdekaan yang mereka upayakan. Oleh karena itulah, Maroko beranggapan bahwa Front Polisario merupakan gerakan

separatisme dan Front Polisario menilai bahwa tindakan Maroko merupakan bentuk aneksasi dan kolonialisasi baru.

Penyebab konflik juga disebabkan oleh perbedaan pandangan akan nilai suatu wilayah. Maroko beranggapan keutuhan dan stabilitas wilayah merupakan hal yang sangat esensial. Inilah yang membuat Maroko bersikeras untuk menyatukan kembali wilayahnya yang terpisah. Sementara, Front Polisario beranggapan bahwa penduduk suatu wilayah yang tidak memiliki suatu otoritas memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri termasuk mendeklarasikan kedaulatan.

Tindakan kekerasan yang mewarnai konflik hanyalah bentuk upaya masing-masing pihak untuk memastikan kepentingannya terpenuhi. Maroko mengirimkan pasukannya ke wilayah Sahara Barat untuk memberantas gerakan separatisme dan Front Polisario yang melakukan tindakan perlawanan terhadap pasukan Maroko didasari atas motif mempertahankan wilayah.

Wilayah Sahara Barat menjadi sangat penting bagi kedua belah pihak yang berkonflik dikarenakan wilayah dapat menunjukkan integritas dan kedaulatan suatu negara. Wilayah merupakan salah satu unsur terpenting dalam pengakuan terbentuknya suatu negara. Bagi kedua belah pihak, dengan dapat menjadikan suatu wilayah menjadi bagian dari kekuasaan, maka unsur dan nilai lainnya dapat menyertai keberadaan wilayah, seperti terpenuhinya kebutuhan ekonomi, transportasi, dan sumber daya.

Analisa Resolusi Konflik

Analisa konflik yang tepat dengan memperhatikan jejak sejarah, pola hubungan antar aktor, serta kepentingan yang dibawa oleh masing-masing pihak dapat memberikan kemudahan dalam penyusunan resolusi konflik. Konflik wilayah antara Maroko dan Front Polisario telah melalui beberapa upaya penyelesaian konflik yang diusahakan oleh Persatuan

Bangsa-bangsa melalui UN Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO). Tahap pertama menuju resolusi konflik yang berhasil diwujudkan oleh Persatuan Bangsa-bangsa adalah penghentian gencatan senjata yang disepakati oleh Maroko dan Front Polisario. Kemudian MINURSO melakukan beberapa upaya penyelesaian konflik lanjutan bernama Baker's Plan I dan II, Rountable Meeting on Western Sahara. Misi Persatuan Bangsa-bangsa adalah untuk membantu mengatur referendum bagi warga Sahrawi apakah mereka akan memilih untuk merdeka atau bersatu dengan Maroko.

Resolusi pertama yang dilakukan oleh Persatuan Bangsa-bangsa adalah melalui dialog damai bernama Baker's Plan I. Dialog damai ini diatur oleh Utusan Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-bangsa bernama James Baker. Melalui dialog ini, Baker mengajukan sebuah *Framework Agreement* yang berisikan usulan mengenai referendum (SC Report, 2019). Usulan yang ditawarkan adalah Persatuan Bangsa-bangsa akan mengadakan atau memfasilitasi referendum dengan melakukan pemungutan suara terbatas. Orang-orang yang berhak ikut serta dalam pemungutan suara adalah warga Sahrawi. Maroko menerima usulan isi asalkan orang-orang yang melakukan pemungutan suara terdiri atas 74.000 warga Sahrawi dan 120.000 penduduk Maroko (Cherkaoui, 2017). Pernyataan ini jelas ditentang oleh Front Polisario, mereka menilai usulan Maroko tersebut tidak adil karena jumlah orang-orang yang dapat ikut dalam pemungutan suara tidak seimbang. Perbedaan tanggapan dari kedua belah pihak membuat resolusi pertama ini berujung pada kegagalan.

Setelah mengalami kegagalan, Persatuan Bangsa-bangsa kembali mengeluarkan resolusi kedua bernama Baker's Plan II. Resolusi ini hampir sama dengan resolusi sebelumnya yang tetap mengupayakan mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak yang

berkonflik. Usulan yang ditawarkan adalah Persatuan Bangsa-bangsa akan mengadakan atau memfasilitasi referendum dalam jangka waktu empat hingga lima tahun mendatang. Usulan lainnya adalah memberikan pilihan kepada penduduk wilayah Sahara Barat berupa independensi, otonomi, atau integrasi dengan Maroko (SC Report, 2019). Resolusi ini disetujui oleh Front Polisario, Aljazair, dan Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-bangsa, namun ditolak oleh Maroko. Tidak adanya kesepakatan atas resolusi membuat resolusi ini kembali mengalami kegagalan.

Setelah kegagalan dua resolusi, Maroko dan Front Polisario beberapa kali melakukan pertemuan atas inisiatif sendiri dan atas keterpaksaan dikarenakan harus membicarakan beberapa hasil sidang Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-bangsa. Resolusi terakhir yang tengah diupayakan oleh Persatuan Bangsa-bangsa adalah Rountable Meeting on Western Sahara yang dihadiri oleh Maroko, Front Polisario, Aljazair, dan Mauritania (SC Report, 2019). Diikut sertakannya Aljazair dan Mauritania dalam pembicaraan damai ini adalah karena kedua negara ini adalah tetangga terdekat dari wilayah konflik dan memiliki hubungan yang berdekatan dengan Maroko dan Front Polisario. Kehadiran Aljazair dan Mauritani dalam pertemuan tersebut diharapkan dapat memberikan pandangan dan usulan baru terkait upaya penyelesaian konflik. Selain itu, kehadiran kedua negara ini dapat membantu meyakinkan Maroko dan Front Polisario bahwa keputusan perdamaian harus diputuskan segera. Rountable Meeting on Western Sahara telah dilakukan dua kali yakni pada Desember 2018 dan Maret 2019.

Berdasarkan pandangan Peter Wallensteenn terkait unsur penting dalam resolusi konflik maka dapat dilihat bahwa Persatuan Bangsa-bangsa telah mengupayakan salah satu unsur resolusi konflik dalam konflik Maroko dengan Front Polisario. Persatuan Bangsa-bangsa telah

berhasil membuat Maroko dan Front Polisario untuk bersepakat dalam penghentian penggunaan kekerasan dalam konflik. Tidak adanya gencatan senjata di wilayah konflik memudahkan upaya resolusi konflik yang membutuhkan kepercayaan satu sama lain antara pihak yang berkonflik. Meskipun begitu, unsur penting lain dalam resolusi konflik yang berupa kesepakatan tertulis masih belum terwujud.

Kegagalan dua resolusi dan satu resolusi yang masih diupayakan saat ini menunjukkan bahwa upaya resolusi konflik bukanlah hal yang dapat diputuskan dengan tergesa-gesa. Pengkajian yang matang terhadap konflik dan kepentingan dari masing-masing pihak yang berkonflik harus diperhatikan dengan seksama. Selain itu, kerjasama seluruh pihak untuk saling terbuka dalam membicarakan kepentingan dan keinginan penyelesaian juga merupakan salah satu poin yang terpenting. Kegagalan upaya perdamaian disebabkan oleh tidak maunya pihak-pihak yang berkonflik untuk saling memahami kepentingan dan keinginan satu sama lain. Hal inilah yang menyulitkan Persatuan Bangsa-bangsa dalam mengupayakan perdamaian konflik wilayah tersebut. Meskipun begitu, baik Maroko, Front Polisario, Aljazair, Mauritania dan Persatuan Bangsa-bangsa telah menerapkan beberapa prinsip dasar dari upaya resolusi konflik. Prinsip *mutuality* dan *sustainability* diterapkan dengan baik oleh Maroko dan Front Polisario. Di sisi lain, Persatuan Bangsa-bangsa sebagai pihak yang mengupayakan perdamaian dan pihak intervensi telah menerapkan hampir seluruh prinsip dasar dari resolusi konflik dalam setiap upaya penyelesaian konflik.

Alternatif Resolusi Konflik

Konflik Maroko dan Front Polisario atas wilayah Sahara Barat yang telah berlangsung lebih dari 40 tahun ini memerlukan penyelesaian konflik yang tepat. Tujuan dari adanya resolusi konflik

adalah untuk menghentikan segala perbedaan pandangan dan kepentingan yang dipegang dengan kuat oleh pihak-pihak yang berkonflik. Resolusi konflik dapat dikatakan berhasil jika mampu menghasilkan kondisi dimana pihak-pihak yang berkonflik menjadi bersepakat untuk menghentikan konflik terlepas dari bagaimanapun metode yang dilakukan.

Konflik wilayah yang sering diwarnai dengan aksi kekerasan membuat prioritas pertama dalam resolusi konflik adalah penghentian segala jenis tindakan kekerasan. Peniadaan aksi kekerasan diharapkan dapat membuat suasana dalam wilayah konflik menjadi lebih tenang yang nantinya akan memudahkan proses-proses lanjutan dalam resolusi konflik. Dalam konflik wilayah Maroko dan Front Polisario, kedua belah pihak telah sepakat untuk menghentikan gencatan senjata dan membangun situasi yang kondusif dalam wilayah konflik. Kedua belah pihak hanya perlu terus bekerjasama dan mempercayai satu sama lain untuk mempercepat proses penyelesaian konflik wilayah.

Konflik memang dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang berkonflik secara langsung tanpa melibatkan pihak lain sebagai mediator, fasilitator, dan posisi netral lainnya. Namun, keberadaan pihak netral dalam konflik skala internasional dapat membantu penyelesaian konflik lebih cepat. Resolusi konflik yang dapat diterapkan dalam konflik wilayah antara Maroko dan Front Polisario adalah melalui metode negosiasi, mediasi, fasilitasi yang semuanya dilakukan dalam kondisi perundingan atau dialog damai.

Pihak-pihak yang akan terlibat dalam upaya resolusi konflik adalah pihak yang berkonflik (Maroko dan Front Polisario), pendukung pihak yang berkonflik (Aljazair dan Mauritania), dan pihak netral (Persatuan Bangsa-bangsa). Dalam perundingan, Maroko dan Front Polisario berkewajiban untuk bersikap tenang dan menghindari konfrontasi.

Aljazair dan Mauritania dapat membantu jalannya perundingan dengan memberikan dorongan dan saran untuk penyelesaian konflik. Sementara itu, kehadiran Persatuan Bangsa-bangsa dalam konflik wilayah Maroko dan Front Polisario adalah sebagai pihak netral yang mengupayakan terwujudnya dialog-dialog damai untuk membicarakan penyelesaian konflik. Sebagai pihak yang melakukan intervensi dalam konflik, Persatuan Bangsa-bangsa wajib menerapkan prinsip-prinsip dasar resolusi konflik berupa *impartiality*, *mutuality*, *sustainability*, *complementary*, *reflexivity*, *consistency*, *accountability*, dan *universality*.

Tugas awal dalam perumusan resolusi konflik terkait penciptaan situasi stabil telah dicapai oleh Persatuan Bangsa-bangsa. Tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan oleh Persatuan Bangsa-bangsa adalah menjadi mediator dan fasilitator dalam perundingan damai. Persatuan Bangsa-bangsa harus memprioritaskan upaya resolusi konflik melalui metode dialog, perundingan, dan negosiasi untuk mencapai penyelesaian konflik.

Ketika menjadi mediator, Persatuan Bangsa-bangsa berperan sebagai pihak yang akan menjadi pemantik dan penengah dalam jalannya perundingan. Sebagai mediator, Persatuan Bangsa-bangsa akan mengarahkan Maroko, Front Polisario, Aljazair, dan Mauritania untuk saling mengungkapkan posisi, kepentingan, dan kebutuhan mereka. Sementara itu, ketika menjadi fasilitator, Persatuan Bangsa-bangsa berkewajiban untuk menyediakan tempat, memenuhi segala kebutuhan perundingan, dan memastikan seluruh pihak yang berkonflik dapat datang dalam perundingan. Persatuan Bangsa-bangsa sebagai fasilitator juga akan turut membantu jalannya perundingan damai dengan cara menjadi mediator tanpa mencampuri keputusan dan hasil akhir dari perundingan.

Kunci dari resolusi konflik adalah

memastikan kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk saling mengerti satu sama lain dan berjanji untuk menerapkan segala kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian resolusi konflik. Persatuan Bangsa-bangsa dapat melakukan pendekatan secara sosial-ekonomi, sosial-geografi, untuk memahami segala tindakan dari pihak-pihak yang berkonflik. Apabila Persatuan Bangsa-bangsa berhasil melakukan analisis yang tepat terhadap konflik maka saran dalam resolusi konflik dapat diajukan dengan mudah. Jika Maroko dan Sahara Barat berhasil mencapai kesepakatan penyelesaian konflik baik sepakat untuk referendum kemerdekaan maupun integrasi wilayah, Persatuan Bangsa-bangsa berkewajiban untuk memastikan dan mengawasi segala perjanjian dilaksanakan dengan baik oleh pihak-pihak yang berkonflik secara berkala. Persatuan Bangsa-bangsa baru dapat melepaskan diri konflik ketika situasi perdamaian telah terjaga minimal lima tahun sampai sepuluh tahun setelah kesepakatan damai terbentuk.

Kesimpulan

Konflik wilayah seringkali disebabkan oleh perbedaan pendapat atas suatu wilayah, tidak jelasnya batas-batas wilayah, dan jejak sejarah yang berbeda. Konflik wilayah antara Maroko dan Front Polisario disebabkan oleh perbedaan pandangan terhadap peristiwa masa lalu dan tidak selesainya urusan pembagian wilayah oleh penjajah. Dalam konflik ini, Maroko menginginkan wilayah Sahara Barat menjadi bagian yang terintegrasi dengan Maroko. Sementara, Front Polisario menginginkan adanya referendum kemerdekaan bagi penduduk di wilayah Sahara Barat. Upaya-upaya penyelesaian damai yang dilakukan oleh Persatuan Bangsa-bangsa terus mengalami kegagalan dikarenakan kuatnya konsistensi pihak yang berkonflik atas keinginan wilayah. Persatuan Bangsa-bangsa sebagai pihak netral juga gagal melakukan analisis yang tepat terhadap konflik sehingga

menyulitkan pencapaian perdamaian. Meskipun begitu, Maroko, Front Polisario, Aljazair, Mauritania, dan Persatuan Bangsa-bangsa bersepakat untuk bekerjasama dalam perundingan damai untuk membicarakan persoalan sengketa wilayah ini sekali lagi melalui Roundtable Meeting on Western Sahara. Perundingan damai merupakan salah satu metode resolusi konflik yang paling aman untuk dilaksanakan. Metode ini memungkinkan terpenuhinya kepentingan secara utuh oleh masing-masing pihak yang berkonflik. Hingga saat ini, konflik Maroko dan Front Polisario masih terus berjalan begitu pula upaya resolusi konflik yang perjuangkan oleh Persatuan Bangsa-bangsa

References

- Arifin. (2016). Faktor-faktor keterlibatan Aljazair dalam konflik Maroko-Sahara Barat pada tahun 2000-2013. Yogyakarta, Indonesia: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Cherkaoui, M. (2017). The four-approach dilemma of the Western Sahara Conflict. Washington, DC: Arab Center.
- Kasraoui, S. (2017). Timeline: Western Sahara dispute from 1859 to 2018. Morocco World News. Retrieved from <https://www.moroccoworldnews.com/2017/11/233515/morocco-westren-sahara-polisario/amp/>
- Labac, K. L. (2016). The source of protracted conflict in the Western Sahara. Monterey, CA: Naval Postgraduate School.
- Pruitt, D. G., & Carnavale, P. J. (1993). Negotiation in social conflict. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Company.
- Putra, A. A. G. F. P. (2009). Meretas perdamaian dalam konflik Pilkada Langsung. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 13(2), 172-189.
- Sandi, F. A. (2014). Diplomasi Muhammadiyah di Tengah Pusaran Konflik Mindanao Filipina Selatan. Yogyakarta, Indonesia: Universitas Gadjah Mada.
- Security Council Report. (2019). Chronology of events. Retrieved from <https://www.securitycouncilreport.org/chronology/western-sahara.php>
- Security Council Report. (2019). Monthly forecast. New York, NY: United Nations Security Council
- Sudira, I. N. (2017). Resolusi konflik dalam perubahan dunia. Global: Jurnal Politik Internasional, 19(2), 156-171. <https://doi.org/10.7454/global.v19i2.301>
- Surwandono, & Ahmadi, S. (2011). Resolusi konflik di dunia Islam. Yogyakarta, Indonesia: Graha Ilmu.
- Surwandono. (2012). Menakar resolusi konflik di dunia Islam. Jurnal Hubungan Internasional, 1(1), 27-31. <https://doi.org/10.18196/hi.2012.0003.27-31>
- The North Africa Post. (2019). Mauritanian President supports Morocco's sovereignty over the Sahara. Retrieved from <https://www.northafricapost.com/29846-mauritanian-president-supports-moroccos-sovereignty-over-the-sahara.html>
- Utariah, D. (2006). Konflik internasional. Sumedang, Indonesia: Universitas Padjadjaran.

A REVIEW ON THE NON-DEMARCATION BORDER COOPERATION BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA

Michelle Viandy Huang
Tarumanagara University, West Jakarta
e-mail: michelle.205160116@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Indonesia and Malaysia have established cooperation on various aspects of the border regions for decades. The two countries have ratified the 1984 Security Arrangement Treaty, where the General Border Committee ("GBC") is established to contend the security aspect of the border areas. The GBC also formed a Social Economic Committee of Indonesia and Malaysia, which is called the SOSEKMALINDO, focusing on the social and economic aspects of the border. Meanwhile, there has been the 1970 Agreement on Border Trade ("BTA") that governs the movement of goods in and out of the border and maintain the border's economy. As time goes by, the border cooperation between the two countries has developed, resulting the need to meet the new challenges in terms of border security. While the governments have been emphasizing its focus on economic cooperation, the security challenges are neglected. Hence, this paper provides an analysis on the urgency to reform the 1984 Security Arrangement Treaty due to the overlapping function between the GBC and the BTA.

Keywords: Treaty, Border Security, States Cooperation.

ABSTRAK

Indonesia dan Malaysia telah menjalin kerja sama dalam berbagai aspek wilayah perbatasan selama beberapa dekade. Misalnya, kedua negara telah meratifikasi Security Arrangement Treaty 1984, di mana General Border Committee ("GBC") dibentuk untuk memperjuangkan aspek keamanan wilayah perbatasan. GBC juga membentuk Komite Sosial Ekonomi Indonesia dan Malaysia, yang disebut SOSEKMALINDO. Komite ini berfokus pada aspek sosial dan ekonomi perbatasan. Sementara itu, telah ada Perjanjian 1970 tentang Perdagangan Perbatasan ("BTA") yang mengatur pergerakan barang masuk dan keluar dari perbatasan dan menjaga ekonomi perbatasan. Seiring berjalannya waktu, kerja sama perbatasan antara kedua negara telah berkembang, menghasilkan kebutuhan untuk memenuhi tantangan baru dalam hal keamanan perbatasan. Sementara pemerintah kedua negara menaruh fokusnya dalam kerja sama ekonomi, masalah keamanan masih diabaikan. Oleh karena itu, jurnal ini memberikan analisis tentang urgensi untuk mereformasi Security Arrangement Treaty 1984 atas dasar fungsi GBC dan BTA yang saling tumpang tindih.

Kata Kunci: Perjanjian, Keamanan Perbatasan, Kerjasama Negara

Introduction

In international relation, there is a widely-known concept that establishes the bond between States, these are: actors, interests, and power. These three essential foundation will later form an interaction in a unity, and run the system of international relations. (Slotin & Romita, 2010).

Indonesia, for instance, as an actor that adhere to the ideology of free-active international politics, perform its power by enforcing the right to determine the direction of policies and desires as a sovereign country to meet the nation's interest. By this means, no

State could interfere in Indonesia's international politics. (Putera, n.d.)

In its implementation, national power must be positioned as a bargaining value in order to meet its national interests. Indonesia needs to consider some elements of national power as national force, including military power, politics, geographical conditions, the number and quality of the population, the economy and resources of the country, and the state ideology.

Take the relationship between Indonesia and Malaysia for example. Both States have exercised their power to maintain the territorial sovereignty of each country, which resulted in

the establishment of a 2,019.5 km land border that separates the Indonesian provinces of North Kalimantan, East Kalimantan and West Kalimantan, and the Malaysian states of Sabah and Sarawak. This process of demarcation is then finalized with a legally binding treaties on the latter. This border region could be seen in the below Figure.



Figure 1. Indonesia-Malaysia Land Border.

(Indonesia-Malaysia Land Boundary, n.d.)

However, aside from the demarcation of boundaries between Indonesia and Malaysia, there are still a lot of cross-border issues that have to be settled by actuating the three essential concepts of international relations. In this sense, the issues throughout this border areas cover a wide range of aspects, especially in terms of border security, economic, social, cultural and other sectors which are very closely related.

Firstly, in terms of the economic aspect, the most occurring issue relates to the connectivity of the people living in the border areas. For instance, bordering States cooperate to govern the trading policies between the local communities, as well as matters relating to the entry or exit of goods between the bordering countries.

Secondly, concerning the security aspect of the border regions, it originally focuses on the defense instruments of a State to safeguard its sovereignty from threats and communism. However, in the present regime, these issues are not relevant anymore, taking into account the

rapid development of all aspects around the world. Now, security issues mostly revolve around transnational organized crimes, as well as human or goods smuggling and trafficking. (Rizki & Merdekawati, 2019)

These trafficking issues are developing at an exponential rate, and could only be eradicated by enhancing the law enforcement instruments to impose regulations relating to customs, immigration, and quarantine throughout the border regions.

Thirdly, the social and cultural aspect of the border regions covers the field of education, work, and other related matters. From this aspect, the most common issue that arises is concerning the trafficking and smuggling of illegal labor force.

From this, we could see that the aforementioned aspects are interrelated to each other to some extent, therefore, a clear distinction must be made. It is highly significant for each aspect to be regulated respectively due to the related issues, through the establishment of a joint cooperation between Indonesia and Malaysia.

Essentially, the two States have first showed their priority to strengthen the economic aspect of the border regions by establishing the Basic Arrangement of Trade and Economic Relations back in the 1967. This agreement is then followed by the adoption of the 1970 Agreement on Border Trade (“**BTA**”).

In 1972, both States begin to establish a cooperation on the security aspect by adopting the 1972 Agreement on Border Security, which is then amended into the 1984 Security Arrangement on the Border Regions Treaty (“**SA 84**”). In addition, the Border Crossing Agreement is correspondently adopted in 1984 to overview the social and cultural aspect for the people crossing the border.

Under the SA 84, the General Border Committee (“**GBC**”) was established to carry out the function of the treaty itself. It has been given the discretion to establish permanent or ad-hoc committee to uphold Customs, Immigration, Quarantine, and Security aspects (“**CIQS**”) with such terms of references “for the purpose of looking into any particular matter

which may affect stability and resilience in the Border Regions.” (Minister of Defence Indonesia and Malaysia, 1984)

However, the GBC established several bodies that leans more toward the military aspect rather than security. Moreover, it also established a Social Economic Ad-Hoc Committee to enforce the economic aspect of the GBC, which particularly have the same function with the Border Trade Agreement that also focuses on the economic aspect of the Border Region.

The irony is, even if the treaty is called Security Arrangement, no single body established under the treaty is enforcing the security aspect of the border. The lack of law enforcement officers from both countries leads to an ineffective and overlapping structure established by the joint cooperation between Indonesia and Malaysia.

In the present condition, throughout the border regions, the cross-border traffic is crowded with legal and illegal migrants entering and exiting Indonesia and Malaysia. Even with the presence of the Indonesia-Malaysia GBC, the function of current physical border markers are often still disregarded by the locals as there is no legal enforcement, and that the high rate of human and goods smuggling and trafficking are inevitable (Rizki & Merdekawati, 2019). This high rate is proven by the IOM 2005-2010 data, which shows that the border in Indonesia-Malaysia, especially in Entikong, ranks second in the 12 highest regions of human trafficking cases, with 722 cases or 19.33 percent from the total trafficking cases (Wismayanti, 2012).

This crime and violation clearly shows that the implementation and the purpose of the security arrangement treaty failed and it created a gap between the *das sollen* and *das sein* that needs to be further evaluated. Both States as actors in the international relations, therefore, should focus on the safety of communities in the border regions as their national interest, and thus strengthen their cooperation particularly on these issues.

Therefore, based on the description above, the problems raised by the author in this article consist of (a) How effective is the Non-

Demarcation Border Cooperation between Indonesia and Malaysia? And (b) What steps should be taken to restructure the General Border Committee of Indonesia and Malaysia?

Literature Review

In this part, the author will firstly elaborate the theories used to find the result of this research, stipulate it in a scheme of thought, and explain the outcomes.

Before proceeding to the comparison and evaluation of the main issue in this paper, there are two grand theory that the author took as the basis of this research, which is the Theory of Law Reform and Migration-Security Theory.

Theory of Law Reform

In the general term, there is yet a precise definition on law reform. For legal purposes, it could be interpreted as “improving law” or “make law better”. It has been pointed out that “if there is no pre-existent law on a particular topic then it is arguable that one cannot logically have law reform”. (Hurlburt, 1986)

Farrar (1974), however, presents a limitation on this law reform to the extent that it “comprehends reform of the substance and the form of the law and the institutions of the legal system.” But we know for sure, that the purpose of law reform is to assess if an existing law is still applicable to the present situation, or needs to be changed or amended in the legal system, with the aim of enhancing justice or efficiency.

For instance, the substance of a treaty adopted back in the 80’s contains the spirit of economic or political spheres being faced by the State in that era. Most likely, it does not have the same urgency to the present national interest.

While some understand that law reform only exists and could be done in a sovereign State, international law also able to accommodate the needs of law reform of bordering States, or even in the multilateral level.

Therefore, the concept of law reform needs to be inferred as a mean for States to develop and to act in conformity with the development of the world, as well as to eliminate threats being challenged in the present regime.

Theory of Migration-Security

Moving on to the second theory, which is the theory of Migration-Security, the author would like to breach each terms first. Security is a core value of human life. To be secure is to be untroubled by danger or fear. Policies taken to ensure national security may be of an economic, political or military nature. They may be either internally or externally directed. (Jackson-Preece, 2011)

International migration is probably one of the most cited, yet also most contested, areas of the so called new security agenda, which emerged at the end of the Cold War, and resulted in a broadening and deepening of our understanding of what constitutes a security threat or challenge. (Wohlfeld, n.d.)

Migration tends to be viewed as a security issue in security studies since the 1980s. The duality of threats apparently caused by migration to both national sovereignty and human security are largely reflected in much of the recent academic literature. (Thompson, 2013)

This large movement of persons and goods are caused by globalization. Globalization has placed the state in a new kind of environment, one in which seeks to recruit labour in its bid to remain competitive, but anxious about the kinds of threats that can move amidst these flows.

However, not all type of migration constitutes security issues. Migration can be distinguished into regular and irregular migration. Regular migration means that individuals or groups legally enter or exit a country in accordance with the requirements established by that country. On the other hand, irregular migration is unauthorized entry or exit from one country to another, which poses security threat to the country. Officially defined, this irregular migration is referred by the International Organization for Migration (“IOM”) as: “movement that takes place outside the regulatory norms of the sending, transit, and receiving country”. (International Organization for Migration, 2019)

These irregular migration constitutes a high risk of human smuggling and trafficking. Smuggling and trafficking of persons, clearly exists and acknowledged as a threat to the security of an individual, that of political entities as well as regional and international security.

Hence, irregular migration must be abolished by States, by establishing a joint cooperation in the border regions and strengthening the supervision of the movement of people and good.

Research Method

The nature of this research is prescriptive, where this research is giving out prescriptions about what should be the essence of this research, because that is why research is conducted. (Fajar & Achmad, 2010)

Based on the research method used, the data collection technique used is the study of documents or literature study conducted through the collection of materials and data. In addition, if necessary, data collection techniques can be done through interviews with relevant parties.

After the data and materials are collected, in normative research, data processing is carried out in such a way as to systematize written legal materials. In this case the processing of materials is carried out by means of selecting materials, then classifying according to the classification of materials and compiling the material of the research results systematically, of course this is done logically, meaning that there is a relationship and the relationship between material one with other materials to get a general picture of the results of research. (Fajar & Achmad, 2010)

This study uses the study of material by means of deductive logic. Peter Mahmud Marzuki who quoted the opinion of Philipus M. Hadjon, explained about the deduction method as syllogism taught by Aristotle. The use of deduction method originates from the submission of a major premise. Then a minor premise is submitted, from the two premises it is then drawn a conclusion. (Fajar & Achmad, 2010)

The next steps used in conducting research are:

- Identifying facts and eliminating things that are not relevant to determine the issues to be solved;
- Collection of materials;
- Examine the issues raised based on the material that has been collected;
- Draw conclusions in the form of arguments that answer the issues;
- Give a prescription based on the argument that has been built in the conclusion.

Conceptual Framework of Research

Now for the main topic for this paper entitled “A Review on the Non-Demarcation Border Cooperation between Indonesia and Malaysia”, the author will deliver it into a scheme of thought as follows:

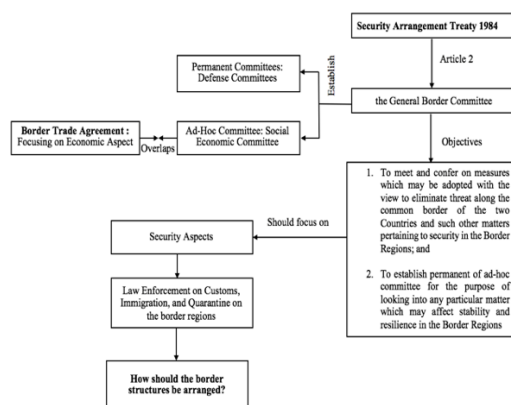


Figure 2. Relationship between Security Arrangement Treaty and Border Trade Agreement.

Firstly, back in 1974, Indonesia and Malaysia have agreed upon the adoption of SA Treaty for the purpose of contending border security aspects in the border regions. From this bilateral treaty, the General Border Committee (“GBC”) is established to carry out the function of the treaty itself.

If we refer to Article 2 of the SA Treaty, the terms of reference of the GBC is to meet and confer on measure which may be adopted to eliminate threat along the common border of the

two Countries and such other matters pertaining to security in the Border Regions.

To carry out its function, the GBC may formulate working procedural matters to be adopted by the GBC or any Committee established by it, and they shall hold its meeting at least once a year alternately in Indonesia and Malaysia.

In addition, the GBC has also been given the discretion to establish permanent or ad-hoc committee with such terms of references “for the purpose of looking into any particular matter which may affect stability and resiliency in the Border Regions.” (Rizki & Merdekawati, 2019) The structure of the present GBC is enacted in the illustration in Figure 1 as follows.

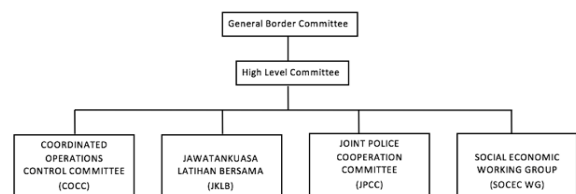


Figure 3. GBC Structure (Hudori, n.d.)

Meanwhile, the BTA is established in 1970, to support the implementation of Article XI of the 1967 Treaty, relating to the movement of goods into and out of the Border Areas of Indonesia and Malaysia. (Minister of Defence Indonesia and Malaysia, 1970)

Pursuant to the preamble of the BTA, both countries agreed that the objective of this agreement is to establish a procedure to govern the conduct of border trade between the two Countries. This agreement classifies the border trade into two regions: the overland (or land) border trade and the sea border trade. In this paper, the author focuses solely on the overland border trade to provide an apple-to-apple comparison with the bodies established under the Security Arrangement Treaty.

Under the overland border trade provision enacted in Article II of the BTA, the BTA governs that every movement of goods into and out of Malaysian border area shall pass through a Malaysian Border Control Post, and equally, every movement of goods into and out of Indonesian border area shall also pass through

an Indonesian Border Control Post. These movement of goods in and out of the borders are monitored by a forum called the Joint Working Group on BTA.

Next, the concept of security along the border in the early years after independence tends to focus on the military aspects to defend and eliminate communist threats. However, this view is not in line anymore with the present situation.

Now, security cooperation has the purpose to support the acceleration of economic growth, social progresses, and cultural developments (ASEAN Political-Security Community (APSC), n.d.). Thus, this shall cover the law enforcement which has the scope of customs, immigration, and quarantines ("CIQ"). (ASEAN Defence Ministers, n.d.) These aspects are present to prevent and repress the practice of smuggling and trafficking, which are prone to occur along the borders between two countries. (Napier-Moore, 2011)

To begin, under the Indonesia Ministry of Transportation Regulation No. 61 of 2015, customs is defined as:

"every matter related to the supervision of the traffic of goods entering or exiting customs areas as well as collection of import duties, export duties and other state levies which become an integral part of the import or export process."

This regulation on customs need to also be effectively implemented in the border regions, by the authorized State officials. Currently, the enter and exit of goods in the Indonesia-Malaysia Border regions are not supervised effectively. (Wismayanti, 2012) An improved enforcement on the movement of goods will reduce the rate of goods trafficking and/or smuggling, such as narcotics, guns, and other illegal substances in the border areas.

Meanwhile, immigration concerns about the traffic of people (or migrants) entering or leaving the territory of a State. Migrants could be classified as: voluntary or forced migrants, which also includes, but not limited to, human trafficking and smuggling. These type of migrants are often found at the borders of a State. Therefore, state officials shall strictly

monitor and take any action to repress the acts to effectively reduce the number of human trafficking and smuggling. (International Organization for Migration, 2019)

Next, to control the spread of disease within State borders, states have laws on Quarantine. In Indonesia's legislation, the concept on quarantine is limited to animal, fish, and plant. Generally, this concept of quarantine aims to prevent the spread of cross-border diseases through the movement of goods or people in and out of the countries.

The security aspect covers all of the CIQ concepts above, and this could be implemented by first enhancing the law enforcement instruments. Therefore, it is highly essential for border-sharing States to conduct a joint border cooperation to safeguard the aforementioned CIQ aspects, through effective joint cooperation forums.

Border Cooperation Restructuring

Based on the above description on the non-demarcation border cooperation between Indonesia and Malaysia, the following section will provide a particular analysis on the Agreement on Border Trade and the security Arrangement on the Border Regions Treaty as mentioned.

The Social Economic Committee established under the GBC has the same focus with the Joint Working Group on BTA, where both forums aim their attention on the economic flow throughout the Border Region.

A significant issue will arise when there is an overlapping policy adopted by the Social Economic Committee and the Joint Working Group on BTA. Which body shall prevail in governing the border trade if the Ministers of Internal Affairs adopt a policy that clashes with the one adopted by the Ministers of Trade?

This question indicates that there is an ineffective work scope of both forums, and there is no clear distinction to separate the functions of the two forums. This existence of Social Economic Ad-hoc Committee and BTA hand-in-hand creates a dualistic paradigm in the economic aspect of the border region.

In light of this, the present structure of organization under the SA Treaty and the BTA constitutes a complexity, which causes a diversion in the work scope of each forum, thus leading to the lack of effectivity in the implementation of the border aspects.

To support this statement, it could be seen that the existence of Social Economic committee overlaps with the function of the BTA, as both bodies focuses solely on the border trading and other economic aspects in the border regions. This creates a dualism in the joint cooperation between Indonesia and Malaysia.

On the other hand, from the defense and security perspectives, it is critical to draw more intensive attention to border security issues. Whereas, border security issues in general are more of a supporting element for the law enforcement in the CIQ concept. (MA, n.d.)

In this case, the existing bodies have yet been able to accommodate the CIQ concept on the border regions. The enforcement of the CIQ concept in the security aspect has to be further assessed by the GBC. This is because the current organization structure aside from the Social Economic Committee (namely: Coordinated Operations Control Committee, Jawatankuasa Latihan Bersama, Joint Police and Cooperation Committee) tends to reflect more on the military or defense aspect of the border regions, which mostly covers military trainings activities. (Minister of Defence Indonesia and Malaysia, 1970)

Therefore, to enhance the development of CIQ policies to be governed in the border areas, it is essential for the State apparatus to formulate a strategy or to construct a new arrangement with a purpose to strengthen the legal policies and instruments. There is an essential need for Indonesia and Malaysia to conduct a restructuration on the committees established under the GBC.

That being said, the non-demarcation organization structures particularly under the SA Treaty and the BTA between Indonesia and Malaysia needs to be restructured in order for it to be effective in the implementation, and to prevent a further overlap of tasks.

There are several steps that have to be taken to restructure of Border Cooperation organization between Indonesia and Malaysia, in order to make the traffic control in the border regions be more effective.

Firstly, the two countries need to withdraw the Social Economic Ad-hoc Committee from the GBC structure, and to establish it under the BTA. By doing this, the Ministers of Defense and National Armies of both Countries in charge of the GBC will divert its focus solely on the security aspect of the border regions, and thus, they would not be required to handle social economic issues anymore.

Secondly, a new agreement between the two countries is essential to govern the military or defense aspect of the border regions. In light of this, the forums under the High Level Committee which reflect more on the military aspects shall be shifted to the new agreement.

Finally, under the SA Treaty, the GBC shall establish a renewed set of integrated forums that exclusively concentrate on the CIQ concept to effectively enforce the security aspect of the border regions, which has not been implemented at the moment.

In sum, there will be no more overlapping aspects between the two agreements. The GBC will govern the aspects relating to security, and the BTA will be in charge on the Economic aspects. This restructuration will create a clear distinction for each forum to conduct each of their functions, and that this kind of certainty will also provide an assurance to the local communities in the border regions.

Conclusion

Indonesia and Malaysia have cooperated for decades on the security, economic, social, and cultural aspects of the borders, and succeeded to establish several non-demarcation organizations.

Since the adoption of the SA Treaty by Indonesia and Malaysia, the GBC established the Social Economic Ad-hoc Committee, which according to the author is not at all necessary, as it shift the main objective of the SA Treaty to safeguard the security aspects, into governing the economic aspects of the border regions.

Furthermore, the existence of this ad-hoc committee overlaps with the function of the BTA, that focuses solely on the border trading and other economic aspects in the border regions. Thus, this creates a dualism in the joint cooperation between Indonesia and Malaysia.

In this regard, it is ironic that the security aspects to be enforced in the border region itself are yet to be seen. There is no doubt that this overlapping bodies constitutes a danger to the national security of both countries. In the present day, medias provided data reports that indicates the relatively high rate of smuggling and trafficking in the border regions.

To focus on the security aspects of the border regions, there is a need to conduct a restructuration on the committees established under the GBC itself. This is essential for implementing the nature of the SA Treaty, and to enforce all aspects of security, the CIQS, on the border regions by the suitable law enforcement officers.

In addition, the Social Economic Ad-hoc Committee shall be taken out of the structure of the GBC, and it may be better to be established under the BTA, so that there will be no more overlapping aspects between the two agreements.

Hence, the bodies under GBC will govern the aspects relating to security, and the BTA will be in charge on the Economic aspects in the border regions. This restructuration will create a clear distinction for each bodies to conduct each of their functions, and that this kind of certainty will also provide an assurance to the local communities in the border region.

References

- Arsana, I. M. A. (2011, October 20). Understanding border issues in Camar Bulan, Tanjung Datu. The Jakarta Post. Retrieved from <http://www.thejakartapost.com/news/2011/10/20/understanding-border-issues-camar-bulan-tanjung-datu.html>
- ASEAN Defence Ministers. (2019). Draft concept paper on the role of ASEAN defence establishments in border management. Retrieved from http://www.aseanhai.net/english/ewt_news.php?nid=2881&filename=index.
- ASEAN Political-Security Community (APSC). (2018). 32nd ASEAN Summit. Retrieved from <https://asean.org/storage/2019/01/32.-November-2018-Fact-Sheet-on-APSC1.pdf>.
- Farrar, J. (1974). Law reform and the law commission. London, UK: Sweet & Maxwell.
- Hudori, M. (2019). Technical policy for deconcentration implementation of assistance to implement country coordination in regional countries and infrastructure development duties and border areas. Ministry of Home Affairs.
- Hurlburt, W. H. (1986). Law reform commissions in the United Kingdom, Australia, and Canada. Edmonton, Canada: Juriliber.
- Indonesia and Malaysia. (1970). Agreement on border trade.
- Indonesia and Malaysia. (1984). Security arrangement on the border regions.
- Indonesia and Malaysia Land Boundary. (N.d.). Sovereign limits. Retrieved from <https://sovereignlimits.com/boundaries/indonesia-malaysia>
- Indonesia Law No. 16 of 1992 on Animal, Fish, and Plant Quarantine. (1992). Retrieved from <https://karantina.pertanian.go.id/hukum/index.php>
- Indonesia-Malaysia Land Boundary (N.d.). Sovereign limits. Retrieved from <https://sovereignlimits.com/boundaries/indonesia-malaysia>.
- Irregular Migration. (2011). International Organization on Migration: 2011. Retrieved from <https://migrationdataportal.org/themes/irregular-migration#data-sources>.
- International Organization for Migration. (2019). Glossary on migration. IML Series No. 34. 2019.
- Jackson-Preece, J. (2011). Security in international relations. London, UK: University of London International Programmes.
- Jakarta Post. (2018, April 6). Drugs smuggling through Indonesia-Malaysia border in Kalimantan thwarted. Retrieved from <https://www.thejakartapost.com/news/2018/04/06/drugs-smuggling-through-indonesia-malaysia-border-in-kalimantan-thwarted.html>
- Khadafi, M. (2018). Menhan RI dan Malaysia pimpin GBC Malindo ke-41. Retrieved from <https://www.timesindonesia.co.id/read/189858/20181115/162310/menhan-ri-dan-malaysia-pimpin-gbc-malindo-ke41/>
- Mukti, F., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Napier-Moore, R. (2011). Smuggling and trafficking intersections. Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW).
- Nordin, A. F. (2008). Land and river boundary demarcation and maintenance – Malaysia's experience. Working paper at International Symposium on Land and River Demarcation and Maintenance in Support of Borderland Development.
- Putera, E. W. (2019). Esensi hubungan internasional dan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
- Rizki, M., & Merdekawati, A. (2019). The significance of boundary construction at land border between Indonesia-Malaysia. The 1st ICSEAS 2019.

- Slotin, J., Wyeth, V., & Romita, P. (2010). *Power, politics, and change: How international actors assess local context*. New York, NY: International Peace Institute. Retrieved from https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/publications/ipi_rpt_power_politics_pdf_epub.pdf
- Thompson, C. (2013). *Frontiers and threats: Should transnational migration be considered a security issue?* *Global Policy Journal*. Retrieved from <http://www.globalpolicyjournal.com/blog/20/11/2013/frontiers-and-threats-should-transnational-migration-be-considered-security-issue>.
- Wimayanti, Y. F. (2012). *Perlindungan anak berbasis komunitas di wilayah perbatasan; penelitian aksi di desa Entikong, Kec. Entikong, Kab. Sanggau Kalimantan Barat*. *Jurnal Sosiokonsepsia*, 17(1), 1-17. <https://doi.org/10.33007/ska.v17i1.811>
- Wohlfeld, M. (2014). *Is migration a security issue?*. In O. Grech, & M. Wohlfeld (Eds.), *Migration in the Mediterranean : Human rights, security and development perspectives* (pp. 61-77). Msida: Mediterranean Academy of Diplomatic Studies. Retrieved from <https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/21715>

**ANALISIS EKSPOR DAN IMPOR LIMBAH PADAT ANTARA CINA DAN AMERIKA
SERIKAT: *OPERATION GREEN FENCE* (2013) DAN *OPERATION NATIONAL
SWORD* (2018)**

**ANALYSIS OF SOLID WASTE EXPORT AND IMPORT BETWEEN CHINA AND
THE UNITED STATES: *OPERATION GREEN FENCE* (2013) DAN *OPERATION
NATIONAL SWORD* (2019)**

Meilisa Setyani
Universitas Pelita Harapan, Tangerang
Email: meilisasetyani_mei@rocketmail.com

ABSTRACT

China is a country that is famous for its rapid economic growth which was influenced by the purchase of solid waste from neighboring countries. The act of purchasing solid waste from neighboring countries was conducted in order to support industrial and manufacturing activities in the country. However, over the years the purchase of solid waste has caused many losses to Chinese countries. China then enforces the Operation Green Fence (OGF) and Operation National Sword (ONS) policies. In that case, this study was done to answer any factor that caused China to enforce both policies, as well as the economic impact that resulted from the policy. The study uses qualitative approaches, case study methods, and literature study techniques to analyze the data obtained. The results of this research shows that environmental factors are the main factors that bring out other factors such as health, as well as domestic and foreign pressures. The impacts resulted from both policies also affects the economy not only between China and the United States of America, but also internationally. The number of demand and supply of solid waste around the world, particularly in China and United States is affected, as the policy imposed is a policy to restrict the import of solid waste done by China.

Keywords: Operation Green Fence, Operation National Sword, environmental pollution, China

ABSTRAK

Cina adalah negara yang terkenal dengan pertumbuhan ekonominya yang pesat, yang dipengaruhi oleh pembelian limbah padat dari negara tetangga. Tindakan pembelian limbah padat dari negara tetangga dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan industri dan manufaktur di negeri ini. Namun, selama bertahun-tahun pembelian limbah padat telah menyebabkan banyak kerugian bagi negara-negara Cina. Cina kemudian memberlakukan kebijakan *Operation Green Fence* (OGF) dan *Operation National Sword* (ONS). Dalam hal ini, penulisan artikel ini dilakukan untuk menjawab faktor apa yang menyebabkan Cina memberlakukan kedua kebijakan tersebut, serta dampak ekonomi yang dihasilkan dari kebijakan ini. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode studi kasus, dan teknik studi literature untuk menganalisis data yang diperoleh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan adalah faktor utama yang membawa keliar faktor lain seperti kesehatan, serta adanya tekanan dari dalam maupun dari luar negeri. Dampak yang dihasilkan dari kedua kebijakan ini mempengaruhi perekonomian yang tidak hanya di antara Cina ataupun Amerika Serikat, tetapi juga internasional. Jumlah permintaan dan penawaran atas limbah padat di seluruh dunia, khususnya di Cina dan Amerika Serikat terpengaruh, mengingat kebijakan yang diberlakukan adalah kebijakan untuk membatasi impor limbah padat yang dilakukan oleh Cina.

Keywords: *Operation Green Fence*, *Operation National Sword*, pencemaran lingkungan, Cina

1. Pendahuluan

Cina merupakan negara yang terkenal dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Namun sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan warga

negaranya sangatlah terbatas. Dalam rangka memenuhi kebutuhan warga negaranya yang terbatas tersebut, pada tahun 1980-an, Cina mulai memberikan izin kepada perusahaan-perusahaannya untuk mengimpor limbah

padat dari negara lain. Usaha industri daur ulang limbah khususnya plastik yang digeluti banyak perusahaan di Cina pernah menjadi bisnis yang cukup menguntungkan bagi Cina karena pada dasarnya limbah plastik tersebut dijual kembali setelah didaur ulang dengan harga yang tinggi (Purwaningrum, 2018). Terlebih lagi harga limbah plastik yang dibeli dari luar negeri harganya jauh lebih murah dengan kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan dengan limbah plastik di dalam negeri.

Permasalahan pun berlanjut dimana semakin berkembangnya zaman, dunia *fashion* semakin berkembang ke tingkat yang membuat polusi limbah semakin parah. Bahan-bahan dari baju, celana ataupun sepatu bukan lagi terbuat dari benang, kain, maupun kulit melainkan bahan sintetis, yang semakin sulit untuk didaur ulang. Sehingga pemrosesan bahan-bahan ini akan memakan waktu dan juga biaya yang besar.

Tujuan mendaur ulang adalah untuk menggunakan kembali barang yang masih bisa dipakai agar dapat mengurangi polusi ataupun limbah yang ada. Namun, tidak semua limbah padat dapat didaur ulang. Limbah yang diterima oleh Cina tidak dipilah dengan baik terlebih dahulu oleh pihak pengekspor. Hal ini menyebabkan seluruh macam limbah padat baik yang dapat didaur ulang maupun yang tidak dapat didaur ulang akan berakhir di Cina.

Limbah yang tidak dapat didaur ulang, cenderung harus dimusnahkan oleh Cina, dengan cara dibuang ke laut atau dibakar. Pemusnahan limbah ini berdampak serius pada lingkungan Cina. Penanganan limbah yang salah telah menjadikan Cina sebagai negara utama yang mencemarkan lingkungan di dunia (Sebayang, 2018). Pembakaran yang dilakukan di Cina pun telah menyelimuti udara di negaranya dengan asap beracun.

Menurut hasil studi *University of Georgia*, Cina menjadi negara dengan konsumen plastik terbesar di dunia. Tahun 2010, Cina diperkirakan menyumbang sebanyak 3,53 juta metrik ton sampah plastik

pertahunnya. Cina pun menjadi negara penyumbang limbah ke laut terbesar di dunia. Pencemaran yang terjadi pun dapat berdampak pada ekosistem laut karena limbah-limbah yang dibuang tersebut cenderung memiliki zat-zat beracun yang berbahaya bagi makhluk hidup di dalam laut (McCarthy, 2019).

Cina pun menilai permasalahan lingkungan ini menjadi isu yang penting untuk dicari solusinya. Cina telah menjadi “Tempat Pembuangan Sampah” selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Negara-negara yang paling banyak berkontribusi dalam pengiriman limbah ke Cina diantara lainnya adalah Amerika Serikat (AS), Inggris, Uni Eropa, dan Jepang.

Pada tahun 2013, Presiden Xi Jinping pun membuat suatu kebijakan yang disebut sebagai *Operation Green Fence* (OGF), sebagai upaya pemerintah Cina bersama dengan pihak bea cukai untuk lebih ketat dalam memeriksa kontainer-kontainer yang masuk ke wilayah Cina melalui pelabuhan yang isinya adalah limbah asing.

Tahun 2017, Pemerintah Cina kembali membuat suatu rancangan kebijakan yang disebut sebagai *Operation National Sword* (ONS). Kebijakan ini memberikan larangan impor terhadap 24 kategori limbah padat yang mulai berlaku pada 2018. Cina pun memperluas kategori tersebut menjadi 32 kategori. Kategori tersebut diantara lainnya adalah plastik, kertas, tekstil, kayu, *stainless steel*, titanium, bagian mobil, serta perangkat keras berupa alat-alat elektrik dan elektronik.

Dari permasalahan yang telah diutarakan, penulis menemukan dua pertanyaan penelitian yang penulis jadikan sebagai acuan dalam penulisan artikel ini. Dua pertanyaan tersebut yakni: Faktor apa yang menyebabkan Cina merumuskan kebijakan *Operation Green Fence* dan *Operation National Sword* setelah bertahun-tahun menjadi negara importir limbah terbesar di dunia?, dan Bagaimana kebijakan ini berdampak bagi perekonomian yang

terkait dengan ekspor dan impor limbah padat di antara Cina dan Amerika Serikat?

Tinjauan Pustaka

Larangan Impor

Larangan impor yang diberlakukan oleh Cina, termasuk ke dalam salah satu tindakan yang berhubungan dengan perdagangan seperti kebijakan-kebijakan yang membatasi perdagangan, tarif, dan juga pembatasan transaksi keuangan yang terjadi di antara negara. Hal ini pun menjadi pengertian secara umum dari sanksi ekonomi. Menurut Smeets, tindakan seperti boikot dan embargo adalah salah satu tindakan yang termasuk sebagai larangan impor. Boikot merupakan suatu tindakan penolakan untuk membeli barang maupun jasa dari pihak yang menyuplai. Sedangkan embargo adalah pembatasan suplai barang dan jasa yang dilakukan oleh penyuplai ke pihak pembeli. Smeets pun menambahkan bahwa sanksi ekonomi penerapannya lebih diarahkan untuk kepentingan politik suatu negara (Smeets, 2018).

Drezner dalam studinya, menambahkan bahwa negara yang diberikan sanksi dapat mengalihkan ekspornya ke negara lain atau yang disebut sebagai negara ketiga dan kemudian memotong kontrol dari pihak bea cukai (Drezner, 2000).

Namun studi yang dilakukan oleh Smeets maupun Drezner tidak sama dengan studi yang dilakukan oleh penulis. Meskipun larangan impor yang diberlakukan oleh Cina masih termasuk dalam ruang lingkup sanksi ekonomi berupa boikot, terdapat perbedaan-perbedaan yang membedakan studi yang dilakukan Smeets dan Drezner dengan studi yang dilakukan oleh penulis. Larangan impor yang diberlakukan oleh Cina bukan ditujukan untuk kepentingan politik seperti yang dinyatakan oleh Smeets. Larangan impor yang diberlakukan oleh Cina ditujukan untuk kepentingan yang menyangkut lingkungan hidup dan kelangsungan hidup dari rakyat negara Cina.

Hal ini pun sesuai dengan arti dari kata sanksi yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam

KBBI, sanksi berarti sebuah tangguhan atau tindakan atau hukuman kepada perseorangan atau negara yang tujuannya adalah untuk memaksa pihak yang dituju untuk menaati ketentuan-ketentuan tertentu. Namun, sifat dari larangan impor yang diberlakukan oleh Cina bukanlah suatu hukuman. Mengingat kebijakan larangan impor yang diberlakukan oleh Cina berfokus kepada kepentingan lingkungan hidup di dalam negerinya.

Selain sifatnya yang bukan berupa hukuman, kebijakan larangan impor oleh Cina juga bersifat non diskriminatif. Hal ini sesuai dengan aturan dalam *World Trade Organization* (WTO), dalam buku berjudul *Sekilas WTO* yang ditulis oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Dalam buku dijelaskan bahwa negara yang saling melakukan perdagangan, apabila ada salah satu pihak yang merasa yakin bahwa tindakan dagang yang dilakukan negara lain tersebut telah merusak lingkungan hidupnya, maka negara yang lingkungannya rusak tersebut dapat melakukan tindakan untuk melindungi lingkungan hidupnya. Namun negara tersebut tidak boleh melakukan diskriminasi, sehingga seluruh tindakan atau ketentuan yang diterapkan atas impor dari suatu negara harus juga diterapkan pada negara lainnya.

Hal ini pun yang sekaligus menyangkal pernyataan yang dinyatakan oleh Drezner. Cara memotong kontrol dari bea cukai dengan mengalihkan limbah ke negara ketiga untuk dikirim ke Cina tidak dapat dilakukan sesuai dengan pernyataan oleh Drezner. Mengingat kebijakan yang diterapkan oleh Cina merupakan kebijakan non diskriminatif yang berarti kebijakan ini tidak hanya berlaku pada negara tertentu, namun terhadap seluruh negara.

Dampak Larangan Impor Terhadap Perekonomian

Ying dalam jurnalnya meyakini bahwa negara-negara maju khususnya yang terkena dampak dari kebijakan larangan impor oleh Cina telah melakukan upaya-upaya dalam mengurangi limbah

domestiknya. Namun cara yang dinilai lebih efisien untuk menggantikan posisi Cina sebagai importir adalah dengan cara mencari negara lain. Mengingat untuk membangun industri daur ulang yang baru akan memakan waktu dan juga biaya yang besar. Ying pun menambahkan bahwa setelah kebijakan OGF dan ONS berlaku, banyak pengiriman limbah padat yang beralih ke negara-negara yang ada di kawasan Asia khususnya Asia Tenggara dan India (Ying, 2019).

Ying pun dalam studinya mengutip Workman dan Vejpongse yang menyatakan bahwa Indonesia sejak April 2018 telah melakukan 100% inspeksi terhadap limbah kertas dan plastik yang masuk ke wilayah Indonesia. Thailand pun juga menyatakan bahwa negaranya menerapkan larangan impor sementara terhadap limbah plastik. Malaysia pada Oktober 2018 pun ikut membatasi masuknya limbah plastik dengan cara menerapkan pajak impor atas komoditas tersebut.

Dalam studinya, Ying tidak menyebutkan dampak ekonomi apa yang dihasilkan dari kebijakan larangan impor limbah padat oleh Cina, serta dampak ekonomi apa yang dapat diperoleh bagi negara-negara yang menerima pengalihan limbah dari negara-negara maju.

Dalam skripsi milik Sanubari, Sanubari menyimpulkan bahwa terjadinya perang dagang antara Cina dan AS dipicu oleh diberlakukannya kebijakan larangan impor limbah padat oleh Cina pada tahun 2018 (Sanubari, 2019).

Sanubari berargumen bahwa Presiden AS, Donald Trump memberikan kebijakan tarif kepada Cina karena AS merasa telah mengalami kerugian ekonomi setelah Cina memberlakukan kebijakan larangan impor. Sanubari pun juga menambahkan kutipan data yang diperolehnya dari *US-China Economic and Security Review Commission* (USCC) bahwa Cina tidak hanya merugikan beberapa pihak namun telah berdampak pada industri lokal dan juga setidaknya sebanyak 40.000 pekerja terancam kehilangan mata pencahariannya.

Sanubari pun menyimpulkan bahwa Trump memberlakukan kebijakan tarif untuk melindungi pekerja lokal di AS, serta menutup kerugian yang diterima oleh AS sehingga perdagangan yang terjadi di antara AS dan Cina tetap menguntungkan.

Namun, hal ini bertentangan dengan pendapat penulis yang melihat bahwa perang dagang yang terjadi antara Cina dan AS bukan dipicu oleh kebijakan larangan impor oleh Cina. Sebelum Trump menjabat jadi Presiden AS, Trump sudah menunjukkan sentimennya terhadap negara Cina karena Cina telah merebut identitas AS sebagai negara dengan perekonomian terbesar. Trump pun telah melayangkan beberapa tuduhan terhadap Cina semenjak Trump melakukan kampanye untuk menduduki jabatan sebagai Presiden AS.

Menteri Luar Negeri Cina pun menyatakan bahwa kebijakan yang diberlakukan oleh Cina merupakan kebijakan non diskriminatif yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di negara Cina (Xinhua, 2018). Hal ini menyimpulkan bahwa kebijakan larangan impor oleh Cina tidak ditujukan khusus kepada AS ataupun dengan tujuan untuk merugikan negara manapun sehingga kebijakan larangan impor oleh Cina bukan menjadi pemicu terjadinya perang dagang antara Cina dan AS.

Dampak Larangan Impor Terhadap Industri Daur Ulang

Cina yang sejak lama telah memulai proses industrialisasi, membutuhkan banyak sekali bahan baku dengan harga yang murah dan dengan kualitas yang baik. Kebutuhan tersebut menyebabkan banyak warga negara di Cina beralih profesi menjadi pengumpul sampah. Pengumpul sampah ini disebut sebagai para pekerja di sektor informal industri daur ulang. Pekerja-pekerja ini menggunakan alat atau teknologi yang masih sangat tradisional dalam rangka memilah atau mendaur ulang berbagai jenis limbah.

Karlsen dalam *thesis*-nya menyatakan bahwa pada tahun 2014,

setidaknya ada sekitar 3,3 juta – 5,6 juta orang di Cina termasuk dalam sektor informal. Hal ini dikarenakan profesi pengumpul sampah yang dianggap sebagai pekerjaan yang menjanjikan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari pekerjaanya (Karlsen, 2019).

Pada *thesis* milik Edwards yang berfokus pada daur ulang limbah elektronik dan elektrik, dinyatakan bahwa sektor informal mendapatkan keuntungan yang besar saat menjual sampah elektronik ke pendaur ulang dibandingkan menjualnya secara utuh ke pasar barang bekas (Edwards, 2016).

Berbeda dengan Velis yang dikutip dalam jurnal milik Ying. Velis yang berfokus pada bidang kesehatan menyatakan bahwa hampir seluruh ruang kerja industri daur ulang yang berada di sektor informal tidak terdaftar dalam Pemerintahan Cina. Biaya operasi dalam sektor informal ini pun sangat rendah dengan fasilitas maupun regulasi kesehatan dan keselamatan yang sangat minim.

Namun untuk membedakan studi yang dilakukan penulis dengan studi-studi ini adalah tidak ada studi yang menjelaskan dampak kebijakan larangan impor limbah padat terhadap para pekerja di industri daur ulang di Cina. Karlsen membahas secara umum sektor informal industri daur ulang yang ada di Cina. Sedangkan Velis tidak menjabarkan dengan jelas dampak yang dapat diperoleh apabila ruang kerja dari sektor informal ini tidak memiliki fasilitas kesehatan ataupun regulasi kesehatan yang sesuai. Selain itu, Edwards pun dalam *thesis*-nya hanya membahas ketenagakerjaan dari segi industri daur ulang limbah elektronik dan elektrik.

Konstruktivisme

Konstruktivisme atau dalam Bahasa Inggris *constructivism* berasal dari kata “*construct*” yang berarti “konstruksi”. Hubungan Internasional termasuk sebagai dunia sosial yang merupakan bentuk dari konstruksi manusia. Hubungan internasional

diperoleh dari adanya interaksi sosial antar negara yang didasari oleh adanya pemahaman bersama atau *intersubjective understandings*. Kepentingan dari negara dapat dihasilkan setelah identitas dari negara terlihat melalui tercapainya pemahaman bersama. Kepentingan ini yang menjadi dasar dari kebijakan atau tindakan selanjutnya yang diambil oleh negara dalam rangka memenuhi kebutuhan identitasnya.

Penggunaan Teori Konstruktivisme ini dinilai tepat sebagai panduan penulis dalam menulis artikel ini. Hal ini dikarenakan adanya dua alasan. Alasan yang pertama dikarenakan adanya perjanjian internasional di bidang lingkungan yang di mana Cina merupakan salah satu anggotanya, namun tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai negara anggota. Kedua, yaitu karena adanya pandangan negatif dari dunia internasional atas kondisi lingkungan di Cina melalui beberapa film dokumenter yang dipicu oleh adanya pandangan negatif dari rakyatnya sendiri terhadap pemerintahnya yang dinilai tidak peduli atas pentingnya lingkungan hidup di Cina. Kedua alasan tersebut pun telah menyebabkan identitas Cina yang dikenal kurang baik di dunia internasional.

Dalam rangka adanya kepentingan untuk mengembalikan identitas baik Cina, Presiden Xi Jinping merumuskan suatu kebijakan untuk membatasi impor limbah padat. Hal ini dinilai dapat membuat dunia internasional melihat Cina serius dalam menanggulangi masalah lingkungannya. Cara ini pun diharapkan dapat memperbaiki identitas Cina yang dinilai sangat penting oleh Presiden Xi Jinping.

Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan jenis data yang didapat oleh penulis. Jenis data tersebut yaitu *soft data* yang sifatnya tidak dapat diukur karena merupakan data yang didapat melalui opini individu. Data ini dikumpulkan dari

beberapa pendapat para ahli, hasil riset perbandingan, serta beberapa teori.

Penulis pun kemudian menggunakan metode studi kasus dalam rangka mempelajari latar belakang masalah dari isu yang penulis pilih. Dalam penelitian ini, penulis mengeksplorasi penyebab dan pengaruh dari suatu fenomena yang terjadi yaitu diberlakukannya larangan impor limbah padat yang diberlakukan oleh Cina.

Data-data pun penulis kumpulkan dengan teknik studi kepustakaan sehingga data yang diperoleh berupa data sekunder. Data-data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan juga berita menjadi beberapa contoh data sekunder. Data dari teknik pengumpulan ini pun dapat berbentuk fisik maupun daring yang dapat diperoleh dari perpustakaan ataupun secara *online*.

Setelah diperoleh, data yang telah terkumpul penulis analisis dengan cara dikategorikan berdasarkan informasi yang tersedia. Informasi seperti faktor-faktor penyebab diterapkannya kebijakan tersebut. Faktor-faktor seperti kesehatan, lingkungan, ataupun faktor-faktor lainnya.

Selain itu penulis juga membandingkan data statistik seperti tingkat pencemaran, jumlah ekspor dan impor limbah padat yang terjadi antara Cina dan AS ataupun negara lainnya sebelum dan sesudah kebijakan diberlakukan. Data-data tersebut disajikan dengan ilustrasi beserta uraian singkat yang menjelaskan isi dari data tersebut. Penyajian ini diharapkan dapat membantu penulis dalam menarik kesimpulan, sehingga penulis dapat menjawab rumusan masalah yang muncul dengan informasi yang jelas dan mudah dipahami bagi para pembaca.

Analisis

Faktor Penyebab Perumusan Kebijakan Larangan Impor Limbah Padat oleh Cina

Kebijakan larangan impor limbah padat yaitu OGF diberlakukan oleh Cina karena adanya kesepakatan bersama untuk mengembalikan standar kualitas limbah

padat yang masuk ke wilayah negara Cina. Kebijakan ini memperbolehkan tingkat kontaminasi sebesar 1,5% (Katharine, 2013). Sedangkan kebijakan ONS, menurut *Resource Recycling* pada tahun 2018, Cina memberi larangan terhadap 24 jenis limbah padat yang kemudian di tambah menjadi 32 jenis. Pemerintah Cina juga memperbolehkan tingkat kontaminasi hanya sebesar 0.3%. Pemerintah Cina pun bekerja sama dengan pihak bea cukai dalam melakukan inspeksi ketat terhadap seluruh kontainer.

Pemberlakuan kebijakan ini sejalan dengan pernyataan dari Presiden Xi Jinping yang menyatakan bahwa negaranya tidak akan mengorbankan kepentingan lingkungannya untuk keperluan pertumbuhan ekonomi yang bersifat sementara. Hal ini pun berkaitan dengan seiring berjalannya waktu, kualitas dari limbah padat yang diterima oleh Cina semakin menurun. Limbah-limbah tersebut telah terkontaminasi dengan limbah lainnya yang tidak dapat didaur ulang. Industri-industri di Cina pada akhirnya harus membuang limbah yang tidak dapat didaur ulang tersebut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau dibakar yang kemudian akan dibutuhkan biaya lebih (Flower, 2016).

Proses pembuangan inilah yang kemudian berdampak bagi lingkungan di Cina. Berbagai pencemaran yang dihasilkan dinilai telah berkontribusi atas rusaknya lingkungan di Cina, sekaligus menjadi penyebab banyaknya rakyat Cina terpapar penyakit dan juga banyaknya kematian (Zhou, et. al., 2019).

Faktor Lingkungan dan Kesehatan

Salah satu faktor yang menyebabkan Cina memberlakukan kebijakan larangan impor limbah padat adalah faktor lingkungan yang berkaitan dengan faktor kesehatan. Pencemaran udara, tanah, dan air yang terjadi di Cina yang dihasilkan oleh aktivitas mendaur ulang limbah padat telah merusak lingkungan dan mengancam kesehatan dari penduduknya.

Metode pembuangan ke TPA, menjadi metode yang paling populer karena biaya yang cukup murah dan juga tidak memakan banyak waktu. Namun pembuangan menggunakan metode ini memakan banyak tempat serta dapat menyebabkan kontaminasi pada tanah karena limbah yang tidak dipilah terlebih dahulu sesuai dengan jenisnya. Limbah sehari-hari seperti makanan sisa, pembungkus makanan, alat tulis, limbah rumah sakit, bahkan alat-alat elektronik yang mengandung kandungan kimia berbahaya dibuang bersamaan ke dalam tumpukan yang sama. Kontaminasi yang dihasilkan dari metode ini setelah mengontaminasi tanah, dapat menguap ke udara dan mencemari air.

Selain menggunakan metode pembuangan ke TPA, menurut Rinkesh, penggunaan insinerator juga populer digunakan karena dinilai sangat efisien bahkan bisa mengurangi volume sampah hingga 30% dari volume awalnya. Sampah yang ada di Cina setiap harinya bisa menumpuk sebanyak 520 ribu ton. Namun penggunaan insinerator tidaklah ramah lingkungan karena dapat menghasilkan emisi yang berbahaya. Meskipun beberapa insinerator di Cina dapat menghasilkan emisi yang rendah di bawah standar yang diberlakukan oleh Uni Eropa. Insinerator tersebut kebanyakan dibiayai, dibangun, dan dijalankan oleh Pemerintah Cina. Sedangkan kebanyakan insinerator yang tidak dibiayai oleh pemerintah tidak sepenuhnya dapat menghasilkan emisi yang rendah karena mahalnya sistem filtrasi yang canggih. Hal ini yang menyebabkan emisi yang dihasilkan dinilai sangat berkontribusi atas polusi udara di Cina.

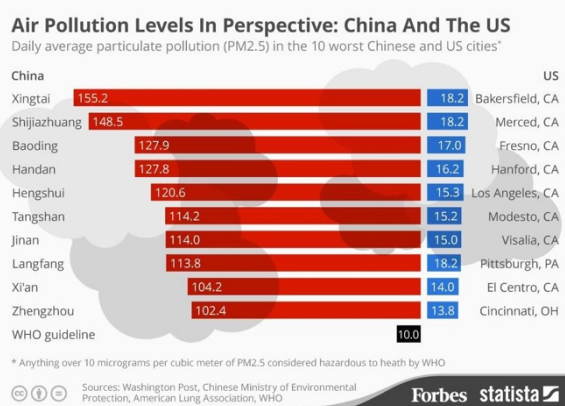
Particulate Matter (PM), menurut *World Health Organization* (WHO) adalah sebuah indikator yang paling umum digunakan untuk melihat tingkat polusi udara. Partikel udara dengan diameter 2,5 mikron atau kurang bisa masuk ke dalam paru-paru dan bahkan dapat masuk ke dalam sistem peredaran darah karena sifat

partikelnya yang lebih halus atau yang disebut sebagai *fine particulate matter*.

WHO menambahkan bahwa batasan partikel udara dengan diameter 2,5 mikron atau kurang dari 2,5 mikron yang disebut sebagai PM 2,5 adalah sebesar 10 mikrogram per meter kubiknya. Sehingga jika melewati batasan tersebut, maka kualitas udara dinilai berbahaya bagi kesehatan manusia. Tereksposnya diri terhadap partikel-partikel ini dapat mengakibatkan adanya penyakit saluran pernapasan dan bahkan dapat menyebabkan kanker paru-paru.

Pada gambar 4.1, terlihat perbandingan kualitas udara yang ada di Cina dan AS berdasarkan jumlah konsentrasi PM 2,5 dari sepuluh kota paling tercemar di Cina dan di AS. Di Cina, kota yang paling tercemar menyentuh angka 155,2 mikrogram

per meter kubik, sedangkan di AS kota yang paling tercemarnya hanya menyentuh angka 35 mikrogram per kubiknya. Menurut McCarthy dalam Forbes



(2015) tujuh dari sepuluh kota tersebut berada di Provinsi Hebei yang terkenal sebagai pusat perindustrian yang termasuk di dalamnya industri daur ulang. Industri ini yang kemudian menjadi kontributor atas pencemaran di Cina karena maraknya penggunaan metode pembakaran sampah untuk memusnahkan sampah yang tidak dapat didaur ulang.

Berbagai bau dan asap yang dihasilkan dari proses pembakaran khususnya pembakaran plastik sudah menjadi “konsumsi” setiap hari bagi pada

penduduk di Hebei yang dekat dengan Beijing. Bau dan asap dari pembakaran ini menghasilkan zat beracun yang berbahaya yang dapat menyebabkan penghirupnya mengalami batuk, hilang ingatan, dan bahkan kanker (Li dan Jianqing, 2019).

McCarthy dalam Forbes (2018) menambahkan bahwa sebanyak 1,58 juta orang di Cina telah meninggal pada tahun 2016 yang disebabkan oleh kualitas udara yang berbahaya. Hal ini pun disebabkan oleh penyakit yang ditimbulkan dari kualitas udara tersebut seperti penyakit gangguan pernapasan dan kanker paru-paru (McCarthy, 2019).

Tidak hanya polusi udara, namun pencemaran lainnya seperti pencemaran tanah pun marak terjadi di Cina. Pembuangan limbah secara ilegal mencemari tanah di Cina dan merugikan penduduknya yang bergantung pada tanah seperti ladang pertanian.

Kontaminan seperti timbal, arsenik, dan petroleum adalah beberapa contoh kontaminan yang ada di dalam tanah yang tercemar. Tidak hanya tanah yang harus terpapar langsung untuk bisa tercemar. Tanah yang tidak terpapar langsung pun juga dapat terkontaminasi karena adanya pengaruh dari lingkungan sekitarnya seperti terbawa melalui udara dan juga air hujan. Hasil pertanian yang tumbuh dari tanah yang tercemar memiliki kemungkinan tinggi untuk mengandung kontaminan. Hasil pertanian yang tidak dicuci dengan baik pun dapat meninggalkan tanah yang terkontaminasi. Hasil pertanian tersebut jika dikonsumsi sangatlah memberi resiko yang tinggi bagi kesehatan konsumennya (Soil Science Society of America).

Data survei yang dilakukan oleh *Ministry of Environmental Protection* (MEP) dan *Ministry of Land Resources* (MLR) yang dikutip oleh Takahashi dalam studinya (Takahashi, 2016) menyatakan bahwa ada delapan kategori logam berat yang ada di dalam tanah yang terkontaminasi. Kontaminan tersebut yaitu kadmium, merkuri, arsenik, tembaga, timbal, kromium,

seng, dan juga nikel. Hasil survei yang dilakukan menyatakan bahwa sebesar 16,1% total tanah melewati batas standar polusi terhadap tanah.

Takahashi pun menambahkan data dari *2013 Environmental Statistical Annual Report* milik MEP yang menyatakan bahwa limbah industri di Cina pada tahun 2013, menyentuh angka 3,28 milyar ton, namun sebesar 430 milyar ton dibuang tanpa diolah terlebih dahulu (Takahashi, 2016).

Selain pencemaran udara dan tanah, pencemaran air juga menjadi salah satu pencemaran yang merupakan salah satu faktor lingkungan yang menyebabkan Cina memberlakukan kebijakan larangan impor limbah padat. Mengingat adanya kepentingan Cina dalam memperbaiki identitasnya yang dinilai tidak baik dan tidak sesuai dengan kepentingan awal Pemerintah Cina untuk membangun negaranya menjadi negara yang sukses. Identitas Cina, terkenal sebagai pelaku pencemaran air terbesar di dunia. Pernyataan ini pun didukung oleh pernyataan dari Mohan dalam *Los Angeles Times*. Mohan menyatakan bahwa Cina menjadi kontributor utama atas limbah yang ada di laut. Mohan mengutip jurnal *Science* yang mengestimasi bahwa Cina menyumbang 1,3 milyar hingga 3,5 milyar metrik ton sampah plastik ke laut setiap tahunnya (Mohan, 2015).

Christou dalam Verdict (Christou, 2018) mengutip data milik Pemerintah Cina yang menyatakan bahwa pada 2012, 57,3% air yang ada di Cina sangat tercemar hingga tidak dapat dikonsumsi. Bahkan pada tahun 2014 suplai air tanah di lebih dari 60% kota yang ada di Cina dikategorikan sebagai air yang “buruk hingga sangat buruk”. Sedangkan lebih dari seperempat sungai utama di Cina disebut sebagai air yang “tidak layak untuk disentuh oleh manusia”.

Hal ini pun diperburuk dengan kurangnya infrastruktur atau fasilitas dalam mengolah sampah ataupun mengangkut sampah (Albert dan Xu, 2016). Bank Dunia, dalam artikelnya yang berjudul “*China: Keeping the Water and Environment Clean*

in the Qiantang River Basin” menyatakan bahwa kota-kota yang ada di Cina khususnya kota-kota besar selama beberapa tahun terakhir telah meningkatkan infrastruktur pengolahan air dengan tujuan agar air di Cina layak untuk dikonsumsi. Sedangkan bagi kota kecil seperti salah satunya Provinsi Zhejiang masih bergantung dengan air sungai atau danau. Namun suplai air sungai yang aman hanya sebesar 29% padahal sebagai sungai utama, sungai tersebut digunakan sebagian besar 15 juta orang yang tinggal di provinsi tersebut. Hal ini dikarenakan limbah cair maupun padat dibuang langsung ke dalam sungai tanpa diolah terlebih dahulu.

Meskipun pencemaran tersebut diketahui oleh para penduduknya, namun penggunaan air pun tetap dilakukan karena air merupakan kebutuhan yang penting dalam kesehariannya. Baik untuk diminum, bahan memasak, mandi, ataupun mencuci. Mengonsumsi air sungai yang tercemar ini pun mengancam kesehatan dari yang mengonsumsinya dengan penyakit seperti diare, kolera, disentri, dan bahkan kematian.

Tidak hanya di Provinsi Zhejiang, penduduk di kota Guiyu pun juga terancam akan penyakit-penyakit yang dihasilkan dari mengonsumsi air tercemar. Kota Guiyu, terkenal sebagai pusat daur ulang limbah elektronik dan elektrik terbesar di Cina. Air sungainya setelah diukur mengandung zat berbahaya seperti kadmium, nikel, dan tembaga dengan level yang melewati batas ketentuan yang diberikan oleh *Environmental Protection Agency* yaitu sebesar 700% (Williams, 2008).

Penduduk di kota Guiyu khususnya anak-anak disebutkan memiliki kadar timbal yang tinggi dalam peredaran darahnya. Levelnya beragam dari 4.4 µg/dL hingga 33 µg/dL (mikrogram per desiliter). Sebesar 80% anak kadar timbalnya melampaui level 10 µg/dL (Huo et. al., 2007). Wheeler (2013) yang mengutip *The U.S Center for Disease Control and Prevention*, pun menyatakan bahwa dengan level timbal 5 µg/dL dalam

darah saja sudah dianggap berbahaya bagi kesehatan dan dibutuhkan perhatian khusus.

Adanya kepentingan bagi Pemerintah Cina dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan hidup yang rusak, merupakan tujuan dari Pemerintah Cina dalam merumuskan kebijakan larangan impor limbah padat. Pada gambar 4.2, terlihat bahwa Pemerintah Cina telah memenangkan perangnya dengan pencemaran yang ada di negaranya. Hal ini terlihat dari adanya perkembangan pada kualitas udara di seluruh kawasan di Cina sampai dengan akhir tahun 2017, dibandingkan dengan kualitas udara di Cina pada tahun 2013.

Hal ini pun dikarenakan adanya kebijakan OGF pada tahun 2013, dengan jangka waktu tertentu, serta dikarenakan dirumuskannya kebijakan ONS sejak 2017 meskipun pembatasannya masih dengan

Gambar 4.2

<https://epic.uchicago.edu/news/top-10-charts-of-2018/>

tingkat kontaminasi yang berbeda dengan



saat diberlakukannya kebijakan ONS pada tahun 2018. Perkembangan yang terjadi pun salah satunya terlihat pada kawasan BTH yaitu Beijing, Tianjin, dan Hebei yang kotanya memiliki populasi serta industri paling banyak, yang termasuk di dalamnya industri daur ulang limbah padat.

Namun perkembangan kualitas udara yang terjadi sebenarnya tidak murni dihasilkan dari kebijakan larangan impor limbah padat. Mengingat adanya kepentingan untuk memperbaiki kondisi lingkungan hidup di Cina, Pemerintah Cina

juga memberlakukan beberapa kebijakan lain yang sama pentingnya.

Faktor Pendapat Negatif Publik dan Tuntutan Organisasi Internasional

Faktor pendapat negatif dari publik, serta adanya tuntutan dari organisasi internasional, termasuk ke dalam faktor penyebab Cina memberlakukan kebijakan larangan impor limbah padat yang dipicu oleh faktor lingkungan dan kesehatan. Sejak 2007, Cina dinilai telah mengambil alih “peran” dari negara AS sebagai negara yang terkenal paling banyak menyumbang emisi gas rumah kaca. Pada tahun 2014, Cina menyumbang sebesar 27% emisi gas rumah kaca ke atmosfer bumi yang kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 28,3% (Albert dan Xu, 2016). Atas identitasnya tersebut, Cina pun mendapatkan banyak kritik dari komunitas internasional dan juga kritik yang datang dari dalam negeri.

Greenpeace East Asia, menyatakan bahwa pada tahun 2015, Pemerintah Cina menjalankan peringatan daruratnya yaitu “*Red Alerts*” untuk pertama kalinya karena polusi yang dinilai sangat parah. Banyak aktivitas penduduknya yang harus ditunda seperti beberapa sekolah yang diliburkan serta aktivitas konstruksi dan industri yang ditunda. Sekitar 80% dari 367 kota di Cina tidak dapat memenuhi standar nasional atas polusi dalam partikel kecil pada sembilan bulan pertama tahun 2015. Pada Desember 2015, *Asian Development Bank* pun memberikan bantuan sebesar \$300 juta dengan tujuan untuk membantu Cina dalam menyelesaikan masalah polusi udaranya.

Eleanor Albert dan Beina Xu pun menyatakan bahwa rakyat Cina telah sejak lama melakukan aksi protes terhadap Pemerintah Cina. Aksi-aksi tersebut banyak yang dimulai secara damai harus berakhir dengan kacau. Pada tahun 2013, aksi protes yang terjadi meningkat sebesar 31% menjadi sebanyak 712 kasus jika dibandingkan dengan jumlah aksi protes yang terjadi pada tahun 2012.

Media internet pun menjadi alat bagi para penduduknya dalam menyebarluaskan informasi mengenai kondisi lingkungan di Cina. Tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada publik atas kondisi sebenarnya dari lingkungan di Cina.

Chai Jing, pada tahun 2015, merilis sebuah film dokumenter berjudul “*Under The Dome*”. Film ini dibuat olehnya karena anaknya harus menderita tumor jinak saat masih di dalam rahimnya. Pembuatan film ini pun ditujukan untuk menyalahkan polusi udara sebagai penyebab anaknya harus menderita penyakit tersebut. Film dokumenter ini pun berisi wawancara-wawancara kecil yang dilakukannya kepada penduduk yang ada di Cina. Dalam beberapa wawancara, Chai Jing menanyakan apakah mereka pernah melihat bintang ataupun awan putih. Pertanyaan tersebut pun dijawab dengan kata tidak pernah. Film ini pun ditujukan untuk mengkritik Pemerintah Cina yang tidak menjalankan hukum negaranya dengan baik. Bahkan oleh pemerintah atau pejabat di level bawah, hukum tersebut cenderung diabaikan jika berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi (Hatton, 2015).

Selain film “*Under the Dome*”, ada film dokumenter lainnya seperti *Beijing Besieged by Waste* dan *Plastic China*. Kedua film tersebut dibuat oleh Wang Jiuliang dan masing-masing film tersebut dibuat setahun sebelum kebijakan OGF dan ONS diberlakukan. Film *Beijing Besieged by Waste*, memperlihatkan kota Beijing yang memiliki banyak TPA tanpa adanya pengawasan dari pemerintah. Sedangkan *Plastic China* memperlihatkan kehidupan dua keluarga yang bergantung pada aktivitas daur ulang limbah impor di kota Shandong. Kedua film ini pun terkenal di dunia internasional dan bahkan diberikan beberapa penghargaan serta masuk ke dalam beberapa festival film. Film dokumenter ini pun mendapatkan perhatian dari dunia sampai akhirnya harus dicabut oleh Pemerintah Cina. Pencabutan dilakukan karena dinilai memberikan tekanan politik kepada pihak

pemerintah yang tidak memberlakukan hukum sebagaimana mestinya serta menjelek-jelekkan identitas negara Cina (Schulz, 2019).

Seluruh tuntutan yang datang dari publik dalam negerinya pun tersebar luas melalui media internet dan mengekspos Cina ke dunia internasional. Media massa dari beberapa negara pun ikut memberitakan permasalahan ini. Baik itu mengenai aksi protes yang dilakukan penduduk Cina, ataupun mengenai film dokumenter yang mengekspos kondisi lingkungan di Cina.

Cina pun mulai mendapat tekanan dari dunia internasional. Saat negosiasi iklim internasional, Cina diminta untuk lebih serius dalam melawan perubahan iklim global. Terlebih lagi Cina yang identitasnya terkenal sebagai negara yang paling banyak menggunakan sumber energi dan juga penyumbang emisi gas rumah kaca khususnya karbondioksida ke atmosfer. Pemberian tekanan ini pun dikarenakan adanya kesepahaman bersama demi kepentingan negara Cina beserta komunitas internasional. Komunitas internasional pun memiliki kepentingan untuk tidak mendukung pertumbuhan ekonomi Cina secara terus menerus apabila kepentingan dari lingkungan serta penduduknya tidak lagi diperhatikan.

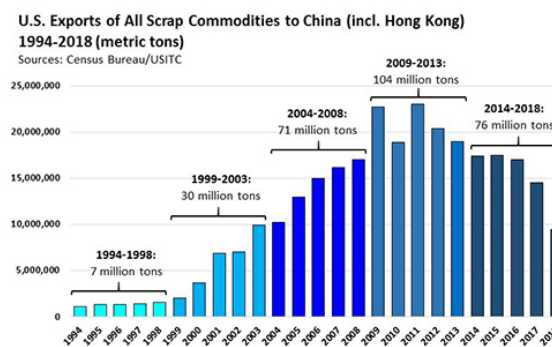
Erik Solheim, sebagai kepala dari *United Nations Environment Programme* (UNEP) mengatakan bahwa sekarang ini dunia kita sedang dalam masa transisi dari penggunaan batu bara ke energi terbarukan. Solheim pun mengatakan “*China has a very big job ahead of it to transform fundamentally from coal into these very promising new technologies*” pernyataannya ini untuk mengingatkan Cina yang menutup diri dengan bergantung pada bahan bakar fosil yaitu batu bara sangatlah berbahaya karena resikonya yang tinggi terhadap lingkungan dan juga kesehatan.

Dampak Perumusan Kebijakan Larangan Impor Limbah Padat oleh Cina Terhadap Perekonomian

Setelah kebijakan larangan impor limbah padat diberlakukan oleh Cina, negara-negara yang biasa mengekspor dan bahkan negara Cina sendiri harus menerima dampak yang dihasilkan, khususnya dampak yang sifatnya negatif. Dalam artikel ini, dampak yang dibahas oleh penulis adalah dampaknya terhadap perekonomian, baik yang diterima oleh Cina, AS, maupun secara internasional.

Dampak Ekonomi antara Cina dan Amerika Serikat

Pada saat Cina memberlakukan kebijakan larangan impor limbah padatnya, inspeksi ketat yang dilakukan bersama pihak bea cukai oleh Pemerintah Cina gencar dilakukan. Khususnya terhadap produk daur ulang berupa kertas dan plastik. Inspeksi ketat ini pun memberlambat proses di pelabuhan, sehingga kontainer-kontainer yang dibawa harus bertahan di pelabuhan sampai mendapat giliran untuk diperiksa pihak bea cukai. Hal ini pun menyebabkan pengeksport harus membayar biaya tambahan untuk kontainer yang harus menginap di pelabuhan. Setelah di periksa, jika ada kontainer yang tidak sesuai maka kontainer tersebut tidak akan diterima dan dikembalikan ke asalnya. Hal ini merugikan pengimpor atau pihak pembeli yang harus membayar biaya pengembalian tersebut.



Gambar 4.3 [https://www.isri.org/news-publications/news-details/2019/03/15/u.s.-scrap-exports-up-13-in-2018-to-\\$20.3-billion](https://www.isri.org/news-publications/news-details/2019/03/15/u.s.-scrap-exports-up-13-in-2018-to-$20.3-billion)

Atas adanya resiko kerugian tersebut, muncullah kesepahaman bersama antar pihak pembeli dan pengeksport untuk tidak melakukan kerja sama dagang terlebih

dahulu. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa pihak pengeksport akan memperketat pemeriksaan kontainernya sebelum dikirimkan ke Cina. Namun kebijakan yang diberlakukan oleh Cina telah mengakibatkan harga produk daur ulang di AS yang menurun. Hal ini pun dipengaruhi oleh jumlah permintaan di Cina yang menurun.

Dua bulan pertama kebijakan OGF berlangsung, pengiriman limbah kertas menurun sebesar 18,4% jika dibandingkan dengan dua bulan periode yang sama pada tahun 2012. Cina yang menjadi pasar limbah padat utama AS mengalami penurunan permintaan sehingga suplai barang di AS terlampau banyak. Beberapa perusahaan yang ada di AS lebih memilih untuk mencari pembeli secara domestik dibandingkan harus mengirimnya ke Cina. Sama seperti AS, pihak Cina pun juga memilih untuk tidak mengimpor terlebih dahulu karena adanya resiko yang tinggi harus mengembalikan kontainer-kontainer tersebut.

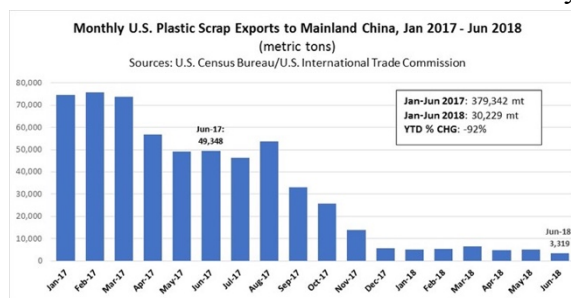
Inspeksi ketat pun tidak hanya dilakukan pada kebijakan OGF, namun juga saat kebijakan ONS berlangsung. Saat awal diterapkan, kebijakan ONS hanya menoleransi tingkat kontaminasi sebesar 1,5%. Namun pada Maret 2018, tingkat tersebut diperketat ke angka 0,5%. Angka ini pun dinilai sangat sulit untuk dipenuhi mengingat bahkan pada batasan 1,5% pun banyak pengiriman yang tidak lolos inspeksi (Parts, 2019).

Untuk bisa menyortir limbah hingga 99,5%, akan dibutuhkan teknologi canggih yang biayanya cukup tinggi. Maka dari itu, banyak perusahaan yang lebih memilih untuk mencari pasar baru. Namun jumlah limbah yang dieksport ke pasar baru tidak sebanding dengan jumlah limbah yang selama ini diterima oleh Cina.

Jika dilihat pada gambar 4.3, total limbah yang AS eksport ke wilayah Cina, sebanyak 104 juta metrik ton pada periode 2009-2013. Sedangkan sejak kebijakan OGF berlaku, angka tersebut menurun hingga total limbah yang AS kirimkan ke Cina pada

periode 2014-2018 sebanyak 76 juta metrik ton dengan penurunan drastis terjadi pada tahun 2017 ke 2018, sejak kebijakan kedua diberlakukan. Suplai limbah yang ada di AS, karena terlampau banyak dengan permintaan yang sedikit menyebabkan turunnya harga limbah padat khususnya di AS. Gretchen Carey, sebagai pemimpin salah satu industri daur ulang yang ada di Massachusetts yaitu MassRecycle, mengatakan bahwa harga limbah kertas turun ke angka yang tidak lebih dari \$5 per tonnya. Sebelum kebijakan diberlakukan harga limbah kertas berkisar \$75 per tonnya (Gellerman, 2019).

Tidak hanya limbah kertas, namun jika dilihat pada gambar 4.4, limbah plastik pun ikut mengalami penurunan khususnya pada tahun 2018, setelah kebijakan ONS diberlakukan. Pada periode Januari-Juni 2017, total eksport limbah plastik adalah sebesar 379.342 metrik ton. Jika dibandingkan dengan periode yang sama yaitu Januari-Juni pada tahun 2018, total eksport limbah plastik hanya sebesar 30.229 metrik ton, sehingga penurunan yang terjadi adalah sebesar 92%. Penurunan ini pun memengaruhi nilai eksport AS ke Cina. Pada tahun 2018, nilai eksport limbah padat oleh AS ke Cina menurun sebesar \$2.2 milyar

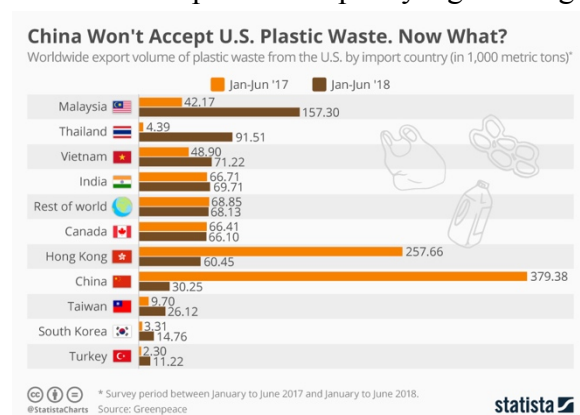


Gambar 4.4 <https://www.globenewswire.com/news-release/2018/08/08/1549149/0/en/Recycling-Industry-Statement-on-China-s-Announcement-of-Tariffs-on-All-Scrap-Imports.html>

atau sebesar 38% dari tahun sebelumnya ke angka \$3.5 milyar.

Hal ini pun tidak hanya berdampak pada nilai eksport dan impor saja, namun cenderung juga berdampak pada perekonomian seluruh perusahaan atau industri yang terkait. Bisnis dalam bidang industri daur ulang ini dikenal sebagai usaha yang mengubah sampah

menjadi uang, namun sekarang bisnis-bisnis ini hanya Gambar 4.5 Sampah Plastik AS memiliki tumpukan sampah yang tak lagi



memiliki nilai.

Tiga pusat daur ulang dan dua fasilitas pemulihan yang ada di kota besar seperti Los Angeles telah tutup sejak tahun 2018. RePlanet, sebagai industri daur ulang terbesar di California, pada Agustus 2019 menutup seluruh 284 industrinya dan memberhentikan 750 tenaga kerjanya. Hal ini pun dipengaruhi oleh terus menyusutnya keuntungan yang membuat banyak industri daur ulang harus beroperasi dengan kerugian dan dengan adanya resiko harus menutup usahanya (Piper, 2019).

Tidak hanya di AS, meskipun Cina yang memberlakukan kebijakan ini, sebagai negara yang selama ini bergantung pada limbah impor pun juga mengalami kesulitan dalam menghadapi kebijakannya sendiri. Kebijakan ini menyebabkan kebanyakan perusahaan di Cina beralih ke limbah padat yang ada secara domestik. Namun limbah-limbah ini pun membutuhkan biaya yang besar dalam pengolahannya mengingat rendahnya kualitas dari limbah domestik.

Beberapa perusahaan di Cina, salah satunya Huizhou Qinchun menggunakan limbah daur ulang sebagai bahan utama produksinya. Pemiliknya, Zhang Jinglian mengatakan bahwa perusahaannya cenderung akan mengurangi jumlah produksinya hingga setidaknya sepertiga dari biasanya karena mahalnya bahan baku. Tidak hanya itu, perusahaannya pun telah memberhentikan dua belas pekerjanya dalam

rangka memotong pengeluaran dari perusahaan (Straits Time, 2018).

Dampak Perekonomian Secara Internasional

Dampak tidak hanya dirasakan oleh AS maupun Cina saja, namun dampak juga dirasakan oleh negara-negara lain khususnya yang berkaitan langsung dengan AS. Mengingat AS sebagai pengekspor utama cenderung memiliki kepentingan untuk mencari pasar baru. Pada artikel "*U.S Scrap Exports Up 13% in 2018 to \$20.3 Billion*" milik *Institute of Scrap Recycling Industries (ISRI)* disebutkan bahwa negara-negara seperti India, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, dan Jerman menjadi lima negara utama yang menjadi pasar baru AS.

Pernyataan ini berdasarkan data perbandingan nilai ekspor AS dari tahun sebelum dan sesudah kebijakan diberlakukan. India menerima ekspor dari AS yang meningkat sebesar \$586 juta ke angka \$1,5 milyar, terhadap Malaysia sebesar \$550 juta ke angka \$736 juta, Taiwan sebesar \$498 juta ke angka \$1,1 milyar, Korea Selatan sebesar \$465 juta ke angka \$1,2 milyar, dan Jerman sebesar \$319 juta ke angka \$1,2 milyar. Tidak hanya terhadap negara-negara tersebut, namun ada juga pasar besar lainnya seperti Inggris, Meksiko, Indonesia, Belgia, Jepang, Vietnam, Thailand, dan Bangladesh.

Untuk mendukung pernyataan tersebut, dapat dilihat melalui data pada gambar 4.5, bahwa ekspor limbah plastik dibandingkan enam bulan pertama pada tahun 2017 dan 2018 sangat jauh berbeda di beberapa negara.

Pada gambar, terlihat data bahwa di negara Malaysia, peningkatan ekspor limbah plastik yang dilakukan oleh AS meningkat lebih dari tiga kali lipat. Bahkan di Thailand peningkatannya lebih dari dua puluh kali lipat. Selain kedua negara ini, negara-negara lain seperti Vietnam, Korea Selatan, Turki, dan bahkan Indonesia juga mengalami peningkatan yang dinilai cukup signifikan.

Hal ini pun menjadi bukti pengalihan ekspor yang dilakukan oleh AS ke negara-negara lain khususnya negara di Kawasan Asia. Namun, negara-negara di Kawasan Asia tidak hanya menerima pengalihan ekspor dari AS saja. Negara-negara yang tidak lagi bisa mengirimkan limbahnya ke Cina pun juga harus mencari pasar baru.

Sun dan Phoonphongphiphat dalam artikel miliknya di *Nikkei Asian Review* mengutip data milik *Global Trade Atlas* yang menyatakan bahwa pada tahun 2018, dari bulan Januari hingga Maret, Thailand telah mengimpor limbah padat dari Jepang, AS, dan juga Uni Eropa sebesar 121.000 ton. Jumlah ini jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya, maka telah meningkat sebesar 17,7 kali, dan sedangkan pada Malaysia meningkat empat kali lipat (Sun dan Phoonphongphiphat, 2018).

Namun, sebagai tindakan preventif, negara-negara di Asia sudah mulai memberlakukan kebijakan-kebijakan seperti pemberhentian impor limbah padat, pencabutan izin melakukan impor, dan bahkan mengikuti kebijakan Cina yaitu membatasi masuknya limbah asing ke negaranya masing-masing.

Meskipun kebijakan tersebut dapat menjadi penghambat atas potensi masuknya investasi asing, tindakan ini merupakan tindakan pencegahan dari negara yang mementingkan kondisi lingkungan hidup dibandingkan adanya potensi pertumbuhan perekonomian bagi negaranya.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur ke-14 tahun 2019 di Bangkok, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Indonesia menolak pengiriman limbah yang bersifat beracun dan berbahaya. Tidak hanya Indonesia, Presiden Filipina, Duterte pun juga memiliki pemahaman bersama dengan Presiden Jokowi (Septiasputri, 2019). Negara-negara ini pun juga merupakan anggota dari Perjanjian Paris dan Konvensi Basel yang memperjelas identitas masing-masing negara untuk lebih mementingkan kondisi lingkungannya. Sekaligus mencari

solusi untuk mengurangi pencemaran yang ada, sehingga bukan untuk memperburuk kondisi lingkungan yang sudah terjadi.

Hal ini berbeda dengan negara-negara maju yang mengalihkan limbahnya tanpa mementingkan lingkungan hidup negara lain. Kaum Konstruktivis pun melihat hal ini dikarenakan negara-negara seperti AS, Kanada, Australia, dan Jepang yang tidak meratifikasi Konvensi Basel. Serta AS yang juga mengundurkan dirinya dari Perjanjian Paris, sehingga negara-negara ini cenderung tidak memiliki rasa bertanggung jawab atau berkewajiban dalam menjalani ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, ada beberapa hal menarik yang menurut penulis penting untuk dibahas khususnya dalam menjawab pertanyaan yang muncul pada rumusan masalah. Kesimpulan yang dapat ditarik pada artikel ini adalah, kebijakan larangan impor limbah padat oleh Cina diberlakukan karena adanya pemahaman baru di dalam negara Cina bahwa identitas negaranya di bidang lingkungan lebih penting, jika dibandingkan dengan adanya kepentingan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sifatnya sementara dan dapat memberikan dampak negatif pada negaranya.

Cina yang identitasnya terkenal sebagai negara dengan pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas industri khususnya industri daur ulang memberlakukan kebijakan larangan impor limbah padat dengan upaya untuk memperbaiki identitasnya dari "*Plastic China*" kembali menjadi "*Beautiful China*". Munculnya kepentingan ini dilatar belakangi oleh faktor-faktor yang berkaitan satu sama lainnya. Dari adanya faktor lingkungan yaitu beberapa pencemaran di udara, air, dan tanah di Cina, yang menyebabkan munculnya faktor kesehatan di mana banyak sekali penyakit dan bahkan kematian yang disebabkan oleh tereksposnya manusia terhadap pencemaran

tersebut. Faktor-faktor ini pun mengakibatkan munculnya faktor lain yaitu faktor adanya pandangan negatif publik yang datang dari dalam negeri Cina sendiri khususnya terhadap Pemerintah Cina yang dinilai tidak menjalankan hukum dengan semestinya. Adanya kesepahaman bersama di mata internasional pun menyebabkan munculnya faktor tuntutan yang datang dari dunia internasional khususnya organisasi internasional.

Setelah diberlakukan, kebijakan ini memberikan dampak terhadap perekonomian banyak pihak. Khususnya kepada Cina yang selama ini bergantung kepada limbah padat impor, serta AS yang juga bergantung kepada Cina dalam mengirimkan limbahnya. Kebijakan yang memengaruhi jumlah permintaan dan penawaran limbah padat ini pun berdampak pada perekonomian. Industri-industri yang berkaitan khususnya yang ada di AS dan Cina secara terpaksa harus menutup usahanya ataupun mengurangi jumlah pekerjanya.

Namun dampak tidak hanya diterima oleh Cina maupun AS saja. Negara-negara lain pun juga terkena dampak dari kebijakan ini. Seperti negara lain lain yang juga mengirimkan limbahnya ke Cina. Negara-negara yang sudah tidak bisa mengirimkan limbahnya ke Cina pun cenderung harus mencari pasar baru sebagai pengganti Cina. Hal ini dinilai lebih efisien dibandingkan harus membuat infrastruktur atau fasilitas baru dalam mengolah limbah.

Negara-negara lain khususnya yang berada di Kawasan Asia seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia pun mendapatkan pengalihan limbah padat dari negara-negara yang terkena dampak dari kebijakan larangan impor limbah padat oleh Cina, khususnya AS. Pengalihan ini pun sebagai kepentingan dari negara-negara pengirim limbah dalam rangka untuk mempertahankan identitasnya sebagai negara maju yang bersih dari limbah. Namun negara-negara yang mendapatkan pengalihan limbah memiliki pemahaman bersama bahwa kondisi lingkungan di

masing-masing negaranya lebih penting dibandingkan adanya potensi pertumbuhan ekonomi. Negara-negara ini pun memilih untuk memberlakukan kebijakan seperti mencabut izin pengimporan limbah padat, menunda pembuatan lisensi, dan bahkan mengikuti jejak Cina dengan memberlakukan kebijakan larangan impor limbah pada

References

- Albert, E., & Xu, B. (2016, January 18). China's environmental crisis. Council on Foreign Relations. Retrieved from <https://www.cfr.org/backgroundunder/chinas-environmental-crisis>
- Basel Convention. (N.d.). Basel convention controlling transboundary movements of hazardous wastes and their disposal. Basel Convention Online. Retrieved from <http://www.basel.int/Implementation/LegalMatters/TradeandEnvironment/CaseLaw/tabid/3511/Default.aspx>
- Carpenter, M. (2018, August 8). Recycling industry statement on China's announcement of tariffs on all scrap imports. Globe News Wire Online. Retrieved from <https://www.globenewswire.com/news-release/2018/08/08/1549149/0/en/Recycling-Industry-Statement-on-China-s-Announcement-of-Tariffs-on-All-Scrap-Imports.html>
- Christou, L. (2018, April 18). The Yangtze deposits 55% of all river marine plastic pollution-but China is finally taking action. Verdict Online. Retrieved from <https://www.verdict.co.uk/yangtze-river-plastic-pollution/>
- Drezner, D. W. (2000). Bargaining, enforcement, and multilateral sanctions: When is cooperation counterproductive? *International Organization*, 54(1), 73-102. <https://doi.org/10.1162/002081800551127>
- Earley, K. (2013, August 27). Could China's 'green fence' prompt a global recycling innovation? Guardian Online. Retrieved from <https://www.theguardian.com/sustainable-business/china-green-fence-global-recycling-innovation>
- Edwards, L. (2016). E-waste recycling: The dirty trade between the United States and China. Senior Theses, Pomona College. Retrieved from https://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.com/&httpsredir=1&article=1155&context=pomona_theses
- Flower, W. (2016). What operation Green Fence has meant for recycling. Retrieved from <https://www.waste360.com/business/what-operation-green-fence-has-meant-recycling>
- Gellerman, B. (2019, March 19). How a new policy in China has led to a recycling crisis in mass. WBUR Online. Retrieved from <https://www.wbur.org/earthwhile/2019/03/19/recycling-massachusetts-china-effect>
- Hatton, C. (2015, March 2). Under the dome: The smog film taking China by storm. BBC News Online. Retrieved from <https://www.bbc.com/news/blogs-china-blog-31689232>
- Hervey, G. (2019, September 17). Countries ratify ban on global exports of hazardous waste. Chemical Watch Online. Retrieved from <https://chemicalwatch.com/82197/countries-ratify-ban-on-global-exports-of-hazardous-waste>
- High, V. E. (2018). Top 10 charts of 2018. Energy Policy Institute at the University of Chicago. Retrieved from <https://epic.uchicago.edu/news/top-10-charts-of-2018/>
- Indonesian Foreign Ministry. (2007). *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, (5th ed.). Jakarta, Indonesia: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri.
- Institute of Scrap Recycling Industries. (2019, 15 March). US scrap exports Up 13% in 2018 to \$20.3 billion. ISRI. Retrieved from [https://www.isri.org/news-publications/news-details/2019/03/15/u.s.-scrap-exports-up-13-in-2018-to-\\$20.3-billion](https://www.isri.org/news-publications/news-details/2019/03/15/u.s.-scrap-exports-up-13-in-2018-to-$20.3-billion)

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2019). Sanksi. KBBI Online. Retrieved from <https://kbbi.web.id/sanksi>
- Karlsen, O. T. (2019). Values of waste: A meta-ethnography of China's informal recycling sector. Master's Thesis, Department of Culture Studies and Oriental Language, The University of Oslo. Retrieved from https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/70119/1/Karlsen_Master_Values-of-Waste.pdf
- Li, C., & Jianqing, C. (2019). The significance of restrictions on waste import in producing green development in China. *American Journal of Environmental Protection*, 8(1), 5-16. <https://doi.org/10.11648/j.ajep.20190801.12>
- McCarthy, N. (2015). Air pollution Chinese and American cities in comparison (Infographic). Forbes Online. Retrieved from <https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2015/01/23/air-pollution-chinese-and-american-cities-in-comparison-infographic/#6f84ba1d2362>
- McCarthy, N. (2018, April 18). Air pollution contributed to more than 6 million deaths in 2016 (Infographic). Forbes Online. Retrieved from <https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2018/04/18/air-pollution-contributed-to-more-than-6-million-deaths-in-2016-infographic/#39ed258813b4>
- McCarthy, N. (2019). The countries polluting the oceans the most. Statista Online. Retrieved from <https://www.statista.com/chart/12211/the-countries-polluting-the-oceans-the-most/>
- McDaniel, P. (2019, August 13). As California's recycling industry struggles, companies and consumers are forced to adapt. *Los Angeles Times Online*. Retrieved from <https://www.latimes.com/environment/story/2019-08-13/california-recycling-industry-plastics-china>
- Mohan, G. (2015, February 13). Millions of tons of trash dumped into world's oceans. *Los Angeles Times Online*. Retrieved from <https://www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-tons-of-plastic-trash-in-oceans-20150213-story.html>
- NDTV. (2017, August 9). United Nations environment programme chief urges China to do more on climate. NDTV Online. Retrieved from <https://www.ndtv.com/world-news/united-nations-environment-programme-chief-urges-china-to-do-more-on-climate-1735504>
- Parts, C. (2019). Waste not want not: Chinese recyclable waste restrictions, their global impact, and potential U.S. responses. *Chicago Journal of International Law*, 20(1), Art. 8. Retrieved from <https://chicagounbound.uchicago.edu/cjil/vol20/iss1/8>
- Purwaningrum, A. (2018, June 23). Gawat China lakukan hal ini, bumi akan dibanjiri 111 juta ton sampah pada 2030 mendatang. *Bangka Pos Online*. Retrieved from <http://bangka.tribunnews.com/amp/2018/06/23/gawat-china-lakukan-hal-ini-bumi-akan-dibanjiri-111-juta-ton-sampah-pada-2030-mendatang>
- Resource Recycling. (2018). From Green Fence to red alert: A China timeline. Resource Recycling Online. Retrieved from <https://resource-recycling.com/recycling/2018/02/13/green-fence-red-alert-china-timeline/>
- Richter, F. (2019, March 1). China won't accept U.S. plastic waste. Now what?. Statista Online. Retrieved from <https://www.statista.com/chart/17220/plastic-waste-united-states/>
- Rinkesh. (2020). What is waste management? Conserve Energy Future Online. Retrieved from <https://www.conserve-energy-future.com/waste-management-and-waste-disposal-methods.php>

- Sanubari, D. R. (2019). Respon Amerika Serikat terhadap kebijakan larangan impor sampah daur ulang Tiongkok. Skripsi, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga. Retrieved from http://repository.unair.ac.id/87586/5/JURNAL%20SKRIPSI_DIMAS%20RAHMAD%20SANUBARI_0711233043.pdf
- Sebayang, R. (2018, April 17). China berhenti jadi penampung sampah, dunia kebingungan. CNBC Indonesia Online. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180417142645-4-11310/china-berhenti-jadi-penampung-sampah-dunia-kebingungan>
- Schulz, Y. (2019). Plastic China: Beyond waste imports. Made in China Yearbook. <https://doi.org/10.22459/MIC.04.2019.48>
- Septiasputri, M. D. (2019, November 5). Di KTT ASEAN, Jokowi tolak pengiriman limbah B3. Radio Republik Indonesia Online. Retrieved from http://rri.co.id/post/berita/742916/internasional/di_ktt_asean_jokowi_tolak_pengiriman_limbah_b3.html
- Smeets, M. (2018, March 15). Can economic sanctions be effective?. Economic Research and Statistics Division World Trade Organizations Online. Retrieved from https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201803_e.pdf
- Soil Science Society of America. (2020). Soil contaminants. Soil Science Society of America Online. Retrieved from <https://www.soils.org/discover-soils/soils-in-the-city/soil-contaminants>
- Straits Times. (2018, January 21). China's waste import ban upends global recycling industry. Straits Times. Retrieved from <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/chinas-waste-import-ban-upends-global-recycling-industry>
- Sun, N., & Phoonphongphiphat, A. (2018, June 26). China's scrap plastic ban saddles neighbors with piles of problems. Nikkei Asian Review Online. Retrieved from <https://asia.nikkei.com/Spotlight/Asia-Insight/China-s-scrap-plastic-ban-saddles-neighbors-with-piles-of-problems>
- Takahashi, G. (2016). Damage and heavy metal pollution in China's farmland: Reality and solutions. *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 5(1), 11-25. <https://doi.org/10.1080/24761028.2016.11869089>
- United States Environmental Protection Agency. (N.d.). Report on the environment: Municipal solid waste. UNEP. Retrieved from <https://www.epa.gov/roe/>
- Velis, C. (2014). International solid waste association. *Global Recycling Markets: Plastic Waste*, 41.
- Viotti, P. R., & Kauppi, M. V. (2012). *International relations theory*, (5th ed.). Boston, MA: Longman. Retrieved from [https://hostnezt.com/cssfiles/internationalrelations/International%20Relations%20Theory%20\(5th%20Edition\)%20Paul%20R.%20Viotti,%20Mark%20V.%20Kauppi.pdf](https://hostnezt.com/cssfiles/internationalrelations/International%20Relations%20Theory%20(5th%20Edition)%20Paul%20R.%20Viotti,%20Mark%20V.%20Kauppi.pdf)
- Wong, E. (2018, July 19). China is a climate leader but still isn't doing enough on emissions. *New York Times*. Retrieved from <https://www.nytimes.com/2018/07/19/world/asia/china-climate-change-report.html>
- World Bank. (2016, February 29). China: Keeping the water and environment clean in the Qiantang River Basin. World Bank Online. Retrieved

- from <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/02/29/china-keeping-water-and-environment-clean-in-qiangtang-river-basin>
- World Health Organization. (2018, May 2). Air pollution. WHO Online. Retrieved from [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-\(outdoor\)-air-quality-and-health](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health)
- Xinhua. (2018, March 26). China defends foreign waste import ban. China Daily. Retrieved from <http://www.chinadaily.com.cn/a/201803/26/WS5ab8f8bba3105cdcf6514617.html>
- Xinhua. (2013, May 24). President Xi pledges not to sacrifice environment. China Daily USA Online. Retrieved from http://usa.chinadaily.com.cn/china/2013-05/24/content_16530257.htm
- Yang, H., Ma, M., Thompson, J. R., & Flower, R. J. (2018). Waste management, informal recycling, environmental pollution and public health. *Journal of Epidemiology and Community Health* 72(3), 237-243. <https://dx.doi.org/10.1136/jech2016208597>
- Yang, W. (2008). Regulating electrical and electronic wastes in China. *Review of European Community and International Environmental Law*, 17(3), 335-344. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9388.2008.00608.x>
- Xia, Y. (2019). China's environmental campaign: How China's "war in pollution" is transforming the international trade in waste. *New York University Journal of International Law and Politics*, 51, 1101-1178. Retrieved from <http://nyujilp.org/wp-content/uploads/2019/09/NYI402.pdf>
- Zhou, M., et. al. (2019) Mortality, morbidity, and risk factors in China and its provinces, 1990-2017: A systematic analysis for the global burden of disease study 2017. *The Lancet*, 394, 1145-1158. [http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)30427-1](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30427-1)

BIODATA KONTRIBUTOR

Adri Arlan

lecturer from Department of International Relations at Universitas Pelita Harapan. He graduated from Universitas Gadjah Mada (UGM) with Bachelor Degree in Politics in 2010. After graduated, he pursued his dream to study at Russian Federation and obtained Master Degree in International Relations from Peoples' Friendship University of Russia (RUDN) in 2014. He focuses on Global Issues, ASEAN and Eurasia. Currently, he is working as lecturer at Universitas Pelita Harapan, Tangerang.

Daniel Anugerah Widjaja

Lulusan Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan, Daniel meraih gelar S1 Jurusan Hubungan Internasional dengan konsentrasi studi Asia Tenggara. Sejak kecil dia sangat tertarik dengan dunia perfilman dan media yang mendorongnya untuk mempelajari dampak media terhadap persepsi masyarakat terhadap konsep-konsep hubungan internasional. Ia juga ikut mendirikan *Hipotesa*, *outlet* media edukasi yang merintis topik-topik sejarah, ekonomi, dan hubungan internasional bagi anak muda.

Sri Khairunnisa Ariyati

Lahir di Barabai, Kalimantan tanggal 24 Desember 1997 (22 tahun). Penulis menyelesaikan studi S1 Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2020. Selama study, penulis berperan sebagai reporter aktif dalam lembaga penerbitan dan pers mahasiswa 'Nuansa' di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta disamping menjabat sebagai pengurus dalam organisasi Persatuan Mahasiswa Kalimantan Selatan di Yogyakarta. Penulis memiliki ketertarikan pada isu diplomasi, keamanan, dan hak asasi manusia dengan pengalaman menulis di beberapa lembaga kemahasiswaan.

Michelle Viandy Huang

A recent graduate from Tarumanagara University Law School and she obtained her summa cum laude Bachelor of Law degree with expertise in Public International Law in 2020. During her study, she participated in several international moot courts, including the Philip C. Jessup and International Humanitarian Law, and once interned in the Ministry of Foreign Affairs Indonesia. Prior to this, she also has written some publications and other scientific writings.

Meilisa Setyani

Mahasiswi lulusan Program Studi Hubungan Internasional dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pelita Harapan. Ia meraih gelar S1-nya dengan mengambil konsentrasi studi Perdagangan Internasional. Meilisa sempat menyelesaikan magangnya di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia semasa kuliahnya. Ketertarikannya adalah dalam bidang studi perdagangan internasional, lingkungan, dan ekonomi politik internasional.